

PEMBARUAN PESANTREN



Abd A'la

Pembaruan Pesantren

PEMBARUAN PESANTREN

Abd. A'La

Pembinaan Pesantren

Abd Alla

* Pustaka Pesantren, 2006

ixi + 214 halaman: 12 x 18 cm

1. Pesantren 2. NU 3. Aswaja

ISBN 979-8452-06-X

Editor: Zaini Alfa

Rancangan Sampul: Bambang S

Setting/Layout: Sanha

Penerbit:

Pustaka Pesantren

(Kelompok Penerbit) (KLP)

Sulakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4.4 Yogyakarta

Telp. (0274) 387194, 7472110

Faks: (0274) 417762

e-mail: elksa@indosat.net.id

Cetakan II: Mei 2006

Pertetakan dan distribusi:

PT ELKS Pelangi Adisara

Sulakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4.4 Yogyakarta

Telp. (0274) 387194, 7472110

Faks: (0274) 417762

e-mail: elksa@indosat.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Semakin disadari, tantangan dunia pesantren semakin besar dan berat di masa kini dan mendatang. Paradigma "mempertahankan warisan lama yang masih relevan dan mengambil hal terbaru yang lebih baik" benar-benar penting untuk direnung ulang. Mengapa penting? Pertama, dunia pesantren tidak bisa hanya mempertahankan tradisi lama belaka. Sebab, tradisi lama itu tak mesti relevan untuk kekinian kita. Tak mungkin bisa disangkal, pada "puncak kejayaannya" para pemikir Islam telah berhasil mengukir prestasi cemerlang di berbagai bidang pemikiran, namun generasi sekarang (terutama insan-insan pesantren) tak bisa terus menerus "bermalamuk" kepada mereka. Mereka, para pemikir-pemikir itu, adalah anak zaman yang sudah mencurahkan daya ciptanya untuk mencerahi zaman mereka. Adakah pencerahan mereka masih relevan untuk kekinian kita? Itu sebuah tanya yang tak bisa dijawab dengan sekenanya saja.

Jarak waktu yang terlalu jauh (juga berabad-abad) antara pewartis pencerahan pemikiran Islam dengan masa sekarang, sudah menyimpang problemnya sendiri, belum lagi ditambah kompleksitas pemikiran di masa lalu dan sekarang. Jika masih bisa dipertahankan sebuah pernyataan bahwa setiap pemikiran mustahil lahir dari ruang kosong, maka akan segera muncul di benak kita bahwa kompleksitas problem di masa lalu itu tentu “menyumbung” (lebih tepatnya, memaksa dengan sadar) para pemikir Islam untuk memberi jawaban. Jawaban mereka itu tentu saja ada yang bersifat temporer, berdasarkan kasus/petisi/rujukan yang menyertai, namun juga punya potensi—minimal dalam bentuk spiritnya—untuk “melampaui” zamannya. Lebih jelas lagi, pada banyak hal, pemikiran mereka hanya bisa digunakan sebagai jawaban pada masa itu saja, sementara pada sedikit hal, bisa memberi “jawaban” atas kelainan kita.

Kedua, hal tak kalah penting untuk direnungkan dalam rangka “mengambil hal terbaru yang lebih baik” adalah mengungkap secara cerdas problem kelainan kita dengan pendekatan-pendekatan kontemporer. Tak bisa disangkal bahwa modernitas telah “menawarkan” banyak hal untuk dipelajari dan direnungkan, terutama bagi insan-insan pesantren. Pada lapisan luarnya, teknologi modern muncul sebagai “buah manis” yang bisa dicicipi siapa saja dari berbagai belahan dunia. Pada

lapisan dalamnya, berupa paradigma dan pandangan dunia, modernitas juga telah merubah cara pandang lama terhadap dunia dan manusia. Dalam konteks ini, pilihan terbaik bagi insan-insan pesantren adalah mendialogkannya dengan paradigma dan pandangan dunia yang telah diwariskan oleh generasi pencorehan Islam. Dari dialog sejar ini diharapkan akan muncul sintesis-sintesis baru yang lebih segar dan menggairahkan.

Kerangka pemikiran di atas membawa kita pada perlunya memisahkan warisan masa lalu hanya sebagai "teman dialog" bagi modernitas dengan segala produk yang ditawarkannya. Menutup diri untuk berdialog dengan konteks kekinian adalah kebodohan yang tak pantas dibanggakan. Insan-insan pesantren ditantang untuk, secara cerdas dan lincah, membaca khazanah lama dan baru dalam *flow* yang tak terpisah. Masa lalu hadir (dihadirkan) dengan terang dan jujur, lalu "dihadapkan" dengan kekinian kita. Boleh jadi masa lalu tersebut akan tampak "bas" dan tak lagi relevan, namun tak menutup kemungkinan masih ada potensi yang dapat dikembangkan untuk zaman sekarang.

Buku *Pemikiran Pesantren* ini merupakan usaha penulisnya untuk menyertakan kapilang terhadap khazanah masa lalu secara kritis sekaligus kerisycayan untuk merespons tantangan-tantangan kekinian secara cerdas dan berani. Pesantren tak bisa lagi berdam diri

seolah apa yang dikembangkan (lebih tepatnya, dipertahankan) hingga ini akan terus relevan sepanjang zaman. Tak ada satu pun alasan bagi pesantren untuk hanya "mempertahankan masa lalu" tanpa "memikirkan masa depan." Oleh karena itu, secara tegus penulisnya menghimbau agar insan-insan pesantren berani melakukan pembocoran ulang khazanah masa lalu yang selama ini sudah dianggap mapan dengan metode-metode baru di luar pesantren. Salah satu metode yang diusulkan adalah hermeneutika: sebuah metode tafsir terhadap teks yang selama ini berkembang di barat.

Bagi sebagian kalangan pesantren, hermeneutika adalah barang asing. Tidak hanya itu, karena asalnya dari barat, maka metode ini dianggap perlu dicorngai dan ditolak. Ini salah satu sikap kutung dewasa yang muncul belakangan ini. Hal ini, langung atau tidak, menjadi salah satu keprihatinan sang penulis dalam buku ini. Sebab itu, jika pesantren ingin maju dan memberi kontribusi positif bagi kehidupan kita, sudah seyogyanya pesantren berdialog dengan "dunia luar" (apapun warna dan bentuknya) tanpa curiga, meski tak mengurangi daya kritisnya.

Dalam buku ini, penulisnya ingin menegaskan bahwa Pesantren bukanlah museum purba tempat di mana benda-benda urak dan kura disimpan dan dilestarikan. Juga bukan penjara di mana sedikit dan

pikiran dikontrol dan dikendalikan habis-habisan. Pesantren adalah "laboratorium" tempat segala jenis dan aliran pemikiran dikaji dan diuji ulang. Di dalamnya, tak ada lagi yang perlu dirabutkan, apalagi dikuduskan. Semuanya terbuka untuk diragukan dan dipertanyakan.

Sudah puluhan tahun insan-insan pesantren berduka tentang di runtuhan itu. Sudah pesantren "candu" yang membuat batin dan pikiran tentang dan nyaman. Bukan! Pesantren bukanlah candu! Pesantren adalah laji yang menggelisahkan. Siapa pun yang masuk ke dalamnya acyuganya mengupuk sedikitnya satu tanya: Bisakah tradisi lama berdialog sehat dengan kehidupan kita?

Selamat Membaca!

PENGANTAR PENULIS

Siapa pun yang hendak mengkap Islam Indonesia, sudah barang tentu ia tak bisa mengabaikan keberadaan pesantren dan Nahdhatul Ulama (NU). Kedua unsur ini perlu dihincang dalam kaitannya dengan Islam Indonesia bukan sekadar karena warga NU merupakan kelompok Islam mayoritas, juga bukan karena pesantren dianggap sebagai basis keimanan NU sejak dulu hingga sekarang ini. Alasan yang jauh lebih mendasar adalah baik pesantren maupun NU, sampai derajat tertentu, merupakan kelompok Islam yang memiliki dinamika dan viabilitas cukup tinggi dalam merajut Islam Indonesia. Keduanya pernah membuktikan kemampuannya dalam mendialogkan Islam dengan sosial budaya masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah berkiprah besar dalam pengembangan ilmu keislaman "tradisional" dengan bingkai Aswaja dan moralitas luhur, yang dibandingkan dengan kearifan lokal. Dalam bingkai itu, NU kemudian hadir untuk menyebarkan nilai-nilai itu ke dalam masyarakat luas. Berdasar pada nilai-nilai yang dawat pesantren dan kemudian diperkukuh

dan disebarkan. Selain itu, Islam terus menjadi bagian integral dan budaya masyarakat Islam Indonesia dengan karakteristiknya yang pluralis, beretnis, beragama, dan kebangsaan. Pada catatan inilah sejarah terdapat peran dan sumbangsih konkret dunia pesantren dan jamaah Nahdlatul Ulama dalam memberdayakan masyarakat dan membangun solidaritas kebangsaan.

Melainkan begitu, peranan sejarah yang dilakukannya tidak semata-mata bersifat tunggal. Peran luhur yang dilakukannya mengasumi pasang surut dan waktu ke waktu. Pada suatu waktu, hegemoni negara yang begitu kuat membuat dunia pesantren *disempitkan* untuk mempertahankan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang berpijak pada nilai-nilai memelihara pendidikan keagamaan masyarakat. Devosion atau arwahannya adalah nilai-nilai agama yang memelihara yang mengedepankan keimanan, kesederhanaan dan ketekunan. Selain itu, nilai-nilai pragmatis dan sekuler.

Sekali lagi yang juga menempa NU dalam historias yang dirangsangnya, pengaruh itu berperan terbuk ke dalam masyarakat ternak yang masih sangat pluralistik kekuasaan. Harus diakui ketika pemerintahnya terlena dalam urusan kekuasaan sehingga tidak dapat mengabdikan perannya sebagai pembela keagamaan yang transformatif. Pada saat yang sama, Islam malah diposisikan dengan tendensi eksklusif.

yang mulai menghegemoni dunia Islam. Tanpa ke arah 'keman' dengan pandangan yang diromatis. Akibat dari, desengapa atau tidak mulai memabuk tubuh. *Si* [dampaknya, *mengetahuannya* bukan kecerdasan dan *say index track* *sem* bukan kerendahan hati. mengambil alih peran Aswaja yang erat nilai nilai *sem* *with*, *laureat*, *la* *ada* dan *sem* *sem*]

Rebrat di atas mengkhawatirkan bahwa ini sebagai buku "sampah", dan bukan hasil penelitian atau karya ini tentu tidak bisa memotivasi *Si* dan kemudian secara tajam dan akurat, apalagi bahwa karya ini telah merupakan hasil penyusunan dan refleksi penulis terhadap fenomena yang berkembang, yang dalam batas tertentu didukung oleh data dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan moral.

Dengan testatus budaya ini, saya memampukan rasa terima kasih yang tulus pada *Si* yang telah menerbitkan karya sejerus ini entah itu apa artinya. *Materi* *sem* *sem* kepada Mas Fikri sebagai Direktur, Mas Nur Khalki Ridwan yang pernah mengedit dan sering dibanggu (pertemuan dan) penulis, kepada Zoel yang berusaha pernah mengedit tunggal rampung, Alhak Retno yang sabar dan baik hati, dan kepada Mas Soleh Iste yang sejak awal mendorong penulis untuk menyerahkan naskah ini pada *Si*. Terima kasih juga untuk *Si* yang sering diminta

bantuan menghubungkan penulis dengan penerbit dan kepada semua orang penulis yang terbiasa, anggun atau tidak dalam penerbitan yang tidak mungkin pernah sebelumnya. Dalam kesempatan ini pula penulis tidak mungkin melupakan persahabatan penulis. Ada yang selalu mendukung agar penulis jangan hanya bisa menulis di koran, tapi juga menulis buku, kepada anak-anak penulis, Jha. Iwa, Fanni dan Jhena yang selalu memberi semangat penulis dengan cinta dan kekuatan mereka. Semoga karya penerbitan karya ini sebagai awal untuk menulis buku yang "benar-benar buku."

Cirelok Girik, Maret 2016

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi ➤ v

Pengantar Penulis ➤ x

Daftar Isi ➤ xv

- 1 Peran Pesantren dalam Transformasi Sosial:
Pemaknaan Kembali Nilai dan Tradisi ➤ 1
- 2 Peran Pesantren dalam Pengembangan
Pendidikan Alternatif ➤ 15
- 3 Pengembangan Akhlak: Pendidikan Pesantren,
Kini, dan Masa Depan ➤ 29
- 4 Signifikansi Pemberdayaan Masyarakat Demo-
kratis dalam Koneksi Kebaruan: Menegasi Peran
Pesantren dalam Pengembangan *Civil Society* ➤ 41
- 5 Pesantren Annuqayah dan Pemberdayaan
Masyarakat ➤ 55
- 6 Nilai Penting Ajaran NU bagi Kehidupan Berbangsa
dan Bermasyarakat ➤ 71
- 7 Islam dan Perkembangan Sosial Politik di Indonesia

| | |
|---|-----|
| Syncretism: Transformasi Sosial dalam Perspektif Arwani | 85 |
| 8. Islam, Prohams, Lokalitas dan Universalitas Islam dalam Perspektif Nt | 103 |
| 9. N dan Etik: Memperkuat Gerakan Ketahanan yang Kritis | 143 |
| 10. Membangun Etik Sosial dan Pesantren: Ahlak Sosial Sebagai Dasar Membangun Masya- rakat Berkeadaban | 155 |
| 11. N dan Konteksualisasi Islam dalam Lokalitas Budaya | 165 |
| 12. Memadatkan Pemahaman Keagamaan | 185 |
| Daftar Pustaka | 201 |
| Biografi Penulis | 213 |

PERAN PESANTREN DALAM TRANSFORMASI SOSIAL: Pemaknaan Kembali Nilai dan Tradisi

Sejak awal keberadaannya, pesantren tumbuh, berkembang, dan tersebar di berbagai pedesaan. Keberadaan pesantren sebagai lembaga keislaman yang sangat kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis dalam mengembangkan masyarakat Indonesia. Rendras menyimpulkan, pada satu sisi, sebagian besar penduduk Indonesia tumbuh dan bertumbuh—satu—satu pada sisi lain, masyarakat dan mereka tinggal di pedesaan.

Berdasarkan rebras tersebut, pesantren sampai saat ini memiliki pengaruh cukup kuat pada hampir seluruh aspek kehidupan di kalangan masyarakat muslim pedesaan yang luas. Kuatnya pengaruh pesantren tersebut membuat peran pengembanan pendidikan dan interpretasi keagamaan yang berasal dari luar kaum

Ditampilkan dalam Seminar Nasional Belajar Kita Kontribusi Pesantren dalam Perubahan Sosial dan Menujukan Negara Demokratis. Adil dan Sejahtera yang diadakan oleh KESABE pada 5 Maret 2003 di Surabaya, Gelombang

dir pesantren tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap *way of life* dan sikap masyarakat Islam di daerah pedesaan. Kewajiban ini menunjukkan bahwa setiap upaya yang diujikan untuk pengembangan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan, perlu melibatkan dunia pesantren.

Tujuan ini mengangkar lompatan yang dilakukan pesantren, dan tantangan yang harus dihadapi saat ini dan ke depan. Dari pemelurusan itu, langkah langkah pesantren ke depan sangat penting untuk dilaksanakan secara sistem agar pesantren benar benar bisa ekui, berperan secara maksimal mengantarkan masyarakat pada kemampuan untuk menyikapi kehidupan kontemporer dengan segala dampak yang diluarnya.

Peran Pesantren: Sebuah Refleksi

Secara substantif, pesantren merupakan unsur-unsur keagamaan yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Lembaga ini tumbuh dan berkembang dan dan untuk masyarakat dengan memosisikan dirinya sebagai bagian masyarakat dalam pengertian yang transformatif. Dalam konteks itu, penubuhan pesantren pada dasar

5. Wicaksono, "Pesantren and the Role of Islam in Indonesia" dalam Manfred Geyer & Wolfgang Karner eds. *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*. Jakarta: P3M 1988, hlm. 63.

nya merupakan pendidikan yang sarat dengan nuansa transformasi sosial. Pesantren berhasil melewatkan visi dan kepiayanya dalam kerangka pengabdian sosial yang pada mulanya dititikankan kepada pembinaan moral, keagamaan dan kemudian dikembangkan kepada urusan urusan pengembangan yang lebih sistematis dan terpadu.

Pada awal berdirinya, pengabdian pesantren terhadap masyarakat, sesuai zamannya, berbentuk sangat sederhana dan bisa dibilang sangat alam. Pengabdian tersebut diwujudkan, misalnya, dengan pelayanan keagamaan¹ kepada masyarakat, menyediakan wadah bagi sosialisasi anak-anak, dan selagi tempat bagi para remaja yang datang dari daerah yang sangat jauh untuk mempelajari bermacam-macam pengetahuan dan base ketepatan ke base selanjutnya. Dalam bentuk seperti itu, pesantren terlibat aktif dalam peningkatan keagamaan dan pada pada seperti yang dikembangkan di masyarakat luas.

Kegiatan pesantren ini merupakan bentuk sangat potensial yang nantinya menjadikan pesantren sebagai salah satu alternatif dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Hal itu terlihat jelas ketika pesantren pada akhir dekade 1970-an dan dekade 80-an mengadakan kegiatan yang seluruh

¹ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat Perjalan Sejarah Indonesia* Cetakan I, Jakarta, LPJES (1987), hlm. 7-11

substansial serta memukit pada ketetapan nilai masyarakat, seperti pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penggunaan teknologi alternatif.

Banyak kalangan menilai, hasil upaya satuan itu dianggap cukup mengesankan karena, sampai dengan tertentu, telah mampu merobuk masyarakat menyadarkan tentang arti kehidupan yang sebenarnya dan mengetahui persoalan konkret yang mereka hadapi sehingga mereka merasa tidak gantung serta lebih berdaya dalam menyikapi kehidupan dengan segala kompleksitas persediaannya. Pemberdayaan masyarakat itu dapat dikatakan menguji keberhasilan karena pesantren melakukan strategi pendekatan dengan memberikan *kan dan bukan ikan* kepada masyarakat. Melalui pendekatan itu, pesantren lebih mengenalkan "proses" dan pada "hasil" dan menumbuhkembangkan nilai nilai ketimbang hal hal yang berwujud materi.

Pemberian masyarakat yang dilakukan pesantren itu merupakan manifestasi dan nilai-nilai yang diamat pesantren. Nilai pokok yang selama ini berkembang dalam komunitas santri (lebih tepatnya lagi, dunia pesantren) adalah seluruh kehidupan ini diarahkan sebagai ibadah. Maksudnya, kehidupan duniawi di subordinasikan dalam rangkaian nilai-nilai ilahi yang telah mereka peluk sebagai sumber nilai tertinggi.¹ Dari

¹ Lihat Bachtiar Effendi, "Nilai Keam Santri" dalam M. Dawam Rahardjo (ed), *Pengantar Dunia Pesantren: Catatan Pengantar*, (Jakarta: P3M 1985) hlm. 49.

nilai-nilai ini berkembang nilai-nilai luhur yang lainnya, seperti nilai kesetiaan, kemoderhanaan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini merupakan dasar yang dijadikan pondasi pesantren dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat. Yang pada tahap berikutnya dikembangkan sebagai nilai yang perlu menjadi acuan masyarakat luas.

Paparan di atas bukan berarti tidak ada persoalan yang dihadapi dunia pesantren. Masuknya pesantren dalam sistem pendidikan modern telah melahirkan pendidikan yang rusak yang berdampak langsung atau tidak, atas perkembangan masyarakat yang semakin telah dikenal bangsa. Persepsi pesantren terhadap pendidikan modern dalam bentuk sekolah telah menimbulkan pergeseran yang cukup signifikan negara ke dunia jama'ah pesantren. Dominasi negara yang begitu kuat membuat nilai-nilai pesantren selama ini mengalami petrudaran. Pendidikan pesantren yang berorientasi nilai mengacu perubahan menjadi pendidikan negara dengan capaian yang bersifat formalistik. Akibatnya, selain ketegangan dengan pesantren pada negara menjadi tidak terkendali. Hal itu juga membuat pendidikan pesantren ini juga berorientasi pada garis. Cita-cita, baik bagi santri maupun pesantren, untuk mengaudi kenada masyarakat sebagai pendidik agama dan mengembangkan kewiraswastaan mulai hilang ber-

gini dengan cara-cara menjadi, misalnya, pegawai.⁴ Keberadaan pesantren sebagai anutan masyarakat akan membuat pola pandang seperti itu menjadi semacam anutan pola di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, upaya pesantren untuk membentengkan masyarakat sebagai masyarakat mandiri menjadi terancam ke dalam arus utam.

Demikian pula fenomena yang berkembang ke kalangan ini menunjukkan bahwa pesantren belum bisa sepenuhnya membentengkan nilai-nilai *sehidq* sebagai bagian intrinsik keberagamaan masyarakat. Hal itu dapat dibaca dari merebaknya ketertarikan dan keributan lain yang sebagaimana melibatkan masyarakat yang memiliki "hubungan" dengan pesantren. Padahal sebenarnya, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pesantren merupakan upaya pengembangan masyarakat agar menjadi menjadi masyarakat yang berkeadilan, mandiri, dan sejahtera, sesuai nilai dan ajaran Islam yang menjadi acuan pesantren.

Tantangan Pesantren Saat Ini dan ke Depan

Pesantren kian menjadi relevan ketika globalisasi telah jadi realitas kehidupan yang harus dihadapi

⁴ Lihat Abdurrahman Wahid, "Paradigma Pengembangan Masyarakat melalui Pesantren," dalam *Jurnal Pesantren* (No. 3, Vol. VI 588) hlm. 3.

umat manusia, termasuk pesantren dan masyarakat di negeri ini. Globalisasi, terlepas dan mumpi-mumpi sudah yang diwarikannya, merupakan kolonialisme berwujud baru. Secara ekonomi, ia menaruh pada organisasi utama utama produksi, penetrasi industri lintas negara, peredaran pasar uang, peredaran barang konsumsi dan Dunia Pertama ke Dunia Ketiga, dan penggeseran penduduk lintas negara secara besar-besaran. Selanjutnya secara politik, ideologi, globalisasi berarti liberalisasi perdagangan dan investasi, deregulasi, privatisasi, adopsi sistem politik demokrasi dan otonomi daerah. Dengan kata lain globalisasi adalah neo-liberalisme yang pada intinya membiarkan pasar bekerja secara bebas. Dalam ideologi ini, pemerintah harus meniadakan campur tangan terhadap perusahaan swasta, apa pun akibatnya dalam bentuk pemberian ruang bebas dan keterbukaan terhadap perdagangan Internasional dan investasi seperti AFTA maupun dalam bentuk kawasan pertumbuhan yang bebas dan birokrasi negara.¹ Globalisasi merupakan perubahan dan dominasi negara kepada dominasi perusahaan transnasional.

¹ Fr. Wiharto Nugroho, *Teologi Pembebasan: Sebuah Metode Praktek dan Jurnal Catatan Pertama* (Yogyakarta: KLS 2000) hlm. 26-27.

² Luk Manan Fath, "Pemerintah Mau Revisi? Masalah pada apa? Setelah Pengembangan Pendidikan Berbasis Nilai-nilai Pesantren PPAmbiyen Gajah-Gajah Surabaya tanggal 3-4 Maret 2003) new 3

Pertemuan yang dilakukannya telah membuktikan bahwa globalisasi menjadi ajang pertarungan antara yang kuat, setengah kuat, dan lemah, serta pihak lemah. Pengamatan lama tahun belakangan ini cenderung menunjukkan bahwa sistem yang ada hanya menguntungkan sebagian kelompok yang kuat saja, terutama perusahaan multinasional yang berasal dari negara maju. Selain itu, sistem dalam globalisasi juga menunjukkan bahwa negara maju menggunakan dikotomi pasar bebas untuk menguasai ekspansi dunia dan tidak benar-benar mempunyai niat melakukan praktik pasar bebas. Dari tradisi itu tampak bahwa masyarakat di Dunia Ketiga akan jadi korban untuk yang kesekian kalinya. Setelah lepas dari keterbatasan negara yang terpelekat kuat mereka lalu diterangkan dalam kehendak tiru oleh kaum interpretasi dari Dunia Pertama. Dalam kondisi seperti itu, ketidakberdayaan masyarakat akan menentukan bentuknya yang paling sempurna.

Pesantren, dengan tenaga yang disalurkan hingga luar, ditantang untuk menghadapi globalisasi secara kritis dan bijak. Pesantren harus mampu mencari nilai yang benar-benar mencerdaskan sehingga, pada satu sisi, dapat menumbuhkembangkan kaum santri yang memiliki wawasan luas yang tidak gampang mengabdikan otak.

Ustad Hira Jemberia "Perubahan Kategorisasi Perdagangan Dunia Akibat Globalisasi untuk Menyempurnakan Dunia Ketiga" dalam Jurnal Wacana, (Edisi 5 Tahun 4 2002) him. 80 dan 88

nyaris dan sekaligus tidak ketidatangan mendinas dan ya
durus a, uan, pada sisi lain, dapat mengantarkan masva
masa menjadi a. masva yang men adan 'entari; per
sekarang yang dihadapi dan mampu mengatasi dengan
penuh kemampuhan dan ketahanan

Membaca Kembali Nilai dan Tradisi Pesantren

Selengkapnya telah disebutkan di atas, pesantren
merupakan lembaga keagamaan yang saru nilai dan
tradisi. ubat yang telah menjadi karakistik pesan
tersebut meliputi seluruh permasalahan separasinya. Secara
murni, al. ka. ak. er. tik tersebut memuat peluang
kultur besar untuk diadkan oleh ppaan dan/ rangka
menyikapi permasalahan dan persoalan pesantren yang
yang menghaifang pesantren, secara khusus dan
masvafakat. uan, secara umum. Misalnya, ketidurutan,
ketidayaan, dan kesederhanaan ketiga merupakan
nilai nilai yang dapat mengpaikan masyarakat dan dampak
negatif glisialisasi dalam bentuk acenganungan dan
pela hidup komuterisme yang lambat tapi pasti akan
menghancurkan sendi sendi kehidupan umat manu
410

tersebutnya telah bagaimana mengemban
dan menabuhkan nilai nilai tersebut dalam hidup ke
seharan santri dan masyarakat serta merumus ulang

nilai-nilai tersebut dalam konteks kekinian. Sebab tanpa adanya upaya ini, nilai-nilai tersebut akan menjadi simbol-simbol formalistis yang tidak menjadi sumber rujukan dalam sikap dan perilaku mereka serta tidak memuat pengaruh nyata dalam kehidupan.

Strategi dasar yang perlu dilakukan untuk men-capai ke arah itu adalah pengembangan pendidikan pada makna hakiki. Dengan itu, pendidikan telah mengalami pembiasaan—arti dengan melibatkannya sebagai wahana pengajaran yang telah menitikberatkan kepada transfer pengetahuan semata. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu pendidikan telah diidentikkan dengan sekedar pemberian naseh, atau atribut atribut formal yang bersifat arabisasi semata. Pandangan semacam itu perlu dikehendaki seluas-luasnya diakhiri dengan metode-darwinya sebagai primer manusia untuk *Amg* dan memantapkannya sebagai *Amg**. Dalam pengertian ini, pendidikan diarahkan sebagai primer penanaman nilai-nilai dan perluasan wawasan serta kemampuan manusia sehingga mereka benar-benar tercerahkan.

Dalam perspektif Islam, pengertian pendidikan semacam itu telah menemukan kerangka acuan yang cukup jelas. Dalam sabda Rasulullah *Ita ma ba'ada lila* *lulammumu mutakimna d al-hay* untuk memantapkannya

* Fuzul Hasan: *Mendekatkan Arus Dede pada Lingkungan Baitan Mengeluhkannya*. Rubric Dampak dalam *Jurnal Psikhe* (No. 2 1988, Tahun XVI, nom. 40).

secara utuh, maka tersebut perlu dikurikan dengan Al-Qur'an surat al-Ankabut (21) 107 dimana Allah berfirman: *Wa ma arsalnah ila rahmatan li al-dunya*. Berdasarkan dua rujukan tersebut di atas, pendidikan dalam Islam harus dapat mengembangkan manusia sebagai makhluk yang memiliki moralitas terhadap Allah, terhadap dirinya, dan alam keseluruhan. Dengan demikian, unsur Islam yang telah menjadikan Rasulullah sebagai rujukan dan teladan dapat menyebarkan rahmat di alam semesta sehingga kedamaian dan kesejahteraan akan berlabuh nyata dalam kehidupan dunia.

Pesantren sebagai lembaga keagamaan Islam memiliki tugas untuk melestarikan konsep pendidikannya dalam kerangka nilai-nilai tersebut. Melalui sistem pendidikan seperti ini, nilai dan tradisi pesantren yang sejatinya merujuk kepada moralitas sebagaimana di ajarkan Nabi perlu dikontekstualisasikan ke dalam kenyataan konkret yang dihadapi masyarakat.

Pengembangan masyarakat menjadi sesuatu yang tidak terlupakan untuk diistakan secara utuh dalam sistem pendidikan yang dilakukan pesantren, sebab Islam pada hakikatnya adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan pembelajaran untuk manusia secara keseluruhan dan segala belenggu yang akan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan. Sejak awal, misi-misi yang diajarkan Nabi Muhammad adalah keber-tauhidan yang terkait erat dengan humanisme dan rasa keadilan ekonomi dan sosial yang intensitasnya

tidak kurang dari persoalan tauhid itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, peran ini memusatkan perhatian sebagai motivasi keislaman untuk membela diri ke dalam pengetahuan umat manusia dan masyarakat. Selain secara khushu dan sebagai penganut yang akan memikul mereka tidak berdaya.

Berbagai pada nilai-nilai memengaruhi kehidupan itu, nilai-nilai dan tradisi pemerintahan yang akan perlu diingat, kemudiannya berdasarkan pemerintahan ini yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Kemandirian, misalnya, berakibat tidak dimulainya sebagai kemandirian ini dalam hubungan ekonomi terhadap kekuatan asing lainnya. Akan tetapi, hal ini juga merupakan keterbatasan dan sikap kritis pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi isu-isu dan persoalan yang terus menghantam mereka. Kemudian pula, kekhlisan tidak dianggap sebagai nilai yang mengedepankan prinsip-prinsip prestasi, bukan sebagai prestasi sebagai prestasi yang jayahnya bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Dalam kekhlisan itu perlu pula dipersembahkan nilai-nilai kesaharan dan kemuliaan karena kehidupan pada intinya adalah prinsip-prinsip yang terus bergerak yang tidak dapat diulap sebagai sekap. Keistimewaan menunjukkan bahwa dalam melakukan proses itu, bertanggung jawab dalam berbagai bentuknya.

⁴ Fakhri Rahman dalam Edis Kadir (Chicago-London: The University of Chicago Press, 1979), hlm. 12.

penilai yang tidak bermanfaat. Nilai-nilai itulah yang perlu disebarkan pesantren dan memperdagangkannya sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pada sisi ini, interpretasi kreatif dan *gases* dari pesantren atas nilai-nilai itu menjadi suatu keharusan. Kemampuan pesantren melakukan hal itu akan mengarahkan pesantren ke dalam suatu peran signifikan dalam menawarkan pendidikan alternatif yang, pada gilirannya, dapat melakukan *community empowerment* sehingga dampak dampak negatif globalisasi dapat dikurangi kalau tidak dihilangkan sama sekali. ⁶

PERAN PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ALTERNATIF*

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan merupakan realitas yang tak dapat diabaikan. Sepanjang sejarah yang diwarnai, pesantren terus menekankan pendidikan tersebut dan mengembangkannya sebagai fokus kegiatan. Dalam mengembangkan pendidikan, pesantren telah memutuskan diri bukan yang cukup kecil sehingga mampu melewati berbagai zaman dengan beragam masalah yang dihadapinya. Dalam sejarahnya ini pula, pesantren telah menyumbangkan sesuatu yang tidak kecil bagi Islam di negerinya.

Sungguhpun demikian, pesantren tak dapat berlebihan dan puas dengan sekadar mampu bertahan atau terhadap perubahan yang diberikan di masa lalu. Signifikansi pesantren bukan hanya terletak pada dua hal tersebut tapi pada kontinuitasnya yang nyata yang

Ditampikan dalam Seminar Nasional Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan dan Sosial yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Falah Sido Jember pada 5 Juli 2007

umuh Islam, secara khusus, dan masyarakat, secara luas, di masa kini dan mendatang; justru kalau kita mau jujur, ketahanan pesantren ternyata mencukupi berbagai persoalan yang cukup serius. Sebab dalam realitanya, daya tahan tersebut, pada satu sisi, telah membantu terjadinya pengentasan permasalahan konservasi dan pada sisi lain, hal itu telah memberi pesantren ke dalam perubahan yang sekadar "latah" dan tanpa antisipatif.

Tritisan ini mengungkap reputar masalah itu untuk pencenderaannya, nilai-nilai yang dimiliki pesantren perlu dipaparkan terlebih dulu. Berdasarkan hal tersebut, petrus tepat yang harus diambil pesantren dalam kehidupan kontemporer yang berkembang dewasa ini mesti dikonstruksikan secara arif dan kritis sehingga eksistensi pesantren akan benar-benar bermakna bagi kehidupan masyarakat dan bangsa dalam konteks kekinian.

Keunggulan Pesantren: Perspektif Historis

Hampir dapat dipastikan, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Jawa. Munculnya pesantren di Jawa bersamaan dengan kedatangan para Wali yang menyebarkan Islam di daerah tersebut. Menurut catatan sejarah, tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Syekh Maulana Malik

Ibrahim Pula tersebut bertuduh dikembangkan dan dilanjutkan oleh para Wah yang lain.

Salah satu kelebihan dari model pendidikan yang dikembangkan para Wah Sungsu itu (dan bertuduh menjadi ciri khas pendidikan pesantren) terletak pada pola pendidikannya yang didasarkan pada segala sesuatu yang sudah akrab dengan masyarakat dan perpaduan antara aspek moralis dan praktis. Misalnya, Sunan Giri menggunakan pendekatan pertuturan untuk mengajarkan Islam kepada anak-anak, Sunan Kudus menggunakan dongeng, Sunan Kalijaga menggunakan Islam melalui wayang kulit, dan Sunan Derojat menggunakan Islam melalui keterlibatan langsung dalam tangle masyarakat menampung kesengsaraan yang dialami masyarakat.

Pula itu telah mempersiapkan pesantren pada sistem pendidikan yang penuh kekeluargaan dan memiliki spektrum luas, mencakup batas-batas pesantren itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan, pesantren merupakan *double agent* dengan mempersiapkan masyarakat sebagai masyarakat pembelaq dan mempersiapkan belaq sebagai primer yang berjalan terus menerus. Masyarakat menjadi bebas dan utuh sebagai institusi dengan aturan-aturannya, sistem evaluasinya, yang yang pekerjaan yang dibencikannya, serta sertifikat yang

lihat Munir Sani'a, *Spiritual Power of Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1987), hlm. 22-24

dikembangkan. Puisi itu, pada gilirannya, menjadikan pendidikan pesantren tidak membatasi batas secara tegas antara santri itu sendiri dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian pula, pesantren tidak membatasi waktu belajar dalam sekat-sekat waktu yang kaku sehingga proses pembelajaran dan pendidikan selama dua puluh empat jam hari penuh dalam bentuk yang nyata tanpa harus 'memisahkan' siapa pun yang terlibat di dalamnya.

Ketersediaan pesantren diperkuat dengan tradisi keilmuannya yang integral. Fakta maknanya, integralitas itu dapat dilacak pada pengintegrasian *fiqh* dan *uusi* atau bentuknya yang disatukan dengan *fiqh* *ijfiki* (dengan kata lain, yang dibutukan di dunia pesantren bukan hanya aspek pengamalan hukum atau aspek akhlak semata, melainkan juga pemecahan pengetahuan tentang kehidupan dan hakikat manusia serta kehidupan masyarakat). Dengan demikian, antara lain, proses pembelajaran dan pendidikan serta intelektualitas dan spiritualitas menyatu dalam satu kerangka nilai-nilai yang diyakini pesantren.

¹ Habib Chirpi, "Teguh sudi Mdn Saiful dan Ahlusunnah wal Jama'ah Rukn Wawasan 2020 Jurna Pesantren No Perdana Oktober-Desember 1994), hlm. 39.

² Haji Abdulrahman Wahid, "Asal Usul Tradisi Keilmuan Pesantren" dalam Jurnal Aswadin (No Perdana Oktober-Desember 1994), hlm. 8-10.

Hal lain yang hingga kini masih menjadi pesantren adalah penekanannya pada nilai-nilai yang dasarnya seperti ketamanduan, kesederhanaan, dan ketekhlisan. Nilai-nilai dasar ini dibingkai dengan paradigma yang sangat menekankan kepada apresiasi terhadap segala tradisi yang baik selangkah akomodatif terhadap bentuk-bentuk reformasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai yang cukup kental di dalam pesantren ini pada prinsipnya merupakan nilai-nilai keagamaan otentik yang memiliki benang merah kuat dengan kesejarahan umat dan normativitas Islam hakiki.

Hal lain dari vetus itu adalah kehadiran pesantren sebagai institusi yang mampu memberikan sumbuungan penting dan kreatif dalam proses transformasi ilmu-ilmu Islam, reproduksi utama, pemeliharaan ilmu dan tradisi Islam, bahkan pembentukan dan ekspansi masyarakat Muslim santri.¹ Kenyataan itu telah membuat lembaga tersebut memiliki keunggulan yang cukup signifikan. Pesantren memiliki pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat, khususnya di pedesaan. Di samping itu, di kalangan para santri bertumbuh wibawas cukup tinggi, toleransi dalam menjalankan tugas, dan rasa pengabdian cukup besar bagi kepentingan umum. Kelebihan tersebut menjadikan pesantren memiliki potensi atau peluang cukup besar sebagai agen per-

¹ Arjunanb Aya, *Konsep, Struktur di Indonesia: Pengalaman Jalur Cendekia* (Jakarta: Paramarung, 1999), pp. 184-185.

bangunan' yang harus terhubung kepada *urban development* (aspek yang kapabilitas). Hal ini menjadikan keberadaan pesantren sebagai lembaga dan sistem pendidikan alternatif jika dirumuskan secara arif, akan terbukti nyata di bumi Indonesia.

Pesantren Perspektif Keldian: Persiapan yang Harus Dibenahi

Untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan ideal, tentu saja ia harus menghadapi dan memuntahkan berbagai permasalahan yang saat ini sedang menantang atau bahkan mengancamnya. Daudan atau tidak, gelombang modernisasi, dengan segala dampaknya, membuat pesantren agak kelumpuhan dalam menghadapi ragam masalah yang dihadapinya. Respons pesantren dalam rangka menanggapi permasalahan tersebut terkesan setengah hati, atau sekadar bersifat *ad hoc* saja.

Hal ini tampak jelas ketika pesantren mengadopsi sistem "madrasah" yang kaku. Tampak, pesantren belum mampu sepenuhnya melepaskan sistem itu di bawah nilai-nilai yang selama ini dijunjurnya. Akibatnya, pada satu sisi, pesantren terpingir ke dunia duma yang penuh nilai-nilai pragmatis sehingga hujum atau

¹ Abdurrahman Wahid, *Pergerakan Negara Agama dan Kebudayaan* (Jakarta: Dunia Raya, 2003), hlm. 733.

pendidikan menjadi memudar dan waktu ke waktu sedang, pada zaman, pesantren belum bisa melakukan kegiatan antarkelompok keorganisasian secara utuh dengan ri. Jenderson. Misalnya, antara ilmu agama dan ilmu umum. Meskipun di beberapa pesantren sama-sama diajarkan, diabaikan beberapa sendiri sendiri sehingga tidak menghasilkan pemahaman yang benar benar 'hati, mencerdaskan umat dan sekaligus tetap gemuk. Bahkan telah dan itu, "tapi dan apa tanpa disadari" dibarengi masuk dan menyuarai, implisit atau eksplisit, kebijakan sebuah pesantren.

Manajemen pesantren juga masih menunjukkan wajah serupa. Pesantren, meski tidak semua selaras itu dikelola sendirian dengan kesan menonjol pada penanganan individu dan bermutu kharismanya. Umentasi ke Jepang menjadi kurang jelas dan terbelah perwujudan perwujudan praktik keorganisasian. Ada pesantren yang belum merumuskan secara konkrit menjadi seragam dalam kebijakan pesantren yang bersifat sesuai.

Kondisi tersebut dipertahankan juga dengan aspek metodologi yang selama ini belum mengalami perkembangan cukup berarti. Pola pendidikan dengan pendekatan yang berbasis waras dan monologi sampai batas tertentu masih banyak diapresiasi dalam pendidikan pesantren. Demikian pula, penghayatan keilmuan itu sendiri masih diabaikan dalam pola pen-

Konsep pendidikan semacam itu mulai absekan dalam dunia pesantren saat ini sehingga pesantren tidak mampu memberikan output yang benar-benar bertaraf transformatif bagi masyarakat.

Mengembangkan Pesantren sebagai Pendidikan Alternatif

Persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan di atas merupakan agenda pertama yang harus diselesaikan pesantren. Persoalan tersebut mesti dicarikan solusinya melalui kekuatan yang dimiliki pesantren itu sendiri yaitu tradisi *Tarbi' al qadim al haliq*. Wawasan tersebut berdalarnya dibaca kembali untuk menemukan nilai-nilai substantif yang menjadi inti dan keseluruhan tradisi tersebut, serta direkonstruksi untuk dikembangkan berdasarkan perubahan kehidupan konkret yang mengitarinya.

1/ *Tarbi'* sebagai landasan keilmuan pesantren berdalarnya menasib bangkai dalam merumuskan Islam pesantren dalam konteks kekinian. Dengan kata lain, kontekstualisasi nilai-nilai tradisi menjadi keharusan untuk dibumikan dalam realitas pendidikan pesantren kesederhanaan, kemandirian, dan sekularitas perlu dijadikan roh pendidikan dalam suatu rumusan konseptual yang sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan yang terus berjalan. Dengan demikian,

kesederhanaan akan menemukan titik labuhnya pada pengembangan efisiensi dan efektivitas lembaga, dan kemandirian akan diarahkan kepada pembentukan *corporate culture*, serta ketekhalasan akan diimplementasikan ke dalam bentuk pengembangan prestasi.

Demikian pula, model kepemimpinan kharismatik yang selama ini dominan di lingkungan pesantren perlu direvisi secara kreatif berdasarkan nilai-nilai madaniitas dan nilai-nilai universal seperti Manajemen Kharismatik tersebut tidak harus diimutasi, tapi dibandingkan dengan pola rasional dan dibandingkan dengan nilai-nilai moralitas agama. Misalnya, ketekhalasan dan jujur itu akan memerlukan suatu manajemen yang madani tanpa harus ketekhalasan individu yang bernilai moralitas, kejujuran, dan, pada satu sisi, moralitas diharapkan tetap memiliki ruang cukup luas sebagai lingkun keseluruhan proses penanganannya. Pengembangan pendidikan pesantren pada sisi lain unsur-unsur manajemen dikembangkan secara intens tanpa harus terperangkap pada penakut-penakut tradisional yang sangat kaku.

¹ Kepemimpinan kharismatik dapat dikatakan bermuatan moral karena kharisma tersebut pada umumnya bermuara pada perilaku keuletan dalam masalah kepemimpinan itu, berpegang pada prinsip-prinsip yang baik-baik dalam hubungan manusia dengan manusia, dengan sesama anggota masyarakat muslim, serta membina hubungan individu-individu yang menunjukkan agama kharisma yang berdasar pada kepemimpinan moralitas yang beretika muslim (lihat Azyumardi Azra, *Konteks Sosiologi di Indonesia*, 1991: 188).

Pembinaan arsitektur terhadap bentuk dalam bentuk *al-qadim al-kabir* tersebut merupakan tantangan terhadap agensi pengembangan *al-jadid al-kabir*. Hal ini dimungkinkan terjadi sesuai rumusan nilai-nilai kemandirian, masabwa, memantap keantian pesantren untuk selalu menerima perubahan dan mengukulkannya sebagai suatu kemestian yang harus dipatuhi. Melalui itu, pesantren dan masyarakat sekitarnya akan dapat mengetahui seluruhnya secara mendasar akan selalu mengembangkan dirinya melalui upaya tak kenal lelah untuk mendapatkan wawasan dan ilmu yang seluas-luasnya.

Dalam perspektif ini, pendidikan (pengajaran intelektual) berupa disiplin ilmu dan pengembangan metodologi yang telah manusia dan rasul akan menjadi kemestian yang tidak dapat diabaikan untuk ditumbuhkembangkan. Semua itu dilaksanakan bukan karena sekadar cara yang bersifat instrumental, tapi benar benar berangkat dari nilai pesantren yang pada prinsipnya merupakan asasi dan nilai yang mendasar. Oleh karena itu, pengembangan ilmu ilmu yang bersifat umum tidak boleh diletakkan sekadar sebagai pelengkap tanpa makna terhadap ilmu-ilmu yang ah, atau akan menjadi sesuatu yang asing yang harus dihidupkan. Instruksi itu akan diintegrasikan secara periodik dengan ilmu syaria sehingga akan meningkatkan keyakinan manusia tentang realita Tuhan sebagai sumber dan Pencipta segala sesuatu.

Aspek pertumbuhan kerakoran tersebut di atas merupakan *the ultimate goal* yang perlu dicapai oleh pesantren. Sebab penguasaan tentang keberhasilan pesantren sebagai pendididkan alternatif terdapat, salah satunya pada kemampuannya menumbuhkan pembangunan mental/spiritual melalui pemberian ruang yang cukup untuk *embodiment of religious belief* yang diskusikan secara intelektual.¹ Selain itu, juga berperan pada kelulusan pesantren untuk tetap bertahan dengan masyarakat sebagai agen transformasi yang dapat mencerahkan mereka.

Kemampuan pesantren dalam hal tersebut akan mengantarkannya menjadi lembaga yang benar-benar hadir sebagai agen perubahan dalam arti yang sebenar-benarnya, sekaligus sebagai penjaga nilai yang kukuh di tengah proses dehumanisasi yang berlarut dengan kemungkar itu. Artinya, keberhasilan dalam hal tersebut akan membuat pesantren hadir sebagai agen *mainstay* yang memikul daya tawar tinggi di masyarakat. Pada saat yang sama, pesantren dengan nilai-nilai yang dipelagikannya tetap akan mengutamakan *amaliyah* yang diambil dari tapi pasti akan berkembang pada masyarakat luas. Pada suatu kesempatan, kedamaian, dan ketenangan masyarakat akan menjadi

¹ Zamakhsyari Djalil, *Tradition and Change in Indonesian Islamic Education: Jakarta: Office of Religious Research and Development Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia 1995*—hal. 88.

apakah yang begitu saja dalam kehidupan di sini, arti pesantren sebagai pendidikan alternatif masa depan menemukan arti sebenarnya.

Mudah melihat pesantren, dengan segala aspek kerangnya yang dilakukan selama ini menjadi representasi dari upaya dalam kerangka yang disebutkan di atas. dan demikian, maka lembaga pesantren dapat memberikan sumbanguh nyata bagi pengembangan pendidikan alternatif di Indonesia C

PENGEMBANGAN AKHLAK: Pendidikan Pesantren, Kini, dan Masa Depan

Dehumanisasi dalam bentuk krisis moral yang akut telah menjadi bagian yang nyaris melekat dalam kehidupan kontemporer Manusia hingga hidup, me-
rtumam ungkapan Hossein Nasr, dengan sekadar sepoting-moti Manusia telah memotong tirah dan seratahnya sebagai makhluk spiritual dan bernilai. Manusia hanya mengejar kehidupan yang bersifat lahiriah, hawa-hai yang beraturan permukaan, dan me-
mentingkan kemuliaan tanpa substansi. Manusia telah kehilangan hati nurani dan tak mampu menangkap lagi keunikan keartian universal yang ada di dalam diri dan diri agama.

Krisis yang profetik awalnya berkembang pada umat manusia di Juru Perantara yang modern, spiritual

Seyyed Hossein Nasr, *Islam and the Future of Modern Man* (London and New York: Longman, 1975) hal. 12

Sumber Masalah: “Pendidikan” tak Mendidik

Sebagai lembaga pendidikan agama sekaligus hagian komunitas dunia yang menjunjung nilai-nilai moral keagamaan, pesantren dituntut pula menivikasi realitas kehidupan sebagai persoalan kemanusiaan. Dari bahasa lain, pesantren dimuntut untuk mencari solusi tepat, sempurna, dan berjangkauan luas ke depan sehingga diharapkan bisa memecahkan problem tertentu.

Salah satu penyelesaian menawarkan menurut para elit pesantren untuk mencari akar permasalahan yang mendasar, sehingga dapat mengungkap proses keburukan yang mungkin berada hipotetis: apakah ada dan akar permasalahan adalah kekurangmampuan atau keghesitan dalam mendiskusikan dan pesantren dalam merumuskan alternatif kehidupan yang diada. Karena serta merta tidak dapat berurusan dengan hal-hal yang akan membawa makna atau masih mengaitkan tradisi atau penyimpangan dan atau nilai keagamaan itu sendiri.

Salah satu pesantren, ulama dan agama selaku bekalnya sebagai nilai tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan. Untuk itulah merupakan bagian dari proses pendidikan Islam karena itu, proses pada benar mengajar keutamaan dalam memahami nilai dan orientasi keperibadian yang, pada dasarnya merupakan penanaman nilai-nilai, pengembangan akap, serta perjuangan pada

pendaku yang sesuai moral agung yang selalu disampaikan Rasulullah. Dalam ungkapan lebih umum, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.

Di atas kertas, paradigma (pandangan dasar) semacam itu memang sudah menjadi keyakinan dan ketetapan dasar pendidikan secara umum dan nasional secara khusus. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana cara membumikan keyakinan di atas pada lapisan konkret. Sebab dalam realitasnya, pendidikan masih berkembang dalam ranah pragmatis sehingga kemampuan kreatif, efektif, dan kreatif sebagai nilai dan kepribadian belum dapat berkembang maksimal. Sebagai dampaknya, tujuan pendidikan menjadi sulit untuk direalisasikan dalam alam kenyataan.

Hali itu masih diperkuat lagi dengan sikap lembaga pendidikan terhadap disiplin ilmu ilmu yang diujarkannya. Pada satu sisi pendidik agama yang diharapkan dalam lembaga pendidikan Nasional terdapat sekitar bersin akhlak yang kurang diperhatikan kepada pemeluk bukan sikap dan perilaku yang bermoral. Pada sisi lain dalam dunia penelitian, melalui sistem pendidikan nasional yang dikenalinya, ilmu agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum terkesan hanya dipertama dengan setengah hati. Ilmu tersebut dihadirkan sekadar sebagai pelengkap yang seakan-akan tidak memiliki signifikansi dalam pencapaian tujuan pendidikan yang substansial. Lebih

lain lagi, ilmu-ilmu yang dianggap sekular itu tidak diletakkan di dalam kerangka nilai-nilai keislaman. Padahal, dalam perspektif Islam, semua ilmu memiliki nilai-nilai yang agung. Oleh karena itu, seharusnya perlu dikembangkan kerangka tujuan pendidikan yang substantif.

Dalam kondisi seperti itu, pengajaran menjadi benar benar bernilai pengajaran semata dan kering dari muatan kekayaan spiritualitas dan nilai-nilai moral yang hakiki. Inilah suatu proses yang benar-benar akan menghasilkan kekosongan batin. Akibatnya, perhatian pada pendidikan, seperti kapabilitas, keahlian, kompetensi, menjadi harapan-haru yang mencecahkan. Meskipun demikian, haru perlu dihindari jangan sampai kekhawatiran semacam itu hanya berakhir kelamahan yang diwujudkan pada tingkatan penguasaan, tapi haru berani berdasarkan kekecewaan kita tentang pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, setiap orang yang peduli terhadap pendidikan semua elemen yang terkandung, kekafan dan kemaduan mencari nilai yang benar benar mencerahkan.

Al-Ghazali, al-Risalah al-Laduniyyah dalam *Maqalat al-Risalah al-Imam al-Ghazali al-Ghazali al-Muqaddim* (Mawid; al-Amin al-Risalah al-Laduniyyah, Fushat al-Fushat: Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 90.

Ilmu dan Pendidikan dalam Perspektif Islam

Ilmu pengetahuan menempati posisi signifikan dalam Islam. Melalui ilmu pengetahuan, manusia dibedakan dengan makhluk makhluk lain, termasuk malaikat. Allah karena itu, mencipta Adam, Ia secara dermawan memberikannya dengan pengetahuan.

Dalam surat al-Baqarah (2: 31) Allah berfirman: *وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا* Dalam pandangan ulama, kata *al-asmā* dalam ayat ini menunjuk kepada semua nama yang berkaitan dengan ketuhanan dan yang berkaitan dengan makhluk. Ya sebagaimana pula menunjuk kepada bentuk-bentuk dan sifat-sifat (halo-halo) yang dengan nama-nama itu, Adam dapat memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam bahasa lain, Allah memberikan kemampuan manusia Adam dan keturunannya memberi nama kepada benda-benda berarti sebagai kemampuan manusia menemukan sifat-sifat benda, hubungan timbal balik, dan hukum-hukum tabiatnya.¹ termasuk juga tentang Allah.

¹ Al-Razi, Syekhul-Islam Muhammad bin Ali dan R Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab'u al-Musadhar. Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fur 1978), hlm. 224.

² Fazlur Rahman, The Qur'anic Concept of God, the Universe and Man dalam Islamic Studies Vol. VI (No. 1 1967), hlm. 10-11.

Alhasil, pengetahuan diturunkan Allah sebagai bekal manusia dalam rangka memaknai amanah kekhalifahan, yaitu pemerintahan alam sesuai kemas, seimbang, dan berkeadilan lingkungan, serta penuh keadilan. Pengetahuan akan mengantarkan manusia pada keadilan untuk menjadikan dunia layak huni bagi umat manusia dan makhluk makhluk Allah yang din dan kehidupan yang harus dibangun adalah kehidupan yang penuh kesejahteraan dan kesetiaan yang harus dipertanggungjawabkan manusia kepada Allah di akhirat kelak.

Kendati tersebut menuntut manusia agar bisa menguasai selain ilmu *qur'ani* dan *akbar*, juga aspek yang tidak kalah penting adalah pengamatannya yang utuh dalam bentuk perkembangan moralitas. Melalui penguasaan ilmu dan pengemutannya moral itu, manusia mampu mengetahui bahwa alam secara tepat sehingga dapat memanfaatkan sesuai keinginan sesuai dengan sifat dan kemampuan alam, serta mampu digunakan dan disebarkan untuk diabdikan kepada kepentingan dan keadilan umat manusia.

Terkait dengan itu, metode belajar mengajar yang tepat yang harus diterapkan kepada aktivitas yang bernilai nilai kependidikan yaitu ilmu dan amal sekaligus untuk dikembangkan. Proses tersebut hendaknya merupakan kegiatan pengenalan dan penguasaan tempat tempat yang tepat dan segala sesuatu di dalamnya keteraturan penerimaan yang dapat membimbing ke arah

pengenal dan mengukur *wisad* Tuhan yang tepat dalam tataran *al-akal*. Pada saat yang sama hal itu akan meniadakan *al-bala* mengamalkannya sesuai kebutuhan yang terlayak dalam kesempatan tersebut secara konkret kegiatan yang harus diusahakan proses adaptasi mengajar melibatkan *al-akal* dan kegiatan pokok *al-ta'lim* dan *al-ta'lim* Yang pertama memotivasi usaha yang sungguh sungguh untuk memperoleh pengetahuan melalui pemahaman yang benar sedang yang kedua mencayakan upaya *al-ta'lim* (*al-ta'lim* tentang hakikat ilmu, kegunaan dan tujuannya. Melalui dua kegiatan pokok tersebut, proses belajar mengajar akan menghasilkan *maqom* *maqom* yang dapat memahaminya hakikat ilmu, manfaat dan tujuannya, serta sekaligus mengamalkannya secara kreatif, bertanggung jawab, serta tetap berpijak pada dua nilai moral seperti ketidbalaan, kemamlaan, *al-ta'lim* yang diikutkan dengan turunan kebutuhan yang terus berkembang

Nam nilai moral, nilai yang akan mengantarkan manusia pada *fitrah*nya sebagai *thayyid*, *hayaq* yakni sebagai manusia yang berupaya berperilaku sesuai nilai-nilai Allah dan memartakan misi kerassulan Nabi. Pada akhirnya, hal itu akan menciptakan manusia sebagai

Syed Muhammad al-Hakim al-Adas, Konsep Pendidikan dalam Islam, (Bandung: Alfabeta, 1994), 40-41.

¹ Lihat Sayyid Hossein Nasr, *Ideas and Realities of Islam* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1975), 18.

di tengah-tengah masyarakat. Pengabaian hal itu akan menimbulkan pesantren dengan visi yang sangat nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai penerimaan serta pengembangan nilai dan sikap keagamaan dalam kehidupan, tidak akan pernah mampu melaksanakan misi suci tersebut.

Tradisi yang dirubuh pesantren telah memberikan lembaga ini peluang untuk menciptakan beragam persoalan kemasyarakatan yang sangat menyengkan tersebut. Tradisi pesantren, seperti keikhlasan, kesederhanaan, ketidakwaan, dan kemandirian adalah aset / kekayaan moral yang dapat dijadikan dasar dalam pendidikan untuk menghentikan proses penghancuran manusia yang pada intinya berawal dari kemandirian pendidikan dewasa ini. Tradisi tersebut perlu dirumuskan dalam suatu pola pendidikan sistematis yang dapat diinovasi, direaktualisasikan dengan hidup kekinian.

Berdasarkan pemikiran tersebut, keikhlasan perlu diarahkan kepada pertumbuhan tentang upaya sungguh-sungguh pada pencapaian kualitas, pengembangan wawasan, dan keteguhan dalam menghadapi persoalan kemandirian dengan sebagai ketidaktergantungan pada atribut-atribut artifisial, formalitas, dan bersifat permukaan, sehingga keteguhan mencapai sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Demikian pula, kesederhanaan perlu dirumuskan sebagai sumber efisiensi untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak berguna.

Perumusan nilai-nilai tradisi pesantren tersebut dalam keseluruhan proses pendidikan diharapkan dapat mendorong mahasiswa universitas yang berkeaja untuk Pada umumnya hasil tersebut diharapkan akan menumbuhkan semangat untuk mengembangkan karya-karya baru yang lebih baik dengan demikian paradigma pesantren dapat menghasilkan nilai-nilai yang masih relevan saat menghadapi perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu akan berakibat jika nilai pendidikan pesantren

[illegible][illegible]

akut agama dalam rangka perencanaan kerangka kehidupan yang erat format. Lebih jauh dari itu, semua juga perlu mengembangkan pendekatan keterlibatan komunitas dalam upaya meningkatkan kualitas manusia untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan.¹ Semua argumen tersebut perlu diuraikan dalam kerangka nilai-nilai dan tradisi pesantren. Dengan demikian, rumusan pendidikan yang akan muncul adalah suatu pendidikan yang mengupayakan ketertarikan pesantren dan sebagai respons terhadap persoalan yang berkembang.

Kegeusan untuk selalu berbenah diri dan ditindaklanjuti pertumuhan langkah sistematis dalam rangka pengembangan keilmuan dan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai mengansarkan STK.² sebagai lembaga akademik alternatif yang bernilai plus. Sebaliknya, jika lembaga ini merasa puas dalam bayang-bayang sendiri, maka masyarakat tidak akan menolanya, dan di saat itu tanggung jawab dan ketahanan lembaga Terakur akan masuk dalam pesantren Annuqayah dan STK A akan mampu melakukan semua pembenahan tersebut sebagai C.

¹ Lihat Abdurrahman Wahid, *Proses Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia* (Jember: Abdurrahman Wahid, Museum di Tengah Perguruan), Jakarta: LEMPEK, 1997, hlm. 34-35.

SIGNIFIKANSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DEMOKRATIS DALAM KONTEKS KEKINIAN: Mengangkat Peran Pesantren dalam Pengembangan *Civil Society**

Ada satu anggapan yang menarik bahwa salah satu penyebab merembesnya kekerasan di Indonesia sejak pemilu terakhir disebabkan oleh melemahnya ketahanan *new order* yang saat di negeri ini, khususnya setelah mengantarkan negara pada peran yang sangat hegemonik dan masa tertandingi. Negara, seperti diungkap Fukui, menjadi sangat burokratis dan memulus pengaruh luas serta menggerak masyarakat ke hadir sebagai satu satunya pemerintah sebagai kebijakan yang tidak dapat dibantah dan diurus. Sedangkan masyarakat sekadar menjadi pelengkap yang hanya ber-

Dipaparkan dalam Pertemuan Forum Pesantren tanggal 20-27 Desember di Yogyakarta

Muhammad AS Hikam, *Kemerdekaan Negara Islam dan Budaya Politik dalam Ideologisasi Pembangunan di Indonesia* dalam Ahmad Saefudin, ed., *Kemerdekaan dalam Perspektif Pesantren* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 118.

hak menyetujui segala sesuatu yang telah ditentukan negara.

Dari sebuah negara integralistik yang tidak Jumbangk. Ich kekuasaan ini akan semacam itu, negara dapat bertumbuh sesuai hui dan berbuat apa apa dalam rangka mengamalkan ketertarikan dan proyek proyek yang dilaksanakannya. Akibatnya, kekerasan negara, struktur maupun non struktural, menjadi fenomena yang dapat ditemui di mana mana. Kekerasan itu akan tidak terhentikan ketika ideologi developmentalisme yang diumui negara memang berbasar akan apa dengan kekerasan.

Masyarakat dalam ketidakberdayaannya hanya mampu menanggung semua beban itu dalam suatu ketesahan yang kian lama tampak memampuk. Ketika negara kehilangan kekuatan akibat krisis moneter yang menderapnya, 'bum waktu' itu meledak dalam bentuk anarisme massa, brutalisme, pengrusakan, kekerasan, dan lain sebagainya. Negara benar benar lumpuh, dan bangsa Indonesia terlempar ke dalam lumpur kemadatan. Tragedi yang terjadi sejak tahun-tahun terakhir abad yang lalu itu masih terus berlangsung sampai saat ini.

Untuk mengat... perubahan yang signifikan dalam... kembang... pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diadiklan salah satu pilihan solusi. Dalam bahasa yang lebih gamblang,

pengembangan *civil society* merupakan kondisi masyarakat yang perlu ditumbuhkan secara kukuh di negeri ini, dan pesannya sebagaimana akan dijelaskan memiliki makna yang cukup mendalam dalam mewujudkan masyarakat semacam itu.

Civil Society di Indonesia

Konsep *civil society* di Indonesia merupakan sesuatu yang relatif baru. Indonesia, menurut Hikam, tidak memiliki warisan historis dan epistemologis perlu dibangun wilayah negara dan masyarakat. Selama periode pertama kerajaan dan kesultanan, negara dan masyarakat merupakan entitas tunggal sehingga masyarakat merupakan elemen yang membentuk negara. Adanya semacam pemisahan antara negara, di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, baru terjadi setelah Indonesia mengalami kolonisasi, di mana aparat kolonial bekerja untuk kepentingan negara yang ditempatkan di luar masyarakat. Oleh karena itu, konsep *civil society* hanya relevan bagi struktur politik modern yang mengahubungkan kolonialisasi.

Secara konseptual, wacana tentang *civil society* di Indonesia bermula dari konferensi yang diadakan

Muhammad AS Hujun, "Memahami Intelektual tentang Civil Society di Indonesia," dalam Jurnal Paramadina, Volume Nomor 2 (1999) hlm. 40.

diel Wintash University pada 25-27 November 1988 yang mengangkat tema tentang *State and Civil Society in Contemporary Indonesia*. Hasil konferensi itu kemudian diterbitkan sebuah buku dengan judul *State and Civil Society in Indonesia* yang disunting oleh Anief Arsyadin dan sebuah surat kabar intelektual Indonesia yang sampai kini memuatnya Indonesia dan ikut dalam kegiatan seminar tersebut. Publikasi ini dianggap buku pertama yang mengangkat secara eksplisit konsep *civil society* di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa waktu 1991 di Indonesia masih relatif baru, dan muncul dari kalangan intelektual dan akademisi.

Sejak itu, konsep tersebut kian berkembang di negeri ini melalui penerbitan, seminar, dan kegiatan lain yang sejenis. Perkembangannya kian menunjukkan minornya ketika lembaga donor Internasional, JMI, dan kaum intelektual ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. Patut diingat di sini tentang perubahan Nurhabib Mahfud dalam memperlakukan istilah masyarakat madani sebagai terminologi untuk istilah *civil society* yang awalnya diperkenalkan Anwar Ibrahim. Pada akhirnya, Anwar Ibrahim, melalui karyanya, *Democracy and Civil Society* dan *The Future of Indonesia*, juga memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pemertamaannya yang memengaruhi

Mondro Priatyo et al. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Gramedia 2002. hlm. 79.

serta memiliki posisi penting dalam perkembangan diskursus *new order* dalam dunia intelektual Indonesia. Konsep *new order* menjadi penting untuk dikembangkan karena, dalam pandangan mereka, model masyarakat tersebut merupakan salah satu tanggapan penting bagi proses demokratisasi. Sebaliknya, mereka berpendapat yang demokratis kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan akan berwujud masyarakat yang pada gilirannya akan melahirkan kehidupan yang damai, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Walaupun *new order* itu bukan hanya terdistribusi pada kalangan intelektual Muslim saja. Bahkan suara-suara para intelektual di luar kalangan Islam, seperti Kartono, Samia Kurniawati, dan lain-lain yang pertumbuhannya *new order* Mughniyati, *new order* Musallam, menyatakan bahwa *new order* yang *new order* dan *independent* merupakan dasar penting bagi *demokrasi* di Indonesia.

Setelah itu, mengemukakan bahwa pengakuan *new order* merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam konteks Indonesia. Sejarah Ulin Baru membuktikan dengan jelas bahwa kehidupan masyarakat seperti itu telah memiliki *new order* yang terdistribusi, *new order* negara, dan *new order* masyarakatnya melalui cara dan *new order*.

¹ Ulin ibid. no. 79-82

Mughniyati AS. *New Order: Pancasila, Intellectuals, and the Civil Society in Indonesia*. no. 45

yang harus kita sampaikan mereka dan kehidupan yang kita citakan.⁴ Oleh karena itu, perkembangan wacana *new wave* yang begitu pesat ini sejak akhir rezim Orde Baru adalah sesuatu yang sangat lumrah dan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Sungguhpun demikian, bukalah berarti *new wave* telah menandai secara luas di negeri ini. Selain masih terbatas di lingkungan intelektual, akademis, aktivis LSM, dan sejumlah organisasi keagamaan, konsep tersebut cenderung dipahami sebagai paham yang selingkuh substansi dan sejarahnya di Barat, juga cara implementasinya dalam kehidupan konkret belum menemukan kejelasan yang cukup berarti. Akibatnya, wacana yang selama ini berkembang belum memiliki signifikansi yang cukup untuk dalam menyuarakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau nilai-nilai *new wave*. Demikian pula proses masyarakat *new wave* negeri ini masih sangat lemah.

Dengan demikian runtuhnya Orde Baru dan munculnya era reformasi masih merupakan sejumlah pertanyaan besar bagi masa depan Indonesia. Berbagi kemungkinan terburuk lebih untuk terpadat Indonesia Demokratis atau masa depan despotik dan tirani satwa. Yang memiliki peluang untuk berkembang. Secara resmi tergantung kepada siapa dan langkah langkah strategis

⁴ Hengky Prasetyo et al. *Islam dan Civil Society*. Hal. 280-281.

yang diambil masyarakat. Untuk pola kehidupan yang damai dan sejenak merupakan idaman setiap individu dan masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prasyarat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Mengungkap Peran Pesantren

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat dalam konteks Indonesia, maka kehadiran pesantren menjadi suatu keniscayaan untuk dibahas. Sebab pesantren, sejak kemunculannya, memang tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat. Berbagai anggapan atau rumus dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Pesantren didirikan dengan tujuan membentuk masyarakat yang baik masyarakat daerah setempat. Pesantren hadir memperbedakan dirinya menggemakan ukhwal-humam dalam pengemban tugas mengembangkan masyarakat sesuai nilai-nilai keagamaan dan pada umumnya didukung secara penuh oleh mereka.

Aspek lain signifikansi penelitian pesantren dalam pemberdayaan masyarakat berpulang pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada umumnya menetap di

Tejeh Abdullah Islam dan Masyarakat Perumahan Sejahtera Indonesia Cetakan I, Jakarta LPJES 1987, hal. 52

Pada dasarnya tujuan utama pesantren adalah untuk meningkatkan kualitas masyarakat urban lainnya yang

daerah pedesaan.⁴ Pada sisi itu, pesantren yang memang berkembang dan tersebar di daerah-daerah pedesaan, sampai derajat tertentu, merupakan representasi dari masyarakat muslim daerah-daerah pedesaan. Meskipun pada umumnya merupakan umum atau hasil dubliran dari pesantren. Kenyataan itu memuat pesantren sampai saat ini masih berpengaruh kuat pada hampir seluruh aspek kehidupan di kalangan masyarakat muslim pedesaan yang saat ini. Oleh karena itu, perlu ditekankan di sini bahwa setiap pengembangan pendidikan dan interpretasi keagamaan yang berasal dari luar kaum elit pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan masyarakat keagamaan tidak akan mampu mencapai signifikan terhadap masyarakat dan kaum masyarakat muslim di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemertayaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat daerah butuh pengembangan pendidikan muslim harus melibatkan pesantren.

dan 35 dari 11 dari Zamanahyan Dhuhi. *Tradition and Change in Indonesian Islamic Education: A Study of the Development and Management of Pesantren*. Jakarta: UIN Ar-Raniry, 1994. hal. 124. Oleh karena itu, upaya ini akan untuk mengembangkan Indonesia bisa bisa membangun masyarakat pedesaan.

Disamping itu, beberapa hal sebagai figur yang sangat dihidupkan dan dihidupkan oleh masyarakat Islam di daerah pedesaan muslim harus dihidupkan dan dihidupkan oleh pemerintah melalui pusat dan perantara yang sangat sentral.

5. Hidayatullah, *Education and the Role of Islam in Indonesia: dalam M. Hidayatullah & M. Hidayatullah eds. The Impact of Religion in Education and Community Development in Indonesia*. Jakarta: PUS 1981. hal. 83.

Secara struktural, pesantren sebenarnya telah menggariskan aspek-aspek tertentu dan nilai-nilai yang ada pada *the society* berakawa berdirinya lembaga keagamaan dan sosial ini sangat menekankan kepada moralitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, kesederhanaan dan ketekunannya. Kemandirian dan mandiri yang diartikan penerbitan dan ditekankan kepada para santri ini merupakan model utama dalam mengembangkan para santri dan masyarakat sekitar menuju pembentukan masyarakat yang diunggulkan.

Karakteristik semacam itu telah mengantarkan pesantren kepada eksistensinya yang unik sebagai subkultur dengan *alternative way of life*.¹ Hal ini tentunya menghasilkan jiwa mengunggulkan daya penerbitan. Pesantren dengan kemandiriannya, misalnya, mesti perlihatkan bahwa pada dasarnya keberpihakan sepihak dan berada di luar bawahan negara sehingga secara potensial memulau proses daya terwar cukup tinggi. *the state*. Negara Pada prinsipnya seperti itu, penerbitan secara subkultural merupakan agen *the society* yang sejati.

¹ Lihat Abdurrahman Wahid, *Pengadilan Negara Agama dan Ke-Budayaan Cendekia* (Jakarta: Desember 2001) hlm. 125.

² Ditatakan demikian karena dalam pandangan Gramsci, masyarakat sipil mencakup dua yang diukur organisasi-organisasi swasta (private) seperti gereja, badan usaha, agama, politik, dagang, seni dan sebagainya. Lihat Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Paulo Gramsci* (Cetakan: Yogyakarta: IKS:ST - Pustaka Perair, 1999) hlm. 102. Organisasi swasta diadopsi civil society karena tidak berkecukupan negara mandiri dan kekuasaan negara.

Sarungnya, pesantren belum sepenuhnya mampu menanamkan etika kreatif nilai baru tersebut ke dalam konteks ketantra. Kenyataan menunjukkan, masyarakat Islam, terutama termasuk komunitas pesantren, menurut Abdurrahman Wahid, masih tertinggal dalam mentransformasikan dirinya sebagai agen pemberdayaan *new wave* Indonesia, khususnya dalam mengartikulasikan dan mempertahankan kepentingan masyarakat dalam rangka berhadapan dengan negara.¹ Misalnya saja, nilai nilai ketantrahan yang diwaris pesantren masih ketid menampakan aspeknya yang beretika individu, atau sangat lokal dan belum menjadi sikap umum kemasyarakatan yang transformasi.

Perjalan itu masih ditambah dengan pemakaian sebagian pesantren terhadap pengabdian dan pengembangan masyarakat yang masih terkesan pasif, dan nilai dikekalkan pada aspek pengembangan ke dalam keragaman baru. Meskipun pesantren sejak berdirinya memiliki watak pelayanan dan pengabdian masyarakat, atau dalam ungkapan lain, mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat, tetapi telah menunjukkan tidak semua pesantren menanamkan konsep tersebut ke dalam pengemban holistic yang berdimensi ilmu dan amal selain itu, dan ini amal

¹ Muhammad A.S. Mham, *Wacana intelektual tentang Civil Society di Indonesia* (Jember: Jember 03).

disavangkan, ada pesantren yang menerapkan konsep tersebut hanya di wilayah pinggiran dan disamping sekolah petangkip yang kurang bernilai.

Sebagai konsekuensi, pemberdayaan masyarakat di kalangan pesantren belum disertai secara kreatif dan serius dalam bentuk penyatuan yang integral dan ekspansi ke dalam keseluruhan yang dikembangkan pesantren. Tradisi itu tidak cukup dalam dirinya sendiri untuk memetamorfosis sebagai nilai nilai *universal* yang berkeadaban, universal, dan berorientasi jauh ke depan.

Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dasar di atas menyimpulkan bahwa pesantren selatinya memiliki potensi cukup penting dalam rangka mengembangkan *self-help* masyarakat, seperti itu, lembaga tersebut, seperti lembaga kemasyarakatan di lingkungan, masih terbelak beberapa petemuan dasar yang bisa mengahmbat usaha mengaktualisasikan peran sosial tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, pesantren dituntut untuk melakukan suatu strategi yang dapat mengoptimalkan potensi potensi yang dimilikinya khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian itu, nilai nilai dasar yang menjadi anutan pesantren selatinya itu perlu dalam

relativisasikan dengan kondisi kekinian. Dengan antara tradisi dan modernitas perlu dilakukan untuk mempertahankan *the way* dalam konteks Indonesia.⁴ Untuk itu, nilai semacam kemandirian dan keterbukaan sebagai nilai dan tradisi pesantren yang menyempah perlu dipertahankan ke dalam konsep yang lebih universal, sekaligus kontekstual sehingga sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas yang pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai dasar perkembangan *the society*.

Sejalan dengan itu, nilai-nilai masyarakat dalam universitas, seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial, yang secara implisit sudah ada untuk diterapkan pada nilai dan nilai pesantren perlu digali kembali dan dikembangkan secara kreatif dan orisinal dari khazanah kearifan pesantren yang begitu kaya. Selain pada dasarnya *the society* adalah masyarakat etika atau *ethic society* sebuah masyarakat yang mandiri dan sekaligus mengedepankan kreatifitas dalam seluruh dimensi kehidupan yang dijalatinya. Ia mampu menanggapi secara kritis fenomena yang berkembang di sekitarnya, sekaligus tetap berpijak pada etika universal, dan juga kragamaan substantifnya.

Kemampuan melakukan formulasi ini akan dapat mengantarkan pada ketasamaan bagi pesantren untuk

⁴ Ibid. hlm. 41

⁵ Lihat Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Foucault* Gramedia hlm. 103

melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang hakiki. Dalam ungkapan lain, *inner security* akan menjadi pilihan teologis yang kuat sehingga pesantren beserta semua elemen di dalamnya akan terlihat secara aktif untuk membumihkan nilai-nilai tersebut ke dalam masyarakat luas, tanpa harus meninggalkan kewaspahan utamanya sebagai lembaga pendidikan agama.

Pada akhirnya, perintah *awamun* di atas bukannya terduga yang kuat akan menyentarkan pesantren untuk meruntuhkan ulang kurikulum kependidikan yang dicadangkan Kementerian atau kementerian pengembangan masyarakat praktis dan semaksimalnya yang selama puluhan tahun terintegrasi secara utuh atau terdistribusikan ke dalam kurikulum pesantren yang dilekatkan secara intrinsik ke dalamnya. *Tauhid* yang akan dihayati nabi dengan *tauhid ahlulbait* dan *rahmatullah* sehingga kedua unsur tersebut akan terintegrasi secara integral dan mutlak dalam dunia pesantren.

Menjadi upaya strategis yang ditindaklanjuti apakah untuk operasional masyarakat demokratis yang kuat, plural, dan berkeadilan diharapkan segera memunculkan *awamun* yang lebih nyata. Dampaknya akan wujud di atas di dalamnya kehidupan yang utuh, tenang, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga...

PESANTREN ANNUGAYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT¹

Sumenep, daerah tempat pesantren Annugayah berada, merupakan daerah yang tidak pernah terbelah oleh keberagaman rasial. Sejak pesantren itu didirikan, yaitu pada 84 sampai saat ini, wilayah itu tidak pernah mengalami gesekan atau keteguhan antara kelompok-kelompok yang cukup berat.

Kondisi semacam itu, sampai derajat tertentu, tidak bisa diabaikan dari peran Annugayah yang memiliki pengaruh cukup besar di Sumenep dan daerah-daerah lain di Jawa Timur bagian timur dalam mengembangkan pola keberagaman masyarakat. Dalam konteks ini, pola keberagaman yang dijabarkan Annugayah menjadi ungkapan untuk diangkat ke permukaan dan dibahas secara kritis.

Tulisan ini mencoba mendiskusikan sekitar nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan pesantren, yaitu men-

¹ Disampaikan dalam Seminar "Pewarisan dan Radikalisme Agama Islam Keluarga Pesantren Palangka Raya (IKPP)" pada 26 Maret 2003.

bermakna nilai-nilai itu dalam kehidupan, dan dampak positif dalam kehidupan komuter. Selain itu, langkah-langkah strategis keakupan tersebut pada untuk ditawarkan. Semua yang diangkat dalam bahasan ini tidak dapat diabaikan sebagai representasi dari suara Annuqayah. Tapi masih disertai refleksi dan penglihatan dari kacamata ketajaman seorang alumni Annuqayah.

Nilai dan Tradisi Annuqayah

Nilai-nilai keagamaan yang dianut pesantren yang dihasilkan oleh H. M. H. Syarifuddin dan tradisi yang berkembangnya tidaklah dapat dipisahkan dari pendidikan pesantren ini dengan nama di Annuqayah adalah nama yang menunjuk kepada salah satu kitab karya Imam al-Ghazali. Dalam perspektif pesantren Annuqayah, signifikansi karya tersebut selain terdapat pada keberadaannya sebagai karya ulama sebelumnya. Al-Ustadz wal Ima'ah, karangan tersebut merupakan kitab-ontologi yang membahas tentang disiplin-disiplin ilmu yang mencakup sampai empat belas ragam keilmuan, dari yang bernilai keagamaan hingga sampai ilmu pengetahuan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan syariat.

Lihat al-Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman dan Abu Bakr Ahmad al-Dawlati, *Qur'an al-Nuqayah al-Jami'ah* & *Arba' al-Asyara* dan 'Syubhayr Ma'rifah wa Ma'rifah al-Ghazali dan Nashr al-Nabhan, *ibid.* hlm. 3.

Pernamaan itu menunjukkan bahwa penganut Annuqayah dalam satu keberagaman menganut Ahlulsunnah wal Jama'ah dengan sepanciah nilai nilai yang terdapat di dalamnya, seperti *tasawuf*, *tasu-sufi*, *ta-dawir*, dan *tasawuf*. Selain itu, sebagaimana karya al-Sayyidhi ini tidak mengenal perbedaan antara ilmu keagamaan murni dan ilmu-ilmu yang lain. Annuqayah juga tidak memperistimangkan antara disiplin keilmuan agama dan disiplin keilmuan yang bersifat *ingiyah* dan humanis. Demikian pula, lembaga keagamaan ini tidak memisahkan antara pendidikan untuk santri dan pendidikan untuk masyarakat luas.

Pengambilan al-Sayyidhi sebagai salah satu tokoh tujuan Annuqayah dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama yang diambil lembaga keagamaan tersebut. Meskipun al-Sayyidhi menganut mazhab Syafi'i tapi karya-karyanya menunjukkan bahwa kemadaniannya adalah kemadanihan kreatif dan kritis. Dalam beberapa hal, ia berbeda dengan pendapat al-Sya— Bahkan ia menyatakan bahwa *jihād* merupakan betung metafisik yang harus selalu memurnikan separuh umat Islam dalam segala zaman. Kemadanihan yang kritis inilah yang pada gilirannya mengantarkan Annuqayah selaku 'berjihād' dalam mengemulakan kuprah dan peneluhannya. Misalnya, Annuqayah ber-

1. Lihat al-Sayyidhi, *Jawabduh Ash-Shar'iyah* dan Abu Bakr Tayyib al-Jarad, *Al-Mawdu'at* (Maktabah al-Taqyiah 1987) jilid 55.

upaya menetapkan *da'wah bi al aqami* yang berbentuk pengajaran dan pola-pola yang teratur dan *da'wah bi al-bai* sebagai bentuk kerja konkret dalam satu kerangka pandangan dan tindakan yang terintegrasi secara sistematis dan saling interdependensi.

Selanjutnya, lembaga keagamaan yang terletak di Madura bagian timur itu ternyata tak memiliki perbedaan mendasar dengan pesantren-pesantren "tradisional" yang lain. Menurut Anwar, ada tidak masuk dan berakhlak dengan tarekat tertentu, tapi nilai-nilai rasuluf, semisal *rukun iman*, *rukun islam*, *shahadah*, *ikhlas*, dan *ibadah*, merupakan nilai-nilai yang dijadikan dasar sikap dan perilaku keagamaan dan seluruh kegiatan pesantren. Nilai-nilai tersebut akhirnya membentuk pola fondamen pesantren yang melihat seluruh kehidupan sebagai ibadah.¹ Sebagai ibadah, semua kegiatan pesantren dilihat sebagai suatu proses yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai sehingga diharapkan akan mendapat pahala yang sebaik-baiknya dari Allah. Dalam konteks itu, tujuan yang akan dicapai bukan sekadar prestise, tapi ibadah.

¹ Lihat Zaidin Hidayat, *Profil Pesantren: Studi tentang Pendidikan Islam Kyai Cendekia Perancis* (Jakarta: PTJES, 1987), hlm. 188.

² Bachjar Effendi, *Kelembagaan Santri dalam Etika Islam Rukun Islam* (ed. Perguruan Darul Pesantren Al-Madaniyyah dan Baitul Cendekia Perancis) (Jakarta: PTJES, 1985), hlm. 49.

ditekankan kepada kegiatan substansial dan berkelanjutan.

Aeschuruhn tidak bisa tersebut dalam realitasnya telah mampu mengantarkan pesantren dalam upaya mengembangkan pola keberagamaan santo yang kental dengan nuansa etika moral keragaman yang penuh modernisasi sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang menentang kedasman bodup dan sekerunya, serta relatif jauh dari tindakan yang mengedepankan kekerasan dan semabriva. Pada gilirannya, karena kedudukan pesantren dengan masyarakat hal itu dapat mempengaruhi keberagamaan masyarakat luas yang memiliki hubungan, langung atau tidak, dengan pesantren Annuqayah. Semua itu merupakan merulenan dari keberagamaan komunitas Annuqayah yang meyakini bahwa Islam dengan Muhammad sebagai pemimpin sudah adalah sebagai rahmat yang sebesar-besarnya bagi seluruh penghuni alam semesta.

Kuprah Annuqayah

Ketika pendok Annuqayah hendak didirikan, masyarakat Guluk Guluk dan masyarakat Madura secara umum sedang dianda kritis identitas budaya yang berlatarbelakng sejak Belanda masuk ke wilayah itu. Nilai dan pola kehidupan masyarakat religius telah diklas secara sangat sistematis oleh kolonialisme sehingga

menumbuhkan kedakpastan, kedakharmonisan hubungan antar dari masyarakat mana. Kemudian dalam inskripsi mendekatkan diri, Madura dengan watak yang akan ke dalam kehidupan yang ada keberasan anak suatu perkotaan masyarakat antar per strategis yang bertujuan saling melindungi lalu menjadi tradisi yang meluas di hampir semua masyarakat Madura," termasuk masyarakat Gubuk Gubuk saat itu.

Dalam kerangka semangat ini, KJI Madihyangwa datang ke Jawa Timur Gubuk Gubuk dengan harapan menangkap Tawik Madihyangwa untuk mengadakan transformasi sosial. Sama dengan seratus persen ben dan. Antusiasah membetulkan waktu kapan datang ke belum masyarakat setempat menerima kehadiran. Bahkan pada awalnya, pendiri Antusiasah mendapat tantangan cukup serius dari kalangan besar warga masyarakat. Akan tetapi, berkat ketulusan, ketekunan, dan toleransi yang ditunjukkan pendirinya, serta masyarakat mulai memadan kelemahan dan kekurangan pola kehidupan yang selama ini mereka puni akhirnya mereka lambat laun menerima pola kehidupan yang ditawarkan oleh KJI Madihyangwa.

Lihat Ben Effendy, *Antusiasah Gubuk Transformasi Sosial di Madura Selatan* (Jakarta: PIR, 1995), hlm. 8.

⁶ Lihat ibid. hlm. 31.

Lihat Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Peranan Sejarah Indonesia Cagasan* (Jakarta: UIPEX, 1981), hlm. 157.

Penemuan itu pada gilirannya menjadikan kaw sebagai ideologi, sebagai pandangan yang dianggap mampu menjawab semua permasalahan yang dihadapi masyarakat," sehingga dijadikan "ideologi panutan yang memiliki dimensi cukup tinggi di kalangan warga. Hal itu mengakibatkan masyarakat, seperti juga pesantren dan pesantren lain, memiliki pengaruh cukup besar dalam kehidupan masyarakat yang dapat dibayar dan diterima mereka yang waras atau terhadap kaw dan pesantren.

Kepemimpinan masyarakat tersebut menjadi modal dasar bagi Amuqayah untuk melakukan transformasi masyarakat. Keagamaan di tengah tengah masyarakat. Melalui lembaga-lembaga keagamaan yang ada, pada masa itu pada ranah sosial yang ditawarkan Amuqayah bersikap sebagai keagamaan yang dapat bentuk nilai-nilai dan pengajaran dengan, penekanan kepada masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan keagamaan masyarakat yang bersifat sebagai salah satu karakteristik pesantren menjadi tema besar yang dikembangkan kepada kaum dan masyarakat luas. Pada tersebut kampf batas batas tertentu, telah berhasil

* Ben Effendi Amuqayah *Gerak Transformasi Sosial di Medan* tahun 8.

* Dalam arti sederhana high-sufistik merupakan esensi pesantren utama yang mengembangkan buku-buku esensial dalam bentuk gabungan high dengan amal-amal sharia untuk jemaahnya. Hal Abdulrahman Wahid. Analisis Tradisi Keilmuan di Pesantren dalam *Jurnal Pesantren* (No Perdana 1984 Oktober-Desember), hlm 7-8.

mengantarkan masyarakat pada pola kehidupan yang lebih mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang substantif. Masyarakat mulai akrab dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat agama serta mulai mengenal nilai-nilai moralitas yang perlu dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka.

Sayang, pendekatan semacam itu, disadari atau tidak, ternyata kurang berhasil untuk membudayakan moralitas dan menjadikannya sebagai anutan yang melekat secara utuh dan integral dalam keberagamaan masyarakat. Tidak kebetulan, justru bentuk carak dan secerunya masih mewarnai kehidupan mereka. Salah satu kendalanya berpusat pada keterbelakangan ekonomi masyarakat yang di akhir dasawarsa hujah puluhan abad yang lalu, pendapatan rata-rata perkapita penduduk antara 340–346 kg beras yang dulu setara dengan Rp 75.000–105.000⁴ pertahun, suatu pendapatan yang menurut hukum dikategorikan di bawah garis cukup dan masih tergolong miskin. Demikianlah, kemiskinan telah mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang sangat dekat dengan kekecewaan, atau keputusasaan sehingga mereka menjadi sangat peka, mudah tersinggung, dan gampang terpicu untuk terlibat konflik.

⁴ Eban Effendi, *Amalgamasi Kelas Transformatif Sosial di Minangkabam*, 45.

Ketika saat ini masih dirangsang lagi dengan perkembangan yang sangat pesat pemerintah saat ini telah mengambatkan dipenggitkannya masalah masalah dasar pembangunan. Yang harus kita bangun dan pertumbuhan ekonomi, seperti hal yang dianggap penting yang akan meningkatkan mutu pembangunan. Keberhasilan negara dan menjadi salah satu unsur penting dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan. Demikian negara terhadap etika nilai Nasional, melalui pembinaan manusia, dan pemerintahan dalam segala aspek kehidupan ini, akan merupakan fenomena Indonesia saat ini. Akibatnya, masyarakat tercampak dalam kehidupan ini ke kehidupan ini, terbelah atas dengan kekerasan dan tindakan brutal.

Pesantren Anjurah tentu menyalah bahwa untuk menambatkan dan menghidupkan kesadaran kebagi semua masyarakat *di seluruh Indonesia* yang telah dilaksanakan perlu dalam rangka dan mengintegrasikan ke dalam *di seluruh Indonesia*. Dalam kehidupan ini nilai nilai keragaman tentang kehidupan, keberagaman dan sebagainya yang semuanya itu diperkenalkan melalui pengajaran perlu dilaksanakan dalam

Muhammad AS Ham "Kesetiaan Negara, Umat dan Budaya Politik dalam Ideologi Pancasila, *Harapan & Indonesia* dalam Ahmad Saadaty ed. *Keterasan dalam Perspektif Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia 2000, hlm. 170)

mawarakat melalui kerja kerja konkret. Kesejahteraan yang diartikan mawarakat tidak bisa akan membuat akar akar kekerasan jadi rapuh dan tidak dapat berkembang baik dalam kehidupan beradaban ini yang kemudian dijangkau teknologi yang substansial dan modikotomik mengantarkan pesantren ini mengembangkan pola pertumbuhan baru dalam menyebarkan keberagaman dalam bentuk kegiatan yang lebih kontekstual dan lebih bernilai transformasi.

[illegible]

asin dan mengumbui air dari sumber kecil sejauh dua kilometer.²

Sejak itu, Annugerah, melalui Biro Pengabdian Masyarakat BPM, mengembangkan usaha bersama pengrajin tekstil pemberian kredit pupuk dan pemberian cara pembakaran gamping, serta sempat punjam ber-*attanas*³ di kalangan masyarakat luas. Dengan melakukan kerja kerja rintisan itu, lembaga keagamaan tertua di Madura bapang tahun ini lebih berinteraksi sebagai mitra atau pendamping sehingga tidak menaruhkan ketergantungan yang merugikan dari masyarakat pada pesantren. Pesantren lebih berperan sebagai agen perubahan dengan melakukan proses penyiapan kepala masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang mereka alami, dan pada saat yang sama mengembangkan cara penyesuaianya melalui potensi dan kemampuan yang mereka miliki sendiri.

Dampak dari semua itu adalah meningkatnya ketertarikan masyarakat secara cukup signifikan. Selain itu, cara-hal yang penting untuk diingat adalah bahwa sekitar 200 anak, kebanyakan dalam bentuk carak

² Han Basyir, "Da'wah di Hari Gaya Pesantren dalam 100 Tahun Rengas 100 Perayaan Cita Pesantren Semangat dan Bawa Ciptaan", Jakarta: P3M, 1995, hal. 72.

³ Bari Effendi, Annugerah Gengsi Transformasi Sosial di Madura, hlm. 74. Untuk melihat secara rinci bentuk-bentuk kegiatan terdapat di halaman 74-84.

⁴ Ibid. hlm. 85.

mulai mengalami penurunan cukup drastis, dan kekerasan secara umum kian sulit menemukan tempat berlindung dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, komunitas Annuqiyah juga terlibat aktif melakukan kajian-kajian tentang agama, politik, dan sebagainya melalui organisasi organisasi sosial keagamaan yang ada di Sumenep. Melalui kegiatan itu, masyarakat bernama pesantren kian memiliki kemampuan untuk membedakan antara ajaran dan nilai-nilai agama di satu pihak, dan radikalisme agama di pihak lain. Menjelaskan dialog dengan pihak lain di intelektual dan ulama, masyarakat mengetahui serta menyadari bahwa radikalisme agama tidak lebih dan sekadar paham agama yang tujuannya lebih berorientasi kepada kekuasaan atau mengganggu kekuasaan. Dalam pandangan sebagian besar mereka, radikalisme atau dan bentuk kekerasan keketatan yang lain, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, justru akan menimbulkan persoalan baru.

Pada skala lokal, pola pendekatan Annuqiyah ini merupakan salah satu unsur utama yang cukup signifikan dalam pengendalian kehidupan yang radikal-suh dan bentuk bentuk radikalisme agama. Sedangkan pada skala makro, pesantren secara umum memang tidak pernah menjadi tempat tumbuhnya radikalisme agama, serta tidak pernah menveoatkan ajaran Islam yang esastem yanggubpuo demikian,

perlu disadari bahwa fenomena lokal dan global masih menunjukkan potensi yang cukup besar untuk terjadinya kekerasan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera. Pertumbuhan ini perlu disikapi secara kritis dan apolitis. Antisipasi secara khusus, masyarakat Sumatera, penyebaran pesantren yang ada dan wilayah Indonesia, secara keseluruhan.

Antisipasi Pesantren ke Depan: Sebuah Tawaran

Berdasarkan kenyataan hukum yang telah dilalu bangsa Indonesia, apakah ada faktor yang dapat memunculkan kekerasan adalah penggunaan kekerasan dan bahasa kekerasan dalam kegiatan politik. Pada Pemilu 2014 misalnya, banyak masih digunakan sebagai partai politik dengan tujuan untuk meraih suara sebanyak mungkin. Hal semacam ini akan memunculkan sikap anasir yang radikal di kalangan pendukungnya. Dalam bentuk keadilan kebenaran kepihak dan peniadakan kebenaran pada kelompok lain. Di sini perbedaan antarpada politik akan berpeluang menjadi ajang pertentangan terbuka dan sangat mungkin berakibat dengan kekerasan di kalangan massa akar rumput.

Pesantren itu masih diperiratkan dengan dampak globalisasi yang telah melahirkan keberagaman cukup lebar antara pihak yang kuat dan lemah. Masyarakat

bawah yang telah terpanuk selang lama akibat kesus-
berkepanjangan benar-benar menjadi terpujgikan.
Mereka nyaris tidak memiliki daya sama sekali untuk
memperistakan hidup. Akibat merembahnya
keluar perusahaan transnasional yang umamnya
datang dan bangi masarakat urus bawah tak mampu
menjangkau kebutuhan hidup mereka hama untuk
keperluan paung dasar sekalipun kehidupan mereka
benar benar terancam sehingga kemiskinan dan mibi-
nabi yang selama uru danut menjadi merudat dan me-
reka tidak mampu mengmeasuratakannya dengan
kehidupan nista.

Ketidakmampuan tersebut akan membientuk
semasam ukap perlindungan dan daam dan maya
rakat, dalam meakukan perlindungan dan uru agama
memainkan fungsi yang krusal. Agama akan dijakikan
sist untuk melawan kelompok yang dianggap telah
mengancam ketudayan dan eksistensi mereka. Dalam
krisis semasam itu, radikalisme agama akan menjadi
kecondongan yang subit belakkan. Selain politisasi
agama uru membuat nilai-nilai substantia agama subit
untuk menyentah kehidupan mereka. Sebaliknya,
simbol dan bahasa bahasa agama yang eks-kusid
menjadi bahan yang cukup ampuat untuk membangun

* Jilal Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of
Socai Change*, Center for the Study of Religion, San Francisco, San
Oxford, Westview Press, 1990, hlm. 30.

soliditas sekam di kalangan intern mereka danu hingga meluas ke tingkat dan yang dianggap mengancam eksistensi dan kehidupan mereka.

Pesantren sebagai lembaga sosial pendidikan keagamaan yang memiliki pengaruh besar di negeri ini perlu memaknai secara kritis semua permasalahan tersebut. Para elit pesantren yang dituntut menyadari bahwa sebagai masyarakat Indonesia mampu saat ini masih berada dalam keterbelakangan ekonomi dan pendidikan. Kondisi ini tentu merupakan permasalahan yang cukup rawan untuk timbulnya konflik, kekerasan, dan bahkan radikalisme agama. Untuk itu, kepedulian elit pesantren terhadap persoalan ini perlu diwujudkan prioritas yang tidak boleh diabaikan kembali.

Terlepas permasalahan di atas, para tokoh pesantren sudah seharusnya meningkatkan keagungan praktik praktis pragmatis sebab keberadaan mereka di wilayah ini sangat signifikan bahkan sering diperspektif salah oleh masyarakat awam di pemetaan sehingga harus mengentalkan sikap masyarakat yang primordialistik dan sektarian. Semuanya, para elit pesantren akan lebih memiliki kontribusi yang cukup tinggi dan akan memiliki sumbangsih yang lebih bermakna bila mereka memusatkan dan sebagai penyangga moral dengan peran menertakan dan membuntakan etika moral keagamaan substantif dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Berjasama dengan itu, pesantren dituntut untuk memperluas jaringannya dengan lembaga, organisasi, dan pesantren lain dalam rangka mengemban tugas keberagamaan yang telah merepresentasikan nilai dan juga ajaran agama yang telah mengakar dan telah berwajah keadaban. Dalam jaringannya itu, dialog perlu dikembangkan untuk mungkin sehingga segala persoalan yang dihadapi umat Islam, secara khusus, dan bangsa Indonesia, secara umum, dapat diangkat ke permukaan secara lebih utuh. Keberhasilan itu diharapkan akan melahirkan keterbukaan yang dapat memunculkan wawasan wawasan dalam bentuk rekonstruksi pendidikan dan transformasi sosial yang lebih mencerahkan bagi perjalanan pesantren dan bangsa ke depan.⁴

NILAI PENTING ASWAJA NU BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA¹

Saat ini kehidupan sosial prima di tingkat Nasional berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Ada kesan, penanganan kasus lebih menekankan pada kekerasan dan kekuasaan. Pola semacam itu berdampak jauh terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Kekerasan dan kekuasaan semakin meretak di mana-mana. Kasus pun kian tidak tertangani.

Dalam menanggapi hal itu, sebagian kelompok umat Islam melakukan reaksi yang bisa katah mengerikan. Mereka juga menanggapi dengan kekerasan. Akibatnya konflik dan semacamnya berkembang di masyarakat dalam eskalasi yang tajam. Sementara, se bagian umat Islam di tingkat bawah terpancing dan

¹ Tulisan ini awalnya adalah masalah beres yang disampaikan pada Studi dan Kajian Keislaman yang diadakan oleh Lembaga Rakan dan Pengembaraan Sumber Daya Manusia (LAKPP SDA) di M. Sumatera pada Ramadhan 1422 H. Namun tulisan ini telah sedikit dimodifikasi dan diperhalus yang akan untuk disampaikan dengan perkembangan yang terjadi saat-saat ini.

menganggap kekerasan sebagai cara yang memadai pengesahan agama. Ada dua pandangan bahwa walaupun Islam menghasilkan penggunaan kekerasan dalam rangka penyelesaian persoalan.

Pada konteks di atas pandangan Islam terhadap kekerasan menjadi mendasar untuk dibahas. Untuk mengetahui sikap Islam terhadap kekerasan ini, nilai, nilai, dan karakteristik agama ini perlu dipahami secara utuh dan pada. Dalam rangka pencapaian hal tersebut bahasan tentang 'am Abhustunnah wa Jama'ah menjadi sangat relevan untuk didiskusikan. Sebab ajaran ini, sampai batas tertentu, memilikai fitur memilikai fitur untuk menangkap nilai dan ajaran Islam dalam pola semacam itu.

Abhustunnah wa Jama'ah adalah istilah yang digunakan pertama kali pada masa Abhastah pada saat itu. Istilah tersebut digunakan oleh satu kelompok umat Islam yang mengakui kekabbahan Abhastah dan sekaligus menekankan kesinambungan dengan masa lalu termasuk kekabbahan, maw' dalam kerangka Sunnah Nabi sehingga merepresentasikan prinsip jama'ah sebagai prinsip prinsip dasarnya.

Liul Marshall G. S. Hodgson: *The Venture of Islam: Conscience and History in World Civilization* : (The Islamic Age of Islam); (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1974); hlm. 277-278

Munculnya kelompok ini tidak dapat dilepaskan dari usaha Abu Hasan al-ʿAsʿari yang berusaha mencari metode dan konsep-konsep teologis yang dapat dijadikan pegangan bagi umat Islam setelah Mu'tazilah disebut sebagai aliran sesat (Djauzi Abūḥaṣṣyah). Usaha yang dilakukan al-ʿAsʿari ini, sampai batas tertentu, merupakan kelanjutan dari usaha yang dilakukan al-Maturidi.

Melalui kerja mereka seperti itu, al-ʿAsʿari dan al-Maturidi dianggap sebagai pendiri aliran teologi "baru" yang berbeda dengan aliran Mu'tazilah. Setelah masa kedua tokoh ini, term *Ahlusunnah wal Jama'ah* banyak dipakai di kalangan umat Islam. (Terkait selanjutnya, paraun tersebut mendapat pegangan kolektif ketika pada 1-2) Masehi Khalifah Abūḥaṣṣyah mengeluarkan *Daftar al-Khulafāʾ al-ʿAṣṣimah*. Dalam daftar tersebut dinyatakan, bahwa negara melarang beresanya doktrin-konsep *al-Qur'an*. Persepsi ini menunjukkan bahwa sejak saat itu Sunnisme telah dibakukan secara eksplisit—positif dengan mendapat dukungan penuh dari para Khalifah sebagai juru bicara Ahlusunnah.

¹ Harun Nasution, *Teologi Islam: Dari Aliran-Sekolah Sampai Analisis Perbandingan* (Cetakan V), Jakarta: J. Poes, 1995, hlm. 84.

Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates* (London & New York: Longman, 1985), hlm. 242.

Paragraf di atas menunjukkan kepada siapa pembakuan term *Ahwalunnabi wa ashrafih* secara konseptual, sedangkan secara substantif, term ini lebih merupakan penggambaran dan nilai-nilai dari ajaran Rasulullah yang dikembangkan lebih lanjut oleh Khalifah yang empat. Dengan kata lain, *Ahwal* merupakan keseluruhan kesempurnaan yang muncul setelah Nabi hingga dewasa ini yang menekankan pelajaran secara utuh terhadap nilai sikap dan perilaku yang diajarkan Nabi. Acarangk dasarnya adalah penekananannya terhadap *akhlak* sebagai *rahmatullah* di *darjah* di samping sebagai penggambaran moralitas luhur.

Pada prinsipnya term *rahmat* mengandung muatan makna nilai yang mengedepankan persatuan, keamanan, kesejahteraan, ketenteraman, dan hal-hal lain yang semuanya berkaitan moralitas yang lebih mengemphasiskan akan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, menaati hukum, dan sebagainya. Nilai-nilai term *rahmat* inilah yang telah diajarkan Rasulullah dan kemudian dikembangkan oleh para Khalifah yang empat dan di *teruskan* di *selanjutnya*.

Nilai-nilai seperti itu telah diimplementasikan secara nyata oleh para generasi awal Muslim pada saat wafatnya Rasulullah. Pada saat itu, umat Islam sedang mengalami keadaan yang sangat hebat baru, tapi sekaligus mereka mampu menangkapnya secara utuh dan

penyuh kedewasaan. Hal itu tampak dengan jelas dalam sikap mereka dalam menghadapi perbedaan pendapat mengenai penggambaran Islam pada saat itu meletakkan perbedaan sebagai pengujian wawasan dan pengembangan kerja kritis kritis yang kreatif dalam rangka terciptanya kebutuhan yang sepihak sehingga umat Islam dapat hidup dalam satu keadaan persatuan yang benar benar kokoh

Ier ahnya *di rumah di kelas* telah memotivasi perundangan kesatuan umat Islam. Sebagian umat Islam terlempar ke dalam pandangan pandangan sektarian yang mengedepankan sikap eksklusif dan berakutetadiah. Perbedaan dianggap sebagai perbandingan yang harus diwaris dan bahkan harus dimusnahkan. Ilmu panyang semacam itu direpresentasikan oleh sekte khawarij. Kelompok ini dan pendukungnya yang menonjol *di akhir 1-2-3-4* ini mendirikan kelompok sendiri yang kelompok ini memisahkan kelompok lain sebagai kelompok yang tidak keluar dari jalan Islam dan harus diperangi

Munculnya kelompok khawarij ini dianggap sebagai awal kemunculan sekte dalam Islam yang melahirkan konflik sebagai perpecahan yang Perpecahan pandangan yang eksklusif memisahkan kelompok ini dianggap sebagai kelompok eksklusif sehingga mendapat reaksi atas dan kelompok Islam yang lain. Maka lahirlah kelompok Mu'tazilah dengan

pandangan-pandangan teologis yang bersifat reaksioner terhadap kelompok Khawarij tersebut, mereka tersebar ke dua sisi pola ekstrem yang akan dengan memarahkan masalah pertikaian yang terjadi antar kelompok kepada Allah SWT, sepenuhnya. Pandangan ini tentu tidak menyelesaikan persoalan karena hal itu juga telah dipertentaskan sebagai alat legitimasi untuk mendukung kekuasaan yang diperteguh oleh kelompok Muawiyah.

Dalam kondisi penuh pertentangan yang kian memuncak tersebut, ada sekelompok umat Islam yang ingin menetapkan pemerintahan pada kerangka ajaran yang diwariskan Nabi. Kelompok tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Umar al-Faraj dan Abdullah bin Abbas al-Faraj. Kedua tokoh tersebut melakukan kaisan secara kritis terhadap Sunnah Nabi sebagai jalan memahami agama dengan benar dan menegakannya dalam rangka mengembangkan solidaritas dan persatuan umat Islam yang saat itu terpecah belah.

Pola yang dikembangkan kedua tokoh itu dapat dipahami sebagai usaha mempromosikan persatuan dan menghindari pola-pola ekstrem baik dalam gerakan, metode maupun dalam pemikiran, dengan

- Husain Muhammad, "Memahami Segram Ahlul-diniah Wal Jama'ah yang Toleran dan Anti Ekstrem dalam umam Basrah" (ed. Kontroversi Agama Asia Perdebatan dan Pluralistik), (Program Studi UIN 2009) no. 35-38.

dan nilai *tasawuf*, *taswif*, dan *tasawuth*. Dalam ungkapan ini, selama suatu kelompok masih menekankan nilai-nilai yang tidak mencerminkan pola yang sangat ekstrem, selama itu pula kelompok tersebut dianggap sebagai *Awya*.

Atas dasar itulah, al-Baghdadi (w. 1047) telah berpandangan bahwa *Awya* merupakan golongan yang mencakup delapan kelompok, yakni *pytome*, kelompok mutakallimin yang menggunakan sebutan *ahlu al-*imam** terhadap eksistensi Tuhan dan mengherankan *syekh* dan *raib* *Arwa*, semua kelompok *hujjah*, aliran *raib* dan *syekh* yang memiliki *hujjah* adanya sifat bagi *Arwa*, kelompok *ahlu haq* yang membedakan antara *haq* yang sah dan yang tidak *Arwa*, kelompok *ahlu nahw* dan bahasa yang tidak mencampurkan perumusan pengetahuan mereka dengan perumusan sudah yang dianggap bid'ah *Arwa*, golongan *ahlu uprah* dan *raib* *Arwa* yang pandangannya sesuai pandangan *Arwa*, *Arwa*, kelompok *ahlu* yang menggunakan pendekatan *ahlu haq* dan semacamnya *Arwa*, kelompok yang bernilai di jalan Allah dalam rangka mempertahankan umat Islam *Arwa* maupun umat Islam yang menepatkan pada para *Arwa*."

* L. Fath al-Baghdadi, al-Furuq bain al-Firq (al-Asbab al-Ashghar) 1983; hlm. 373-378

Dari penerapan di atas kita mengetahui bahwa batasan Aswaja merupakan gagasan yang sangat umum dan relatif universal. Aswaja merupakan konsep yang diletakkan pada nilai-nilai yang sudah dianggap benar untuk dikembangkan dengan ruang waktu yang ada. Dalam perspektif ini kita melihat bahwa ketika para tokoh Negeri di atas berdiskusi telah memutuskan konsep Aswaja dengan batasan-batasan sederhana dan lugas,¹ maka konsep itu tidak lebih dari sekedar untuk membentukkan nilai-nilai Aswaja pada kondisi dan situasi yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat itu.

Konsep di atas adalah konsep yang dipahami para generasi penerus Negeri khususnya pada masa kemerdekaan ini. Mereka tidak memahami Aswaja sebagai doktrin yang melingkari secara kreatif dan dinamis. Abdurrahman Wahid, misalnya, melihat Aswaja sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus dikembangkan sebagai *value* bagi warga Negeri. Melalui Aswaja, hendaknya dirumuskan posisi umat manusia dalam kehidupan, juga dimensi ilmu dan teknologi. Kemudian pula, melalui Aswaja, hubungan antara individu dan masyarakat hendaknya dibentuk dan dikembangkan.

¹ Mereka memutuskan bahwa Aswaja adalah kesepakatan terhadap salah satu madzhab Islam, yakni atau Maturidyah dalam arti dan perkembangan dalam teori satu dan empat madzhab. Malik, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali dalam arti dan perkembangan salah satu ajaran dari al-Ghazali dan al-Juradhi dalam bidang tasawuf.

Selain itu, Aswaja harus mengembangkan pandangan tentang tradisi dan dinamisanya, cara pengembangan kehidupan masyarakat, serta tentang nilai internalisasi ajaran dan sembahsannya dalam masyarakat.

Pada saat ini pula, Apel Negeri, salah seorang tokoh penerus NU, menstap dan mengembangkan konsep Aswaja secara lebih hakiki. Ia menyatakan, istilah Aswaja, sebagaimana dipegang warga NU saat ini, sebenarnya hanya penyederhanaan konsep sehingga bernilai praktis dan kondusif bagi mereka. Pada prinsipnya, konsep ini muncul sebagai *manhaj di pikir* dan bukan *manhaj di jalan*. Sebab jika konsep itu dipahami sebagai *manhaj di jalan*, dapat menimbulkan kontradiksi-kontradiksi. Misalnya, ada adanya beberapa madzhab dalam suatu madzhab.

Jari dua puluh NU tersebut ditambah dengan dukungan cara cara hukum sepanjang perjalanan yang dilalui, tampak dengan jelas bahwa Aswaja merupakan konsep yang berifat lentur dinamis dan fleksibel. Aswaja bukan madzhab agama, tapi *manhaj di pikir*. Aswaja telah mengacu pada suatu pendekatan yang merepresentasikan nilai-nilai *Landscapeth, i'lahi,*

¹⁰ Ustaz Abdurrahman Wahid, *Musam di Tengah Pergumulan* (Jakarta: Lentera, 1987), hlm. 40-43.

¹¹ Ustaz Said Apri Sidi, *Abdurrahman Wahid Jombang di Awal Abad XXI* dalam Imam Saefudin, *100 Kontroversi Aswaja Ayat Perdebatan dan Perdebatan*, hlm. 130-136.

tasbeeh, dan *tasbeeh*¹⁷ kembang madzhab dalam pengertian baik, baik, eksklusif. Melalui pemahaman ini, warga Nahdhiyyin, secara khusus, dan umat Islam Indonesia, secara umum, dituntut memahami dan memahaminya kembali, serta merekonstruksi dan mengaplikasikannya sesuai konteks kekinian.

Itu ada gejala cukup dramatis yang mengarah kepada pola pola keberagamaan yang menunjukkan eksklusivitas yang penuh dengan nuansa kaum kebenaran sepihak serta kecenderungan ke arah politisasi agama. Dampaknya, seperti disebut pada awal tulisan ini, kekerasan terjadi di mana mana, kerusuhan dan waktu ke waktu, menunjukkan peningkatan cukup tajam, dan gejala disintegrasi bangsa tambah menguat di berbagai daerah.

Sayangnya, peristiwa yang telah dilakukan oleh bangsa ini tidak pernah habis karena selalu yang ditawarkan terkesan tergesa gesa *ad hoc* parsial, dan komersial atau seualnya, tidak mengakar pada diri dan bangsa. Dampaknya, peristiwa ini tidak berhenti dan menyangkap akar akar peristiwa yang sangat kompleks.

Atas dasar itu, untuk menuntaskan persoalan kritis yang dihadapi bangsa, terlebih dulu hendaknya

¹⁷ Ibid. hlm. 138

melihat masalah tersebut secara utuh, serta penuh kehati-hatian. Pada saat yang sama, kita dituntut mencari solusi yang *appropriate* serta mengikat pada tradisi. Harini perlu dilakukan karena setiap bangsa, kelompok, dan jenis masyarakat memiliki latar belakangnya masing-masing.

Realitas tersebut di atas menjadi peluang besar untuk ditangkap oleh Aswaja. Secara potensial, Aswaja mampu memaksimalkan peran maksimalnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Sebab sejak sebertumbuh telah Aswaja merupakan konsep yang sangat menantang pada kesambungan tradisi yang berpijak pada nilai-nilai perkuat seperti dinyatakan dalam suatu ungkapan yang terkenal: "*al-Muhājarūh al-ā al-qadīm al-shūhī wa al-akhdar bi al-jadīd al-akhdar*". Lebih dari itu, Aswaja merupakan sebuah aliran yang berusaha menangkap nilai-nilai luhur secara utuh, menelaah ketepatan dan menelaahkan sikap dan perilaku yang dapat membuat kehidupan damai dan sejahtera.

Nilai-nilai tersebut akan dapat memburni serta akan tanggap dalam penyelesaian persoalan, jika konsep Aswaja dirumuskan dan dihidup kembali sesuai konteks kekinian. Pembacaan kembali merupakan keniscayaan untuk dilakukan karena sejarah Aswaja, sama dengan tradisi-tradisi lainnya, menuntut hal tersebut. Tanpa kerja kreatif ini, Aswaja akan menjadi fosil

belku, itu akan berubah menjadi "agama" baru yang menandingi Islam itu sendiri.

Kini, tergantung pemerintah NL untuk menyikapi semua itu. Apakah mereka akan membiarkan Awaja sebagai nuasi nuasi mau yang tidak mampu merespons kehidupan yang terus berkembang, serta membiarkan bangsa ini terbelah tapi pasti berespekai menuju nuk kehancurannya, atau mereka akan memaknai kembali Awaja seperti nuasi nuasinya yang memertingkan moderasi, toleransi, dan kesetimbangan secara transformatif dan kontekstual, sehingga melalui itu mereka dapat memberikan sumbangsih nyata bagi Indonesia C

ISLAM DAN PERKEMBANGAN SOSIAL- POLITIK DI INDONESIA: Signifikansi Transformasi Sosial dalam Perspektif Aswaja*

Pada permulaan dasawarsa terakhir abad XI, keruntuhan semua bernuansa politik tampak merembak di beberapa daerah tepal budo di Jawa Timur yang secara kelbetulan merupakan daerah-daerah kantong komu-
nu as Aswaja. Keruntuhan dalam bentuk pemerintahan
gereja oleh kelompok-kelompok tertentu itu, telah
memudarkan anggapan tentang kemusuhannya
antar Islam Indonesia. Oleh dan itu, ada asumsi yang
dijunjung beberapa kalangan bahwa keruntuhan itu
diakibatkan oleh komunitas yang memudo afiliasi
dengan warga Sakhidhaya. Anggapan itu tentunya
sangat merujuk diidentifikasi komunitas Aswaja yang
selama ini dianggap sebagai kelompok yang sangat

Disempatkan dalam Simposium Nasional "Membaca Kembali Aswaja Dalam Konteks Pergerakan Sosial Menghadapi
Resiliensi Globalisasi" PB PIRU PISC PIRU Jawa Timur PC
PIRU Kardin tanggal 5 Maret 2003 di Hotel Sateh Indah Kardin

menekankan moderasi dan toleransi dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Perselisihan menjadi kian rumit ketika, saat-saat kejatuhan Gus Dur dan kursi kepresidenan, kerusuhan serupa terjadi lagi. Selain gereja dan sarana pendidikan menjadi sasaran, beberapa kerusuhan pertan (sukar di larva Timur juga harus dibakar massa. Kejadian itu telah membuat komunitas Awaja mendapat tuduhan tajam sebagai kelompok yang beringsas dan anarkis. Mereka mendapat ingemansas sebagai kelompok Islam yang sangat mengedepankan nilai kekerasan dalam menyelesaikan pertikaian.

Kejadian itu tentunya perlu diukapi secara kritis dan objektif sehingga peristiwa itu menampakkan realitas sebenarnya. Untuk mencapai pandangan seperti itu, Awaja, sebagai suatu paradigma yang dianut kelompok yang sering dihubungkan dengan komunitas N, dan kelompok lainnya perlu dibedah secara akurat. Melalui analisis ini, selain konsep Awaja dapat dipahami lebih substansial dan komprehensif, hal itu juga sekaligus berguna untuk diadopsi pendekatan dalam rangka membedah dan mengatasi saat perselisihan tersebut dan persoalan perselisihan lain yang melint bangsa, serta dapat menemukan sebuah solusi yang ditetapkan lebih menentramkan bagi kehidupan masyarakat di masa kini dan mendatang.

Aswaja dan Transformasi Sosial di Indonesia

Berdasarkan pada analisis tersebut, ternyata dapat dikatakan sebagai kelompok yang merujuk pada pola keberagaman yang mencirikan nilai-nilai *moderate*, *middle proportional*, *balanced* dan *low-mid* seimbang. Memahami ungkapan dan makna, kelompok ini merupakan *an orchestra middle* yang dengan pendekatan *top* dan *bottom* secara harmonis dalam keberagaman, keseimbangan kehidupan *middle* dan *bottom* peningkatan kelas pada keseimbangan dan *moderate* dalam kehidupan pada berbagai dimensi. Dalam keragaman kelompok ini, nilai-nilai semacam itu merupakan ajaran yang disampaikan secara teguh oleh Rasulullah dan dikembangkan oleh generasi penerus beliau.

Ketika Islam akan diperkenalkan ke Indonesia, nilai-nilai budaya itu merupakan pendekatan yang dipergang teguh oleh para penyebar Islam ke tanah Nusantara. Menurut A. H. John, seperti yang dikutip Arya, ke-berhasilan mereka dalam mengislamkan sejumlah besar penduduk Nusantara sejak abad ke-13 terletak

1. Muti Saif Agul Saif, Adhucumrah wal Jama'ah di Arabiyyah
 XX dalam Urat Ba'har, ed. Kordovera Rampe Aus Per
 debatan dan Penemuan Cerdas Yogyakarta, 1995
 hlm. 30

George Makris: 'Ash in the Pie Ash and in Islamic Religious History' darin George Makris: *Religion, Law and Leadership in Classical Islam* (Humboldt University 2001), S. 51.

pada kemampuan menampilkan Islam dalam kemasan atraktif terutama dengan cara mendekatkan kesenian atau kontemporer Islam dengan kepercayaan dan praktik keagamaan lokal serta budaya-budaya masyarakat setempat. Kemasan Islam dalam pola semacam itu merepresentasikan secara akurat tentang nilai-nilai moderasi, toleransi, dan sejenisnya yang dianut oleh para tokoh penyebar Islam di kawasan negeri yang sekarang disebut Nusantara. Melalui pendekatan itu, Islam mampu mewarnai kehidupan sosial dan politik masyarakat yang dapat dilacak dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, penempatan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, dan lain-lainnya.

Isi hapusan berkusutnya ditanda dengan berhimpun organisasi Nahdhatul Ulama (NU) secara eksplisit memvouchkan bahwa Aywa adalah anutan organisasi mereka. Dalam kerangka pemahaman NU, Aywa dirumuskan sebagai kepengaruhan terhadap salah satu madhab/madhabat tertentu dalam bidang fiqh, kalam, dan tasawuf. Pembahasan Aywa dalam bentuk seperti itu perlu dipahami sebagai upaya membatasi jarak ketidagamaan sesuai konteks ibrahimi yang dialami masyarakat luas saat itu yang sebenarnya beres mereka memulau kepertobatan dan memahami

Achmad Ali, *Jejak Jema'ah Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XV dan XVI*. Majalah Asia dan Pembangunan, Pemikiran Islam di Indonesia Cetakan Bandung Penerbit Mizan 1994, hlm. 35.

1952-1957. Setelah 7 Juni 1957, di bawah pimpinan Masyumi, Masyumi dan masyarakat di seluruh pulau secara resmi menolak untuk mengakui atau ada aliran resmi atau dasar ideologi, kehidupan mereka telah itu keputusan bermadzhab akan didasarkan pada upaya untuk memisahkan, secara kritis, sekaligus mengembangkan tradisi khazanah intelektual Islam. Pilihan mengambil madzhab madzhab tersebut juga didasarkan pada suatu keyakinan bahwa aliran aliran tersebut, sampai batas-batas tertentu, mencerminkan Islam dengan nilai-nilai yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Dalam ungkapan lain, keberagaman madzhab itu ibaratnya mewakili Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah, dan dikembangkan oleh para sahabat.

Sejarah membuktikan bahwa NK dengan tujuan yang dihasutnya telah meraih beberapa keberhasilan yang cukup mengesankan dalam bentuk direformasi keberagaman NK oleh sebagian besar umat Islam Indonesia terutama mereka yang berada di pedesaan tanpa menimbulkan gesekan dan pertentangan yang cukup berarti. Bahkan pola keberagaman ini telah mampu menyatukan masyarakat kota sebagai bentuk berukir NK yang memiliki aspek keadilan, sikap kemandirian dan sikap kritis terhadap negara.

Keberadaannya sebagai partai politik sejak 1952 telah membuat NK terus memainkan peran utamanya

untuk melakukan transformasi sosial. Kiprah sosial yang diamanatkan para pendiri NLI akhirnya banyak terbengkalai sehingga masa awal rumput kelompok ini harus menerima beban yang cukup parah dalam bentuk keterbelakangan dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Kenyataan itulah yang membuat NLI pada 1984 meneguhkan visinya kembali ke Khittah 1926 yang antara lain menekankan diri dan kegiatan politik praktis, dan menjadi suatu wah keagamaan sebagaimana awal berdirinya. Dengan menaruh diri dan aktivitas politik praktis, NLI mulai menekankan perhatiannya pada persoalan sosial yang bisa kita baca, misalnya, membuat rekamendasi tentang permasalahan pemukiman haji pengusahan kebutuhan makanan dan minuman dan busana yang layak yang harus diterima kaum Muslim pada permulaan suatu yang lebih substantif, organisasi yang sentral dengan karakter Awaja ini mulai mengembangkan cabang politik praktis dari dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan kesehatan. Sebagai realisasi dari visi ini, NLI telah mendirikan Lakhsadun, sebuah lembaga kajian dan pengembangan untuk pengembangan masyarakat yang punya tugas meneliti masalah yang telah dikehendaki oleh

* Lihat Khair van Buressean Ali, *Tradisi Alim-ulama Kullat Pergerakan Al-Jama'at Baru, Cakupan I* (Yogyakarta: LKUS-Pustaka Pajajar 1994) hlm. 250-251.

Bersamaan dengan kembali ke Kluang 1926 itu, NI melakukan terobosan politik dengan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Hal ini dilakukan justru di saat organisasi keagamaan yang lain masih belum mencetuskan sikap tegas, bahkan ada yang menolak, terhadap kebijakan politik itu. Langkah politik NI ini bermula tanggal 19 Februari dalam merumuskan konstitusi komunitas Awam-bahwa negara Indonesia yang berideologi Pancasila merupakan bentuk final untuk Indonesia. Penerimaan terhadap asas Pancasila ini merupakan bentuk konkret dan sikap moderasi keberagaman Awam NI. Dan itu pula nilai semacam pluralisme dan toleransi yang menjadi bagian intrusi dan pandangan keagamaan Awam sebagaimana dapat dilihat dari penemuan konsep *akhlak* yang harus dikembangkan di kalangan komunitas Awam. Persaudaraan dalam awam Awam NI merupakan dasar yang universal yang meliputi persaudaraan sesama muslim (*akhlak muslimah*), persaudaraan kebangsaan (*akhlak sahihah*) dan persaudaraan kemanusiaan (*akhlak barokah*). Pola pandang ini memperlihatkan secara nyata komitmen NI untuk mengembangkan kehidupan yang penuh toleransi dan harmonisasi dalam seluruh aspek kehidupan. NI diwakili banyak kalangan merupakan kelompok yang sangat menekankan pluralisme dan

¹ Lihat Abd. Nim 148-149

menilai yang melatarbelakangi perubahan sebagai perubahan yang bersifat hanya di lapangan saja, dan belum dapat merentangkan semua ke dinisukan dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan yang penuh keadilan dan kesejahteraan.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa semua yang dilakukan NU merupakan langkah strategis yang memiliki spektrum luas ke depan yang di anggap dan visio transformatif dan bukan sekedar penyesuaian oportunistik. Dengan kembali ke khutbah 1926 dan menerima Pancasila sebagai asas organisasi, jamiyah yang didirikan KH Husein Arsan telah menampakkan geliatnya dalam melakukan transformasi sosial dan pencerahan politik. Dalam kerangka itu, Ratusan Masjid yang pada masanya hanya mengkap persoalan persoalan keagamaan mulai mulai dikembangkan menjadi wahana untuk membahas persoalan dan isu-isu aktual, seperti permasalahan pengambilalihan tanah oleh negara untuk tujuan pembangunan dan pengkawasan penghuninya, dan hubungan antara zakat dan pajak.⁴

Sebagai konsekuensi logis dan pengembangannya adalah terdapatnya kebutuhan mendesak untuk melaksanakan referensi madzhab-madzhab selain Wahab dan penerapnya penerapannya sistematis bahasa yang

⁴ Loh and Nis 229-230

menakup pengembangan metode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntasan masalah. Kenyataan itu membiar wahai dalam komunitas Aswaja menetapkan perlunya bermadzhab secara *wasajiy*. Aswaja yang pada mulanya dipahami sebagai *madzhab aswajiy* mengalamai perkembangan menjadi *madzhab wasajiy*.

Dari paparan di atas tampak nyata bahwa konsep Aswaja sebenarnya merupakan konsep yang lentur dan dinamis yang selalu kontekstual dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui karakteristik itu, Islam sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi seanehan alam akan benar-benar dapat dihadirkan melalui pengembangan nilai-nilai keseimbangan, moderasi, dan toleransi yang pada gilirannya dapat melahirkan kedamaian dan kesejahteraan yang lestari di jagad raya.

Aswaja dan Persoalan Sosial Politik Indonesia Kontemporer

Kebudayaan Aswaja, baik sebagai *madzhab aswajiy* maupun *madzhab wasajiy* telah memberikan sumbangon cukup nyata dalam memberikan wawasan *ushuliyah*¹

Kiri Atas: Saha, Mawdud, *Baharu Maza* dan Ikhbalul Hulum M. Seber, *Isi-Isi: Perken. Kata Pengantar* oleh M. Imdadun Rahman dan *Uraha Rupa Fiqh Ahlul-Taswima*, *Qalbiyyah Baharu Maza*, Cetakan Pertama (Agustus 2022). Hal. vi.

bagi bangsa ini. Jika tetap harus diakui bahwa sepanjang perjalanannya banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Bahkan dalam satu atau kasus tertentu, pemerintah tetap mengganggu dan mengganggu terutama yang berada di luar rumah telah menjadi ancaman yang paling dirasakan olehnya.

Terkait dengan itu, kerusuhan di daerah daerah hantong komunitas Awya, sebagaimana disebutkan di awal diskusi, dapat dilihat sebagai fakta yang dapat menjelaskan skor persolan sebenarnya. Bahkan itu pada dasarnya bermula pada ketidakmampuan masyarakat dalam menyikapi persolan secara kritis dan analitis sehingga mereka gampang terprovokasi dan direkayasa. Dengan peristiwa itu, kelompok tertentu dapat menunjukkan ketidakbenaran anggapan yang mengatakan bahwa N. adalah agen plurikisme dan toleransi. Sebaliknya tidak mendukung anggapan tersebut.⁴ Jika selamam itu terbangun kembali ketua tua Dur disengsejkan dan kuat kepercayaan.

Adanya peristiwa semacam itu membuktikan bahwa nilai nilai Awya belum menjadi landasan kokoh bagi sikap dan perilaku masyarakat terutama mereka yang terbelakang dalam hal pendidikan dan ekonomi. Meskipun dalam hidup keseharian mereka

⁴ Robert W. Hefner, *God at the Margins and Democratization in Indonesia*, (Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2000), hlm. 190.

(warga) yang pemerintah memang telah berupaya toleran dan moderat, tapi mereka tidak mampu menjadikannya sebagai *value* yang membentuk keseluruhan kehidupan mereka. Padahal seperti Arwaja perlu dikembangkan ke arah sana sehingga menjadi dasar dasar pandangan tentang manusia dan posisinya dalam kehidupan, tentang penyusunan kehidupan ekonomi, dan tentang hakikat ilmu, pengetahuan, juga teknologi. Demikian pula, Arwaja perlu menjadi puskas pandangan mengenai tradisi, cara-cara pengorganisasian dalam kehidupan bermasyarakat, dan tentang asas-intelektualisasi dan moralitas.¹ Semua pandangan itu hendaknya memberikan nilai-nilai dasar yang dikehendukannya.

Ketidapan semangat itu mengingatkan kelompok ini bahwa kerja kerja mendasar yang selama ini telah dilaksanakan perlu dikembangkan secara lebih kreatif dan *push* lagi serta memiliki rangkaian lebih luas. Upaya ini mungkin tidak terelakkan untuk dilakukan apabila diantisipasi kondisi sosial-politik ke depan. Sebab fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa problem yang sedang dan akan dihadapi masyarakat, secara khusus, dan bangsa ini, secara umum, akan mengancam petungkaan kaum dan berbagai aspek kondisi negara yang masih bersifat transisional akan

¹ Untuk rinciannya lihat Abdulrahman Wahid, *Muslim di Tengah Perpolitikan* (Jakarta: Lajpones, 1997) nlm. 40-45.

"menumbuhkan" persoalan sendiri dalam bentuk tidak sesuai dengan politik, ekonomi, maupun sosial. Berbagai kemungkinan berpetakung cukup besar untuk berkembang di negeri ini seperti terjadinya perburuan politik kotor, praktik korupsi yang merajalela, perekonomian rakyat yang kian merosot, dan eskalasi kekerasan sosial yang telah merenggut nyawa beberapa tahun yang lalu.

Perubahan itu masih diperparah dengan dampak globalisasi yang diyakini banyak kalangan sebagai penjahat dengan wajah baru. Globalisasi ini telah dirumuskan sebagai sistem yang menguntungkan sebagian kelompok yang kuat saja, terutama perusahaan multinasional yang berasal dari negara maju. Selain itu, sistem dalam globalisasi juga menunjukkan bahwa negara maju menggunakan sistem pasar bebas sebagai bagian intrinsik dari globalisasi untuk menguasai ekonomi dunia dan tidak benar-benar mempersiapkan diri melakukan praktik pasar bebas.¹ Dalam kondisi seperti itu masyarakat di Dunia Ketiga akan kian terpinggirkan dan hidup dalam ketidakadilan. Dalam konteks Indonesia, komunitas Awam yang sebagian besar masih hidup dalam keterbelakangan akan semakin terpinggirkan global yang kian parah.

¹ Lihat Hito Jendek, "Persepsi Komunitas Perdagangan Dunia Asal Globalisasi untuk Menundukkan Dunia Ketiga" dalam *Jurnal Wacana* [Edisi 5 Tahun 3 2002] hlm. 68.

Bercermin pada keputusan pada saat-saat sebelum, sesudah, dan saat keputusan rezim Orde Baru, ketika kekerasan telah meluhurkan korban kemahorbanan bangsa Indonesia dan kebebasan menjadi fenomena keseragaman masyarakat, tragedi serupa bukan tidak mungkin akan merujuk kembali di negeri ini. Bahkan kekerasan dan sepiusnya bisa jadi akan mengalami eskalasi yang lebih mengerikan. Asumsi ini bukan sekadar mengada-ada, tapi didasarkan pada kondisi objektif yang dialami kalangan masyarakat luas. Saat ini masyarakat bawah berada dalam kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Selain mereka tidak memiliki aset, seperti tanah dan ketuluran, yang nyata ditemui di berbagai daerah, mereka juga sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mereka akibat melambungnya harga-harga kebutuhan pokok yang kian hari kian tak terjangkau. Ketidakberdayaan, bahkan mungkin keputusan akhir yang telah menggejutkan mereka, akan meruntuhkan mereka frustasi yang pada gilirannya akan melahirkan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi sebagai capaian kekerasan ekonomi massa di tingkat bawah.

Sebagai gerakan terbesar umat Islam di Indonesia, Aswaja seharusnya memiliki kemampuan untuk

¹ Ego Samudra Falaq, "Kekerasan Politik Abu Nasya dan Resolusi Mawla dalam Arafat Subhan (ed. mooneba dalam Translasi Mawla, Chomelaw Ceban, Jakarta, SAF 1999) hlm. 21.

melaikan langkah angkah antisipatif dan memben-kan suatu tawaran menceraikan yang dapat mecapai kan masyarakat dan belunggu perwalian yang meati mereka. Seandainya perwalian tu ndak mungkin diselesaikan, masyarakat minimal menvadan bahaya yang mengancam mereka dan ndak mengambur isan pantas dalam bentuk penggunaan kekerasan dan seterusnya yang ndak akan pernah menyelesaikan perwalian.

Aswaja Sebagai Sistem Nilai

Kemampuan Aswaja dalam menvika perwalian perwalian besar kemanusiaan sangat tergantung pada pola penvikaan komunitas terutama kalangan ulama dan intelektualnya terhadap Aswaja. Penerunaan mereka atas Aswaja sebagai *mad-hat asyidi* akan akan ndak akan memberikan suatu kemampuan maksimum dalam menghadapi perubahan sosial dan kehidupan yang berjalan begitu cepai. Sebuah rumusan fiqh yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu akan ndak memadai untuk menjawab semua perwalian yang terjadi saat ini. Upaya untuk menjadikannya sebagai *mad-hat ma-hat* mungkin sampai derajat tertentu, akan mem-berikan jawaban yang lebih memuaskan. Tetapi bukan

* Kiri MA. Sahar Ma-hat. "Sebuah Ma-hat I dan Ma-hat Ma-hat MA. Sebuah Ma-hat Ma-hat" neri .

betapa hal itu tidak mengandung persoalan-persoalan yang cukup substantif. Keberadaan *Aswaja* dalam bentuk yang terakhir itu mencerminkan adanya konsepsi epistemologis, prosedur, dan pengetahuan analisis berdasarkan kerangka metodologis sebagaimana yang telah dibakukan para imam madzhab. Sama seperti rumusan rumusan fiqh yang mereka isyarkan, metodologi yang dikembangkan para imam madzhab tersebut juga memiliki keterbatasan yang berujung kepada eksistensi mereka sebagai manusia biasa yang hidup dalam suatu zaman tertentu yang jauh berbeda dengan zaman dan kondisi saat ini. Dengan demikian, penggunaan metodologi mereka secara ketat akan melahirkan produk dan rumusan yang relatif kurang inovatif dan kurang mampu menjawab kompleksitas persoalan umat manusia kontemporer.

Prinsip kelentaran yang ruwet itu memerlukan pemelaksanaan mutakhir yang seharusnya melibatkan beragam keilmuan kontemporer semua tenaganya, filsafat, antropologi, etnologi, dan ilmu-ilmu lain yang, untuk sementara, harus memandang dan khazanah keilmuan Harat Idjara sebagai *kearifan* itu, pemakaian kemoulu *Aswaja* secara lebih holistik dan integratif perlu diperbaiki, dipertahankan sebagai tawaran. *Aswaja* perlu dikembangkan dari *mad-hab aswaja* dan *muahab* menjadi sistem nilai sebagai sistem nilai yang terdiri dari nilai-nilai, keseimbangan, proporsionalitas dan seterusnya), paradigma itu dijadikan landasan dalam keseluruhan

proses *litabāt* hukum atau rumusan ketentuan yang akan ditetapkan.

Keterbacaannya sebagai sistem nilai ini meliputi hukum Aswaja bernilai agribudaya sebagai acuan dalam melakukan analisis sosial, rencana strategi, dan dalam proses konkret dengan karakteristiknya yang transformatif dan lebih dinamis yang dapat menangkap setiap getas sosial persoalan dan menyentuh isu masalah. Hal yang diharapkan dan semua itu adalah lahirnya suatu pandangan yang kritis dan humanistik serta berkembangnya kekuatan yang dapat membentukkan nilai-nilai Aswaja dalam kehidupan konkret.

Dalam mengaplikasikan Aswaja, aspek historisitas dan kontinuitas menjadi matrik untuk diperhatikan. Dengan demikian, metodologi, rumusan hukum, dan sebagainya, yang telah diwariskan para ulama mazhab atau dan ulama-ulama saat perlu dikembangkan secara apresiatif serta dipadukan dengan disiplin keilmuan kontemporer sehingga dapat melahirkan konstruksi atau pandangan konseptual yang berwawasan luas dan akurat serta dapat mengembangkan kerja kreatif inovasi yang kontekstual dengan perubahan kehidupan saat ini.

Pada akhirnya, Aswaja sebagai suatu sistem nilai akan menjadikan transformasi sosial (dalam pengertiannya yang luas) sebagai wilayah garapan yang sama sekali tidak boleh dabaikan. Pengabdian terhadap hal

itu sama dengan pengingkarannya atas nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Begitu proses transformasi sosial sehingga merupakan akuisisi dari nilai keseimbangan antara individu dan kelompok dan antara masyarakat, *the state*, dan negara. Dengan demikian, kehidupan yang mencerminkan kedamaian, kerukunan, keadilan, dan kesejahteraan diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata di masyarakat luas.

ISLAM PRIBUMI: Lokalitas dan Universalitas Islam dalam Perspektif NU

Wajah kental yang mewarnai sejarah perjuangan Nahdhatul Ulama di bumi pertiwi ini, salah satunya, terletak pada upaya yang terus-menerus untuk melakukan kontekstualisasi nilai-nilai Islam secara kreatif ke dalam kehidupan konkret yang dialami umat. Melalui dialog dengan ruang dan waktu yang mengitarinya itu, Islam yang dikembangkan NU menjadi Islam yang bersuara *mahabbah* yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan riil yang dialami masyarakat sehingga diterima secara relatif mudah oleh mereka, dan menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan mereka.

Dua hal Islam dengan kehidupan berselat seperti ini merupakan realitas yang terus menerus menantang upaya ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dalam suatu dunia yang relatif hampir budaya. Realitas kehidupan ini, duniawi atau duniak, memiliki peran cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangan aktual sehingga dapat memunculkan peradaban yang diperhitungkan masyarakat dunia.

dan komitmen untuk membentukkan nilai-nilai Islam ke dalam ruang dan waktu yang dialami manusia. Dengan demikian, NU meniadakan Islam sebagai sesuatu yang sama sekali tidak asing bagi masyarakat, dan sekaligus tetap tidak kehilangan karakteristiknya yang universal sebagai nilai-nilai yang bersitas transenden dan abadi.

NU Menapaki Sejarah

Kehadiran NU dengan waris Islamnya yang bernafas jihat merupakan satu wujud keprihatinan terhadap menyebarnya Islam yang apokaliptik dan pluranta kehidupan. Pemahaman atas Islam yang diembungkan revivalisme pre-modernitas yang numid dan berkem yang tetap abad kehidupan benar terbetuk dikalam sebagai terapan atas kemerdekaan masa mereka masyarakat Muslim yang terdapat saat itu. Kelompok ini melihat bahwa kemerdekaan itu terpadu akibat umat Islam telah menimpang dari ajaran Islam yang benar. Sebagai solusinya, mereka pun menverukan kembali pada Al Quran dan Sunnah Rasulullah. serta pada saat yang sama, menanggapi kan segala hal yang dianggap bid'ah. Tapi semangat kembali pada sumber sumber asli diformulasi dalam bentuk pemberdayaan kurikulum pendidikan dan *de-emphasis* terhadap warisan intelektual abad per-

tengahan sehingga terjadi pertukaran in elektua
Demikian pula, universalisme Islam yang selama ini
mereka kembangkan dimutakhirkan ke dalam bentuk
penyంగ်ການ terhadap aspek aspek masalah yang
muncul pada kehidupan umat di berbagai tempat dalam
sepanjang sejarahnya.

Berkembangnya kelompok radikal ini telah mem-
buat Islam terputus dari tradisi dan khazanah intelektual
Islam yang begitu kaya manusia. Banyak dimensi
petualangan Islam klasik, tradisi atau warisan budaya
Islam, serta budaya masyarakat dihapus serta akan
sebagai sesuatu yang tidak sesuai. Para pendang seperti
itu, pada akhirnya, menggangg mereka kepada upaya
memusnahkan atau minimal mengiklarkan warisan

lihat Faruk Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity* New York: Lons River 1994, hlm. 1. Meskipun Muhammadiyah bukan merupakan gerakan revivalis murni tapi lebih bersifat integratif, antara konservatisme dan modernisme klasik pada sisi satu berd. nya kelompok ini bergeting dalam menjaga budaya lokal Islam asli akhir ini penuka mekah Muhammadiyah juga berkeag akan melurus terhadap budaya lokal lainnya. Amin Aqurrah salah satu tokoh PP Muhammadiyah dan Yogyakarta menegaskan dalam pertemuan para penuka muda Korpri 3 Cuko tanggal 27-28 Mei 2002 tentang signifikansi kearifan budaya lokal untuk pengembangan Islam. Hal ini menunjukkan adanya keberpiakian terutama kaum muda Muhammadiyah yang berusaha berkeag akan budaya dan keryakian kehidupan yang dalam masyarakat. Walaupun demikian gagasannya masih mendapat tantangan dan kerangan seribu karena paradigma Muhammadiyah sangat memelankan pada universalisme Islam.

atau budaya tersebut dari lingkungan keragaman
slam.

Pada keberagaman seperti itu, selain tidak mampu
menentukan masyarakat akar rumput yang dalam
kehidupannya masih dipengaruhi dan sangat dipengaruhi
tradisi dan budaya lokal, juga akan menimbulkan suatu
kurang responsif dalam menangkap kebutuhan dan
perubahan lokal yang antara satu dengan yang lain ber-
beda beda dan sangat beragam. Walau alam sebagai
rahmat tuag seluruh alam akan ketuhanan serta aman-
nya dengan kenyataan kehidupan yang dialami umat
manusia.

Menyikapi hal itu, NU sejak awal berdirinya me-
nunjukkan sikap teguh untuk mengimplementasikan Islam
dalam konteks kehidupan yang tidak tunggal serta
di dalam seluk beluk problema yang dihadapi umat
alam. Dengan kata lain, masyarakat yang beragam yang
sistem sosial dan keterbelakangan merupakan salah
satu subjek utama tujuan berdirinya organisasi
Konsep Muhammadiyah al Jama'ah Aswaja NU yang
direspon oleh para tokoh pendiri, yang dikaitkan
dengan upaya untuk pengembangan sosial ekonomi,
budaya, dan pendidikan merupakan bukti konkret
pernyataan ke NU terhadap Islam yang beradaban
lokal dan memiliki apresiasi yang sangat tinggi terhadap
tradisi.

Keberpegangan **N** kepada paham Ahlul-Sunnah wal Jama'ah dalam bentuk bermadzhab harus dimaknai dalam konteks tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk membina dan puhkan keberagaman sesuai kondisi objektif yang dihadapi masyarakat luas saat ini. Sebagian besar masyarakat dengan segala keterbatasannya diberikan pilihan untuk mengamati salah satu aliran sesuai kebutuhan kebutuhan mereka. Selain itu, keputusan bermadzhab telah didasarkan kepada upaya menentaskan dengan cara kritis dan rasional mengemban tradisi Ahlul-Sunnah intelektual Islam. Pilihan mengamati madzhab madzhab tersebut juga didasarkan kepada suatu keyakinan bahwa aliran aliran tersebut mencerminkan suatu madzhab sebagaimana diartikan Al-Wad'ah dan menyampaikan lebih dari sekedar satu salafiah. Dalam konteks itu pula, pertukaran dan gagasan para ulama tersebut merupakan kontribusi

Dalam tradisi keilmuan-keagamaan yang disebut **U** (Ulum Ahlul-Sunnah wal Jama'ah) Asma'iyah memiliki karakter berbeda yang berbeda-beda harus dipersepsikan dengan paham Sunni di kelompok yang lain. Menurut para ulama NU yang kemudian menjadi aliran NU, paham Asma'iyah adalah paham yang berpegang teguh kepada tiga aliran ini: mengikut paham al-Ash'ari dan Imam al-Maturidi dalam bidang teologi, dan mengikut aliran aliran sufi, seperti aliran aliran Mawlawi, Syafi' atau Hanbali dalam bidang fiqh serta mengikut aliran aliran aliran Imam al-Ghazali dan al-Jawid dalam tasawuf. Dalam perkembangannya Asma'iyah ini sebagaimana akan dijelaskan berikut, dapat dipersepsikan Ahlul-Sunnah tanpa harus kehilangan esensinya yang substantif.

sis: dan pemertuan nilai-nilai Islam yang diwariskan Nabi ke dalam sejarah.

Keberagamaan seperti di atas menjadi acuan yang akan mempengaruhi sikap Islam dalam upaya dan mengemban kehidupan masyarakat dan membahagi-negri ternama. Dalam melakukan perubahan, organisasi keberagamaan ini selalu berangkat dari tradisi dan segala sesuatu yang sudah mengakar dalam masyarakat. Budaya baru yang sangat mengikat seluruh melalui ziarah kubur—oleh kelompok Islam punter dianggap perbuatan syirik oleh para ulama. Islam tetap dipertahankan. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, nilai-nilai baru mulai diintegrasikan ke dalam kegiatan tersebut. Konsep *kutubah* melalui ziarah kubur yang dahulu dianggap diperoleh dari orang yang berada dalam kuburan yang diwarisi itu dimaknai lagi sebagai peringatan *kutubah* langsung dari Allah. Sebab melalui ziarah kubur itu, si peziarah menunjukkan penghormatannya kepada Allah dengan mengimbu keimanan dan nilai kehidupan dan kematian yang diemban dalam upacara ziarah kubur tersebut. Pada sisi ini kita melihat intensitas upaya Islam dalam mengapresiasi budaya-budaya di masyarakat dan menjadikannya sebagai salah satu unsur dalam pengembangan dan pemberdayaan mereka.

Abdurrahman Warid: *Islam di Tengah Pergumulan Cendekia* 1, Jakarta: Lentera, 1998—hal. 81.

Pada semacam itu pula yang dikembangkan N. dalam merumuskan pandangan politiknya. Sebelum penudukan Jepang, N. telah mengakui penguasa Belanda sebagai pemerintahan di atas, yang berhak atas, meski bukan Muslim, selama masih memberikan ruang angkas dan akal bagi umat Islam untuk memajukan agama mereka. Ketika Jepang mengakhiri pemerintahan Belanda dan digantikan pemerintahan pribumi N. mengakui para pemimpin Republik sebagai pemimpin muslim yang sah. Pada saat itu ketika Belanda ingin kembali menguasai N. melihat bahwa Belanda dan sekutunya merupakan musuh-katolik yang berusaha meniadakan pemerintahan muslim yang sah. Sehingga disekutusnya pada 21 dan 22 Oktober 1948 waktu-waktu yang N. dan seluruh Jawa dan Madura berkejaran di Madiun dan kemudian di Jakarta. Revolusi yang dilakukan perlawanan kemerdekaan sebagai had, perang itu. Revolusi ini dilakukan kembali pada Muatartar N. yang pertama setelah perang Maret 1948.

Kiprah N. tersebut memperlihatkan upayanya untuk menggandengkan Islam dengan kemajuan nyata ang dirasakan masyarakat. Proses pengalihan

1. H. M. van Bruening, *de Trade Missionen tussen Perzische Indische Baru Ceylon*, Yogyakarta: L.S-Pustaka Pelajar, 998, hal. 8.

Islam dengan kembarannya sejarah ini di akhiri tidak akan pernah mengukir dan, kemudian sekadar mengubah manifestasi dan kehidupan agama sam Dengan demikian nilai nilai yang substantif tetap ter jaga dan mampu menjawab kehidupan dan permasalahan yang sama. Islam mampu menjawab tantangan zaman alternatif yang selalu datang yang menantang umat ketika kebutuhan dan persoalan masyarakat mengalami perubahan, maka nilai nilai islam akan di wujudkan dan diwujudkan dalam pemertakapan yang seragam pada dan bentuk yang ada serta umunya mampu harus menegakkan prinsip prinsip yang dari nilai substantif ajaran sam

Bahan untuk reruntuhan ke paku-pakuan dengan menyediakan dirinya sebagai partur penarik pada 1-52
ke arah bagian bawah. Van der Aar dan Ingkavati
A. pada 1-52 menunjukkan bahwa Mawardi N. pada
dalam tersebut menghasilkan suara 84 - akan seluruh
suara yang sah dan menjadi partur ketiga terbesar
setelah 1-52 dan Mawardi dan pada Perulu 107
menjadi partur kedua terbesar dengan perolehan suara
seharuskah 67% N. selangannya memenangi peluang
kefungsian untuk mengaktifkan sistem secara utuh
nilai nilai kesamaan yang selama ini diabaikan.
Sebagaimana dikatakan Abdurrahman Wahyu

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa di kelas IPS SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode kuadrat terkecil (t_{hitung}) dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa di kelas IPS SMP Negeri 1 Kota Cirebon.

keberadaan N¹ sebagai pusat politik dan tahun 1952

1984 cenderung bementakan taktis tidak berlandas pada kejelasan strategi. Sebagai solusinya, kedudukan N¹ sangat berpengaruh oleh perkembangan sosial dan agendanya akan dibarengi dan ditentukan dari luar. Di samping itu, hal yang telah memengaruhi adalah terbenyungannya karena kerja sosial budaya N¹ yang telah diamatikan sejak awal oleh Qanun Asas.⁴ Terlepas dari beberapa keberhasilan yang dicapai selama berpolitik praktis, semua sikap kritis yang sering kali ditunjukkan kepada penguasa, N¹ harus meninjau ulang ke maha ulian bentuk kekurangmampuannya mengembangkan pemukiman pemukiman dan praksis kesegitamaan yang kontekstual yang sebenarnya sangat diperlukan masyarakat kita.

1. Laili Muhammad AS Hidar. *Kritik dan Pengujian Civil Society di Indonesia*. Sebuah Rujukan Historis. Bandung: Alfabeta, 1984. Jilid I, page 44. Darius ed. Gus Du. HL dan Masyarakat Sipil Cendek. Yogyakarta: LKIS-Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 140.

- 4. Menurut demikian, angkah politik praktis N¹ itu harus memahami berbagai konteks yang ada dan keberfungsian sebagai halm yang kontekstual. Sejarah sosial itu yang sampai derajat tertentu dapat berakumulasi karena sebagai yang disebut Hidar: dan tidak berkembang N¹ sendiri menurut N¹ untuk berakumulasi dalam bentuk itu. Oleh karena itu, kita bisa berakumulasi sebagai masyarakat. Keterperampasan organisasi tersebut dalam skala yang eksistensial. Untuk hal yang lebih penting yang harus diungkap adalah menjabarkan sejarah itu sebagai bagian refleksi-kritis untuk mengembangkan N¹ ke depan.

Kritik dan Peneguhan Visi dalam Pribumi

Tahun 1984 merupakan momen sangat menentukan bagi NII dalam menegaskan kembali visi dalam Pribuminya. Kembalinya NII pada tahun itu ke Jakarta 1926 telah mengantarkan organisasi keagamaan terbesar Indonesia itu ke posisi yang sangat strategis untuk mengembangkan pemukiman-pemukiman alternatif dan kemitraan-kemitraan yang dapat mewujudkan visi keadilan yang berorientasi pada perubahan dan perkembangan yang terbuka dan dinamis secara umum, dan umat Islam, secara khusus.

Posisi Jakarta benar-benar menjadi strategi karena secara fisik NII dia struktural oleh dua NII Anshad Walid, Alaturrahman Walid dan Alid Alid yang sama-sama memiliki akar dan wawasan intelektual yang tidak diragukan lagi serta memiliki kepedulian besar dan visi transformatif untuk pengembangan organisasi dan bangsa Indonesia ke depan. Keberadaan kedua tokoh diamanatkan di posisi tertinggi organisasi ini berimplikasi kuat dalam pembentukan wacana dan praktik alternatif yang mencoretkan bukan saja huyus wuyus Nihilisme-ketata, tapi juga daya bangsa secara keseluruhan.

Salah satu gerakan yang dilahirkan sejak kembali ke tanah air yang geraknya itu adalah pengembangan dan orientasi kapang sayatan peradilan kagamaan yang

telah dikenal dengan sebutan *kuṭub al-madī* — orang yang telah seruan lama itu dikenal dalam bentuk baru dengan menggunakan pendekatan persoalan aktual baik yang bersifat keagamaan maupun maupun yang berkaitan erat dengan persoalan kehidupan dalam berbagai aspeknya.

Di samping itu, suatu bentuk tulisan kitab dalam bentuk yang agak lain juga mulai diperkenalkan. Berbeda dengan *kuṭub al-madī* yang konvensional, tulisan ini sesuai metode tulisan, dan penulis muda, juga memiliki tujuan cukup "bertani" yaitu mengembangkannya cara pemahaman kitab yang lebih aktif dan fungsional di lingkungan masyarakat perantauan, serta memberikan kaitan intelektual terhadap konsep-konsep keagamaan yang terdapat dalam khazanah kitab-kitab asal kuning. Forum ini memberi angin baru bagi anak-anak muda "N" yang pada masa-masa sebelumnya kurang mendapatkan ruang yang pas dalam menuangkan gagasan-gagasan mereka yang "nakal" "baca brisan" "sejauh itu" di kalangan mereka ada ketidakpuasan yang terus berkembang terhadap bentuk maupun substansi khazanah fatwa yang dikeluarkan ulama senior yang menurut anggapan mereka hanya problem yang diangkat sudah tidak lagi relevan serta pada saat yang

* Abdul Mukti Dz. "Barbarisme & Tragedi Akademi Muslim Tradisional" dalam *Jurnal Gelombang* 12 (2002), no. 109-110

sama problem problem sosial penting diabaikan.” Dukungan Gus Dur terhadap angklub-angklub generasi muda Negeri telah melahirkan metode dan substansi bahasan yang dapat diartikan melampaui pengetahuan tradisional. Dengan pendekatan ilmu ilmu sosial kontemporer mereka mencoba mengasah analisis kritis yang telah lama dengan isu-isu yang sangat mendesak dan relevan. Dimensi dimensi aktualitas dan kekinian yang di tanggap para ulama sangat sering terabaikan atau terkadang terbentur persoalan yang dianggap *menjeret* dalam serentahan pemahaman anak anak muda Negeri produk itu dipersejajarkan dan dianalisis secara kreatif sehingga menghasilkan suatu *konsep* atau *konsep* yang lebih bermutu.

Sebagai misal, Mardiyah Mas'udi dan kalangan muda Negeri menawarkan gagasan tentang penguatan zakat sebagai alat demokratisasi dan kontrol terhadap kekuasaan negara. Konsepnya yang dikemukakan di dalam buku *Agenda Keislaman Reformasi Zakat* adalah berupaya meniadakan pajak dan/atau sebagian zakat sehingga mereka yang sudah memisalkan zakat perlu mengeluarkan zakat. Meskipun zakat telah dibelikan negara, pengeloaannya harus dibayar oleh dua kali pemerintah, yakni pemerintah yang bersih dan

* Lihat Mardiyah Mas'udi dan kawan-kawannya, *Agenda Keislaman Reformasi Zakat* (Penerbit Alfabeta Baru), hal. 220.

Anda adalah tanggungjawab rakyat yang disebut dengan masyarakat apa?

Legaslan tersebut sangat terkait dengan persoalan keanonisan kontemporer khususnya di era Orde Baru yang telah meletakkan negara dalam posisi yang sangat dominan sehingga tidak ada satu ruang pun untuk penciptaan *heretang posisi* bagi masyarakat di negara. Setelah pemaknaan zakat sebagai pajak, demokratisasi dan segala *other* atau tujuannya diharapkan berkembang di negeri ini. Menjelaskan hal ini Mardas menyatakan, sebenarnya konsep yang ditawarkan Islam adalah pemaknaan pajak sebagai zakat atau sedekah untuk Allah yang didistribusikan bagi semua rakyat tanpa memandang perbedaan etnis, agama, atau gender dengan prioritas bagi kaum fakir dan miskin. Hal ini sebagaimana diuraikan akan ayat *“Dan surai di antara bahwa Allah semata yang berhak mengampuni dosa manusia dan yang berhak memungut pajak. Agar ini mengesepukan bahwa kamu bukan milik penguasa, tetapi milik Allah, dan yang berhak memungutnya hanyalah Allah Oleh karena itu, ketika pemerintah memungut pajak maka ketiakar tu harus dalam rangka pada mandat Allah dan sekau gus menurut norma yang telah ditentukan Allah*

* Lihat Hendro Pratomo As Munand dan team dan Civil Society Panjang Muslim Indonesia Cetak: Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama PPK-AMN Jakarta (2002) Nm 13

[illegible]

Dalam perspektif Δ terdapat banyak permasalahan
 namun dengan pengamatan dan observasi langsung
 maka akan terdapat banyak permasalahan yang dihadapi
 dan pada akhirnya akan menghasilkan solusi yang lebih baik.

[illegible]

latar belakang kehidupan bangsa yang berbeda dan bangsa-bunga di negara-negara lain. Berdasarkan hal itu, konsep *one world* di Indonesia harus diadopsi kritis terhadap konsep *one world* yang berasal dari Barat dan konsep masyarakat madani yang berasal dari jalan reformasi, sebagaimana pula kritis terhadap realitas kita sendiri (bangsa Indonesia), dan bahkan kritis terhadap sistem kultur dan sistem pemikiran agama (keberagamaan, *etc.*) kita yang berkembang pada masa lalu. Dan kritis itu, kita sepenuhnya bisa mengarahkan persoalan besar yang sebenarnya dalam masyarakat dan kultur kita. *One World* sebagai kritis ini, perlu dimusyawatkan kepada keragaman budaya masyarakat yang bersifat perennial yang senantiasa serasi dengan nilai-nilai agama yang hakiki. Pengembangan *one world* dalam kerangka semacam itu pada gilirannya akan mengantarkan bangsa, terutama umat Islam kepada kemampuan untuk mengafan problem mereka yang konkret.

Tawaran yang datang Nalar, sangat derajat tertentu, merupakan upaya pemaknaan yang ah secara substansial. Nalar ah, memampukan ungkapan Nalar merupakan varietas integrasi masyarakat sehingga manusia dapat memperoleh makna telagius kepada hidup

* Lihat Ahmad Baso, "Islam dan 'Civil Society' di Indonesia: Dari Konservatisme Menuju Kritis", *Black Agenda Journal*, Tashkent, April (Edisi No. 7 Tahun 2000), hlm. 18.

keseharian mereka, sehingga dapat memvatukan kehidupan mereka ke dalam nilai-nilai spiritual.⁴ Nilai-nilai universal yang ada ini diintegrasikan ke dalam pemahaman kehidupan yang bermakna awal dan sempurna sehingga keberadaan agama sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dapat ditangkap maknanya dalam setiap ruang yang sangat beragam dan waktu yang terus berjalan tanpa harus mengedepankan atribut legalistik agama.

Seiring dengan segala kekurangan dan ketidaktahuan yang dimilikinya, telah berupaya melakukan suatu upaya bagian yang nyata intrinsik dari budaya budaya masyarakat Nias dan ajaran Islam yang substantif diintegrasikan ke dalam praktik-praktik pada masyarakat Nias. Berupa dan kaitannya dengan segala aspek etika yang menyertainya. Di sini, suatu pemahaman menemukan arti signifikan dalam pengembangan pendidikan kepada kepentingan warga Nias dalam dan umat Islam secara khusus serta bangsa secara keseluruhan.

Aswaja, NU, dan Konteks Keislaman

Kemampuan Nias dalam menangkap realitas dan memahami kehidupan, sampai derajat tertentu, terletak

⁴ Sayyid Hossein Nasr, *Islamic and Revival of Islam* (Edisi Kedua), London: George Allen & Unwin Ltd, 1975, hlm. 96.

pada paradigma keberagaman yang dianutnya keberagaman Islam yang sangat terdapat di dalamnya, dan memberikan ruang cukup luas bagi pengembangan potensi dan kreativitas untuk bisa mengakomodasi situasi bersesuaian dengan konteks persoalan yang dihadapi umat manusia. Dalam kerangka Awwa ini, ulama dan intelektual dan kalangan *Ulema* memaknai nilai-nilai Islam dan menjadikannya sebagai norma yang mencerahkan kehidupan bangsa, dan terutama warga Nahdliyin sehingga mereka mengalami pembebasan dan segala belenggu yang akan meroduki nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Kelenturan Awwa dapat dilihat dari pemuatannya yang ditawarkan oleh para ulama *NU* dan para tokoh intelektual sepanjang sejarah yang diikutinya. Sebagai suatu kelompok, Awwa merupakan kelompok umat Islam yang berupaya merujuk kepada Sunnah Nabi yang kemudian diwaris dan dikembangkan oleh para sahabat, terus diformulasikan lebih jauh oleh generasi-generasi muslim penerus mereka. Dari perkembangan sejarah tampak bahwa benang merah yang menghubungkan keberagaman mereka terletak pada pola yang mereka kembangkan yang bersifat *orthodox middle road*¹ yang bisa dibaca pada metodologi mereka

¹ George Makdisi, *Islam and the Secular in Islamic Religious History*, dalam George Makdisi, *Religion, Law and Learning in Classical Islam* (Cambridge: Harvard, 1991), hlm. 51.

yang mencirikan secara utuh antara *as* dan *wasu*, dan pola pandang moderat atau keberagamaan dan kehalusan dalam beragama dimensinya. Satu-satunya yang harus mereka yang mencerminkan sikap dan perilaku serta berada pada titik titik di antara dua ekstrem merupakan arti *Aswaja* sebagai prinsip dan pandangan dasar.

Intinya, *Aswaja* dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip yang selalu mengedepankan nilai-nilai dan pola moderat, proporsional, toleran, dan utuh. Dalam perspektif ini, *As* menangkap hal-hal seperti *Ja'at* atau nilai *Aswaja* menemukan titik kesatuan secara sistematis pada pola keberagamaan yang harus dari diembangkannya ulama-ulama madzhab *Asy'ari*, dan lain-lainnya. Sedangkan secara *As* menunjukkan hal-hal yang khususnya yang kutublah menjadi pegangan ulama dalam hal menyikapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat karena dalam beragama para ulama tersebut telah mengembangkan tidak hanya keputusan hukum agama dalam skala mustahil melainkan juga menyelesaikan metode penyelesaian persoalan hukum dan teori hukum yang mulai disistematisasikan oleh Syafi'arrah dan *Abad* yang lain. Pemikiran

* *Ustadz Said Asyraf Syarif, "Analisanya atas Jurnal di Aswaja Abad XX dalam Islam Sa'atq" in Kontroversi Aswaja: Antara Persepsi dan Realitas, Cengiz (Tegayakarta: IKS 1999), hlm. 136.*

hukum itu diwujudkan ke dalam kerangka konstitusional. Apakah kita yang punya peran menentukan bentuk keputusan hukum yang pada dasarnya kita tidak dan penguasaan yang melatarbelakangi sebuah peristiwa sedang atau telah mengalami perubahan. Dengan demikian, pengembangan hukum akan menemukan dinamika meskipun masih dalam kerangka batasan yang tetap masih tetap.

Hal yang diutamakan telah menentukan NI dalam bentuk strategi, tapi kadang-kadang juga sebagai nilai-nilai universal Islam dapat diwujudkan ke dalam suatu kebiasaan dan tempera yang benar. Islam menyebarkan yang sangat dengan muatan budaya yang beragam. Hal yang disebut Islam pada dasarnya adalah dan kenyataan bahwa Islam dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tapi ke dua-duanya mempunyai wilayah yang tumpang tindih. Interaksi tersebut akan berinteraksi terus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan masyarakat. Tidak gerbang yang pada umumnya akan memungkinkan adanya persentungan antar berbagai kelompok.¹⁰ Akibatnya, hal ini dilakukan dalam

¹⁰ Abdurrahman Wahid, "Machfuz Ulama dan Islam di Indonesia: Dewasa ini" dalam Fauzi Abdullah dan Sharon Sadeque (ed) *Praxis dan Keberagaman Islam di Asia Tenggara* Cetakan I, Jakarta: LPJES, 1989, hlm. 198.

¹¹ Lihat Abdurrahman Wahid, *Pengantar Negara, Agama, dan Kebudayaan*, hlm. 100-110.

tingkat menjadikan Islam benar benar membumi dalam setiap ruang dan waktu yang diuamnya. Di sini, moderasi dan toleransi bebas keberagaman organisasi yang didirikan oleh KfI Hassan Asy'ari itu menjadi tampak jelas dan transparan, sebuah sikap yang menjadikan kelompok itu sangat memperhatikan prinsip-prinsip kesumbangan dan kevederhanaan yang dalam diskursus modern disebut dengan nilai nilai demokratis.

Berdasarkan hal itu, keberpegangan pada mazhab mazhab tertentu itu merupakan suatu kepenggunaan yang terbuka. Hal itu tampak dan terbelak di kalangan ¹⁴ dalam memahami hal tersebut. Sementara ulama NU ada yang meletakkan Aswaja sebagai *mau hu aswaja* sebagai bagian yang lain memahamti *mau shaja madhab mauhu* sebagai *madhab aswaja*, namun ada pendapat salah satu dari empat ulama mazhab menurut ketentuan yang harus diikuti oleh kalangan ¹⁵ sedangkan sebagai *madhab mauhu* ulama ¹⁶ tidak lagi harus menujuk kepada ketentuan para ulama tersebut, tapi lebih kepada metode metode yang mereka gunakan dalam melakukan keputusan ketentuan tersebut. ¹⁷ Dengan demikian, metode se-

¹⁴ Di era moderasi NU tampak dengan jelas. Dalam tradisi NU perbedaan zaman periode-periode agar seperti itu dianggap sebagai hal yang biasa. NU secara seimbang tidak zahir atau terang melakukan fusi dan meskipun mungkin ada sebagian ulama NU yang menganggap pendapat orang lain

macam *sihida*, masalah *masaiah* atau *amirah* yang selama ini masih jarang mendapat apresiasi akan mendapatkan tempatnya yang layak dalam pengembangan pemikiran keagamaan di kalangan warga Nahdhiyin. Melalui pada pengembangan *Aswaja* sebagai *reborn of thought* ini ada peluang yang telah ada bagi N.L. untuk melakukan kontekstualisasi nilai-nilai Islam ke dalam realitas atau *su-ku* aktual yang sedang berkembang saat ini dan masa depan.

Terlepas dari perbedaan itu, hujh secara substantif memberikan ruang yang sangat lebar bagi masuknya budaya kita. Dalam hujh masalah *haji* misalnya, dicetuskan bahwa *al-jahid wa-halal-umrah* sehingga hukum ada yang bebas pada sekali dapat ditetapkan ke dalam hukum Islam. Jika pandangan seperti itu menjadikan hujh sebagai hukum *muamalat* masyarakat di masa di masa lampau, kemudian menjadi hukum *Nas* atau model Barat yang sekarang ini diterapkan. Melalui hujh, obrolan nilai-nilai agama dengan kesejarahan umat manusia dibutuhkan secara konkrit sehingga agama menemukan masalah yang tangguh dalam sejarah kehidupan.

setan dan sebagainya. Sep pandangan seperti itu tidak pernah akan pernah dianggap sebagai *suara* N.L. sebagai *agama*. Hal ini memungkinkan orang yang N.L. untuk menawarkan gagasan penguatan *Orde* Islam yang signifikan. Hal ini harus dihadapi oleh manusia sebagai *suara* dan *suara* dan N.L. secara kolektif.

* Abdurrahman Wahid, Pengutatan Negara, Agama dan Kepudayanatan, 38.

Pada keberagaman semacam itu menemukan signifikansinya dalam *qiyas* (analogi) sebagai salah satu sumber agama atau sebagai metode untuk melakukan perumusan terhadap norma-norma atau ketentuan keagamaan yang kontekstual dan membina. Menurut Nashr Abu Zaid, *qiyas* bagaimanapun juga, merupakan aktivitas yang sangat tergantung kepada kerja rasional dalam memahami teks-meteks atau kata. Penggunaan *qiyas* dalam salah satu teks teks agama ini merupakan media yang mengantarkan manusia dengan adanya untuk mengembangkan penanda teks-teks tersebut agar berkorrespondensi dengan waktu dan tempat tertentu dalam kerangka hukum-hukum syariah. *Qiyas* merupakan sebuah upaya untuk melakukan *istinbath* hukum. Aktivitas ini adalah wahana yang dibebaskan pada ta'wil. Penggunaan term *istinbath* dari pada istilah ta'wil semata-mata karena pengaruh ideologi, politik dalam realitasnya kedua istilah tersebut menunjuk pada satu aktivitas yang sama. *Qiyas* merupakan suatu lain-lain ta'wil dalam mata uang yang sama. Dengan demikian, penggunaan metode atau bayu sementara orang sebagai sumber hukum ini dalam NI menjadi salah satu faktor yang ikut mengantarkannya pada dinamika pemikiran yang terus tak benar-benar berhenti tetapi tetap dalam konsistennya komitmennya dalam bentuk

* Lihat Nashr Harid Abu Zaid, *Qiyasiyat al-Qiyas al-Usul al-Ahwal al-Ta'wil* (Cetakan Pertama) (Beirut: al-Maktab al-Islami al-Arabi, 1998) hlm. 203-204.

sebuah pengembangan pendidikan, pikiran, dan kerja kreatifitas, dalam arti luas, berlatar kontekstual, yang terkait dengan lokal dan ruang kondorer.

Di tangan generasi muda dan kaum intelektual yang yang sudah tau itu diharapkan menjadi motor pendorong kontemporer dalam bentuk hermeneutika² estetika, dan sebagainya. Dapat disipin pendukung seperti ilmu sains dan human

² Hermeneutika dapat diartikan sebagai seni mengartikan. Menurut Emilio Betti, hermeneutika merupakan sebuah ilmu memahami. Dikini kaitannya dengan ilmu interpretasi yang bersifat objektif atau memahami, mengatasi berbagai pemahaman dan memberikan kejelasan sumber dari beragam peristiwa yang ada pada sebuah peristiwa. Pengetahuan yang bersifat objektif memisahkan berbagai peristiwa untuk memisahkan hubungan subjek alam dan politik ke rumah masyarakat lama yang akan dipertahankan untuk memisahkan interpretasi objektif dan pemahaman yang objektif. Betti menekankan bahwa aspek penting yang bersifat kritis yang harus ada dalam proses penalaran. Aspek filosofis yaitu reflektifitas di terhadap kebenaran suatu argumen dan tak berfokus dan logis. Aspek ini bermakna efektif dalam usaha memahami berbagai fenomena untuk sumber yang sudah ada. Aspek etis. Kaitan ini diarahkan pada hal-hal yang membutuhkan sikap untuk dibenarkan, misalnya mengenai kebenaran yang tidak logis atau adanya gap dalam keseluruhan argumen yang muncul. 3) Aspek pedagogis. Aspek ini bermakna sebagai penalaran kritis dan dimaknai dalam diri pengerting yaitu ketika memahami dan menjelaskan berbagai permasalahan dan bentuk intelektual yang pengerting dan berpraktik di Aspek metodologi, teknik. Pengetahuan ini diarahkan pada pemahaman etis dari kata yang bersifat menta objek dari hubungannya dengan objek ilmu dan prinsip-prinsip yang digunakannya. Pada sisi ini objek dipandang ada artinya tanpa diarahkan dengan ilmu atau faktor eksternal lebih artinya. Kaitan aspek Reichen. Contemporary Hermeneutics. Hermeneutics as Method. Philosophy and Language (Lon-

ruara mulai banyak dipergunakan mereka sehingga tradisi, dalam beragam bentuknya, yang diwaris dan generasi generasi awal dimulakan, dalam bahasa Abu Zaid sebagai muka mereka yang dapat menguasai bukan mengunggulkan kebebasan dan gerakan, napa agar mereka dapat menjelaskan dan merekonstruksi pemahaman, penafsiran, dan agendakansi (realitas) kontemporer.²¹ Tradisi dijadikan dasar pengayaan wawasan untuk menemukan keanikan dan nilai nilai substansial yang diangkat kembali dalam bentuk dan pola yang bisa sama sekali baru, yang disesuaikan dengan rumusan kondisi dan situasi kehidupan saat ini.

Flasli perulangan itu adalah berkembangnya pemahaman atau lupakan kreatif yang dapat dikatakan sangat "berani" dan terkadang cukup mengagumkan otentik. Sebagai contoh, K. Masrur (Cangkeringan, Iogya), dengan segala kebebasannya telah memeluk masa kesenian Jajalan (yang bagi kalangan tokoh yang lain bisa dianggap kesenian yang masyuk), dan menjadikannya sebagai bagian dan budaya pesantren al-Qadir yang dipumpunnya.²² Melalui Jajalan itu, "dakwah" Islam substantif memuat dengan budaya

dan Sultan, *Manhaj Al-Islamiyyah & Kajian Fiqh* (1990) him 47 dan 49

²¹ Nashir Harnal Abu Zaid, *Ishtiqat al-Qur'an*, him 51

²² Daya tarik Islamisme itu menarik perhatian diri pada selatnya yang kreatif dan mendebarkan yang muncul dan perantara radikal (fanatik) yang dipertajam melalui memulainya roh radikal faham

memulda katan langsung, bahkan terkadang dianggap berbeda atau dianggap bertentangan dengan simbol-simbol ritual agama. Akan tetapi, bila dikaji secara arif dan ilmiah, gagasan tersebut sebenarnya berpijak secara kritis pada nilai-nilai substantif agama yang selan memuat sehingga menjadi bagian yang mematu dengan budaya.

Salah satu kelemahan lain dari ideologi yang selama ini digunakan NU terletak pada ukapnya eksplisit atau implisit dalam melihat hubungan agama dan kehidupan, atau aji dan hayi sebagai sesuatu yang sama-sama berasal dari Yang Pencipta. Oleh karena itu, kedua unsur itu pada prinsipnya tidak harus dipertentangkan, tapi menggandengkannya secara harmonis sehingga mematu dalam bentuk budaya yang benar-benar memayarakat. Hal ini berbeda dan pendekatan kaum reformis yang terkesan memisahkan laiar untuk merubah pola dan bentuk kehidupan secara vertikal serta terkesan melepaskan manusia dan eksistennya yang utuh.

Tantangan ke Depan

Kreativitas gagasan dan kerja inovatif yang dimunculkan tokoh NU tersebut, khususnya di kalangan petukar mudanya, menunjukkan bahwa bila diamati secara tekti, NU seperti dianggap Azis

lampak "modern" sedangkan kelompok seperti Muhammadiyah telah terlihat modernitas.¹ Hal ini dibuktikan dari pengamatan [Djohan I: Henda yang menemukan bahwa nggih keterbukaan pergulatan wacana keagamaan kalangan NU jauh lebih intens dan kaum muslim yang selama itu dianggap modern. Kenyataan itu terdapat lantaran di kalangan modernis pemahaman agama sudah dianggap final sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sedang bagi NU agama harus terus menerus diperbaiki dalam rangka menjawab kebutuhan dunia.² Keberagaman dalam perspektif NU merupakan dinamika yang terus berkembang, di mana norma-norma agama selalu berada dalam suasana dialogis dengan kenyataan konkret umat manusia sehingga melahirkan agama humanis yang selalu memprioritaskan kepentingan manusia yang sangat beragam.

Sebagai itu memberikan peluang cukup besar bagi NU untuk mengabdikan diri dan memberikan sumbangsih yang banyak bagi pengembangan masyarakat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berarti benar demokrasi yang agamahnya harus menjadi kebutuhan dan modal dasar untuk mencipta

¹ Arya Mulya, *Agama, Reformasi, Dinamika Interaksi dan Gerakan Baru* (1998).

² Lutfi Hidayat, *Peradaban Islam dan Civil Society: Pendekatan Muslim Indonesia* (2000) hal. 130.

nya kredibilitas dan keseragaman. Untuk melangkah ke depan, NU dihadang dengan persoalan internal yang selama ini belum diselesaikan secara tuntas. Sebagai mana pula ia dihadang problem eksternal yang kian mengencang dari waktu ke waktu.

Salah satu persoalan menantang adalah upaya memperkokoh lumen pibumi sebagai viw NU yang sampai saat ini belum terangkai secara utuh, sistematis berkesinambungan, dan menjangkau jauh ke masa depan. Realitas menunjukkan bahwa tingkat kehidupan warga Nahdhiyin, terutama yang berada di akar rumput, masih banyak yang terlencang pada sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal itu menempatkan adanya disparitas cukup lebar antara viw NU yang harus diaktualkan dan kenyataan yang tercapai di lapangan. NU belum sepenuhnya mampu menangkap secara utuh nilai dan kearifan budaya bangsa masyarakat dan melestarikannya secara memadai dengan nilai-nilai Islam yang membebaskan.

Problem lain yang juga menghadang di hadapan NU adalah adanya menara kepentingan antara politik praktis dan kerja keras budaya transformasi yang sudah ada. Masih terpaku pada fenomena yang cukup kuno di kalangan NU. Orientasi politik pragmatis dan kepentingan yang sangat terlembur di NU memengaruhi organisasi ini belum sepenuhnya terdapat secara utuh dalam pemerintahan sistematis dan tidak terentang

pengembangan dan pembendayaan masyarakat dalam arti hakiki. Model pengembangannya masyarakat belum meniadakan yang memenuhi kebutuhan aspih-Nu, tapi sekadar rintisan dari tawaran yang diumpanikan orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang cenderung hanya naungan-Nu.

Setelah perkuliahan di atas, tawaran-tawaran kreatif atau gagasan-gagasan yang diutarakan oleh beberapa intelektual-Nu termasuk masih berbentuk tembok tembok *the conceptualisme* yang masih mengikat, kurang mengizinkan seluar seluar-Nu. Dengan demikian, beberapa nu yang dianggap cukup mencirikan era memberi ruang untuk pengembangan budaya-budaya lokal termasuk tidak mendapat tempat yang semestinya untuk diapresiasi secara lebih memadai. Beberapa kalangan-Nu dalam mengikuti gagasan seperti itu termasuk terpetangkap dalam simpulaksi persamaan dan melihatnya secara dikotomis dalam kriteria normatif yang mengedepankan *judgement* benar-salah.

Pendekatan ini menjadi muncul dalam wacana keberagamaan-Nu ketika penggunaan *qiyas* menjadi sangat *high sensitive* yang seolah-olah masih mendominasi sebagian ulama-Nu. Padahal jika ditilik secara analitis, kerangka pendekatan seperti itu bertolak belakang dengan *al-maqashid al-fiqhiah* yang sangat humanistik dan meluaskan kesejahteraan manusia dengan

sebagai kecekatan sebagai wujud penubuhan syariat Islam (dalam pengembaraannya yang cemerlang, bukan formal legalistik). Para tersebut pada tataran keimanan juga berentangan dengan keberadaan NI yang sejak awal memperjuangkan Islam pabumi dengan teguh sebagai bentuk pengabdianya menjadikan Islam benar-benar bermakna bagi hidup keseharian masyarakat.

Persoalan-persoalan internal yang dihadapi NI tersebut masih diperburuk lagi dengan kehadiran umma Nasional bahkan global yang sampai derajat tertentu kini "menyumbangkan" keputihan dalam mewujudkan visi yang menjadi arutan NI. Mengukainya Islam ekstrem (Islam fundamentalis, Islam politik, atau apalah namanya) dengan Islam keharmonisan sepihak yang bertolak dari pandangan mereka tentang universalisme Islam, tepat atau salah pada akan memberangus keberaduan Islam lokal yang selama ini diperjuangkan NI. Pengingkaran mereka terhadap nilai dan kehidupan telah mengantarkan kelompok garis keras itu ke dalam pandangan yang memisahkan budaya budaya yang bertentangan di sudut satu sisi, termasuk di seluruh permukaan tanah, sebagai yang heterodokus yang harus dienyahkan dengan berbagai cara, mulai dari yang beresat persuasif sampai penggunaan kekerasan. Dalam realitasnya kelompok Islam ini lebih sering menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Perubahan kan jadi muam karena keterpakuan Islam garis keras dalam simbol-simbol agama. Ne beragama yang ngud itu mengantarkan mereka untuk menilai eksistensi aislaman dan angk simbol dan lepu yang berulat permukaan Pancasila. karena tidak mengukung secara tegas simbol-simbol Islam, dupeyakan, melalui cara yang sangat beragam, untuk dipinggirkan dan kehidupan bangsa Indonesia. Ber samaan dengan itu, mereka pun menverukan ahgenti pemberlakuan syar at Islam yang sepuh itu dilakukan dalam konstruk yang berulat penampakan ahunah yang belum menentukan nilai-nilai keberagaman yang hakulu. Keberlangsungan dan meluasnya fenomena semacam itu akan membuat banyak dan karya rintahan yang telah dilakukan NI, menjadi mentah kembali. Sebagai misal, pandangan NI tentang bentuk negara RI yang ada selang sebagai bentuk final akan mendapat tantangan dan gugatan terus menerus dari kelompok Islam garis keras. Pada pisananya hal itu hanya akan mengantarkan negen itu pada kekebukan huar buss dalam menyedutkan periswaan yang berifat makro, dan menclantarkan problem umat dan masyarakat yang berifat makro.

Catatan Akhir Signifikansi Reformulasi Aswaja

Ketertarikan semacam ini merupakan persoalan yang perlu dipecahkan oleh kaum rumah bagi NU. Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini perlu meninjau semua persoalan yang melat bangsa, mengklasifikasi secara kritis, dan mencari jalan yang benar-benar Islamik dan sistematis dalam kerangka nilai-nilai yang telah menjadi prinsip dan anutannya. Hal ini menuntut NU untuk melihat apa dasar keberagamaan nya, memaknainya kembali secara kreatif dan penuh tanggung jawab sesuai konteks kekinian.

Seah sa'u ha, yang per a d dukat a am k mika nu adalah qismatun Aswaja-ang mabrur jid arat kagang ngarusan l ngatua pematruhan yang Aswaja terkait dengan realitas yang berkembang pesat telah sedua abad ardas puluh dan terus ar angung campu sa'in yang menunjukkan adanya per ahian n idupan dalam berbagai dimensi yang sharian harti neng. Jaka harus ngur ada ksendemangan miodologi yang dijadikan sandaran NU tersebut telah melampaui batas-batas ahian atau madhab yang abarut para ulama serwa Netiagra ratian, meskipun mereka telah melakukan *tauhid* *muhammadiyah* sebagai salah satu kerangka nilai-nilai Aswaja yang diantar keluarga NU seperti *Compassion, Tawakkul, dan al-Iman*.

Merdeka, para pemuda muda itu, tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai dasar organisasi.

Fenomena di atas memunculkan beberapa pertanyaan mendasar yang terkait dengan keberadaan Aswaja sebagai *madzhab agung* atau *amabiyah*. Berdasarkan fenomena yang berkembang dalam kurun terakhir itu, dan aspek metodologi epistemologi yang digunakan kalangan pemuda muda NL—perumusan terdahulu yang pada awalnya Aswaja sebagai *madzhab agung* dan kemudian dimaknai lagi sebagai *madzhab mashayikh*—ternyata sudah kurang memadai lagi untuk dijadikan dasar metodologis dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, kompleksitas problem yang kini dihadapi bangsa pada satu sisi, dan kecenderungan kalangan intelektual NL—menggunakan penekanan analisis kontemporer pada sisi lain, memunculkan bahwa perumusan ulang atas Aswaja yang dikaitkan dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial atau humaniora, serta keratifan budaya lokal merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam rangka menjawab tantangan dan kompleksitas permasalahan.

Tawaran ini hadir berarti akan mengabdikan keberadaan Aswaja sebagai prinsip dasar—ustu satu hal yang mesti dilindungi adalah penguatan Aswaja dalam seluruh tubuh dan jaringan NL—dan sekaligus menjadikannya *way* dalam rangka menggelus berbagai persoalan bangsa dan umat manusia saat ini dan ke

depan. Dalam kerangka itu, Awwa perlu disikapi dan dipahami bukan sebagai *awdhab apada* atau *manhaj*, tapi lebih sebagai suatu sistem nilai dengan ruba-nilai dasar seperti modern, kesekularan, dan sebagai riva yang telah menjadi karakteristik *al* sepanjang sejarahnya. Reformulasi ini mengandung pengertian halam agama, menipis perpekaan *Arkan*, dan wacana pengajaran yang *unhighlight* yang legal dan dikotomis menjadi *prophetic discourse* yang terbuka yang terkait situasi dan kondisi manusia, seperti keberadaan, cinta kasih, hidup, dan mati. Sebagai diskursus kenabian, agama akan lebih humanistik, transformatif dan historis.

Berdasarkan itu, reformulasi Awwa perlu disertai pula tindakan epistemic yang menggaribarkan secara kolektif dan utuh pandangan dan komitmen warga Nahdhiyyin tentang keberadaan Awwa sebagai sistem nilai. Konsep Awwa seperti ini memberikan peluang besar bagi pengembangan kreativitas intelektual dan praksis sehingga *al* mampu melihat, menyikapi, dan memberikan sebuah solusi atas problem bangsa dan permasalahannya. Pada saat yang sama model ini tetap memeluk warna merah yang kuat dengan kesejarahan Islam sendiri, dan dengan historitas dan kevakaran warga Nahdhiyyin.

Uthai Muhammad Arkoun. *The Unhighlight in Contemporary Islamic Thought* (London: Saqi Books 2002) him him 7

122

Berdasarkan reformulasi tersebut, N1 diharapkan menegaskan visi dan misi yang diutusnya yang perlu diletakkan dalam konteks yang memengaruhi. Perwujudan *the 4th* yang hingga saat ini masih terkesan mengambang perlu diletakkan dalam lingkaran action strategy yang melibatkan semua aspek ke ar belakang dan kehidupan bangsa sehingga nantinya diharapkan akan muncul konsep *the 4th* yang mampu menggaribah kenyataan yang dihadapi Indonesia dan selajnya berakir apikant. mampu memberdayakan masyarakat tanpa harus kehilangan identitas dan jati dirinya.

Pada saat bersamaan, N1 dengan *the 4th* diharapkan dapat merubah citra negara Islam yang sering diidentikkan dengan tudak beraturan, ketidakamanan atau terorisme. N1 harus bisa menunjukkan bahwa sbat Indonesia bukan Islam seperti di anggap lain. Islam Indonesia terbentuk dan diang pampang antara satu satu agama yang universal dan kualitas kemukosnaan itu sendiri. Meskipun demikian, Islam Indonesia tidak pernah mengabaikan keterpukan dengan sejarah Islam masa lalu, termasuk dengan sejarah pembentukan Islam itu sendiri. Dengan demikian, Islam Indonesia dapat diperanggungjawabkan baik secara teologis maupun rasional. Menjadikan *the 4th* pua. syariatnya yang di dirikan pada 1990 ini dapat membuktikan bahwa, memnjam anggapan Rahmatan,

ada perbedaan distingtif sekaligus saling berkaitan antara Islam sebagai norma dan Islam sebagai sejarah.²⁴ Sebagai aspek norma Islam, sebagaimana telah diadukan penekanan oleh tokoh-tokoh NU dan para rukuh lain, tidak pernah membenarkan apertensi atas penggunaan cara-cara kekerasan dan atau sepiutnya kekerasan yang terus berlangsung saat ini merupakan Islam sejarah, yang bukan karakteristik Islam modern. Lebih dari itu, sebagai bagian dari sejarah, kekerasan dan binasakan serupa bukan hanya dilakukan oleh Islam saja, tapi juga bisa didapati pada penganut agama-agama lain.

Kepada nilai keberagamaan dan politik yang formatif, seperti dipaparkan sebelumnya, merupakan kerja besar yang tentunya tidak dapat dilakukan NU secara sendiri. Kerja sama NU dengan organisasi atau kelompok lain atau dengan seluruh masyarakat juga perlu diadukan bagian yang tak terpisahkan dari agenda organisasi Muhammadiyah, dan sangat perlu keras masyarakat perlu diadukan untuk digandeng sebagai bentuk mata dan keberagamaan NU moderat, yang pada prinsipnya telah melahirkan pluralisme keberagamaan NU. Keberbedaan NU dengan Muhammadiyah sebagai kelompok resmi atau dengan paraibg

²⁴ Eddur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press 1982) hlm. 141.

piuta Muhammadiyah mendapat perhatian tersendiri untuk dapat bersama melakukan transformasi kehidupan bangsa karena dua organisasi itu sama-sama memeluk umat barokah yang masing-masing tidak dapat dinafikan keberadaannya. Selain itu, NU perlu terus mengembangkan kerjasama lebih intens dengan umat umat dan agama lain sehingga watak NU yang pluralis dan demokratis menjadi signifikan yang cukup besar dalam mengemban dan memperkokoh persatuan bangsa.

Maka Jepang bangsa ini masih sangat panjang. Di sana berbagai kemungkinan dari yang terburuk sampai terbaik masih terbuka lebar untuk muncul. Sementara NU dengan konsep yang berakar dalam hukum Islamnya, memiliki potensi yang besar untuk tetaplah memasuki wilayah itu serta mengabdikan diri untuk dengan tawaran-tawaran keramah dan perspektif berdasar atas keadilan itu masyarakat. Semua itu tergantung pada bangsa Nahdhiyyin dalam menanggapi isu-isu sebagai proses yang hidup dalam sejarah. Kita menunggu apakah mana keistimewaan itu dilahirkan dalam sikap dan tindakan konkret. C

NU DAN POLITIK: Memperkokoh Gerakan Kerakyatan yang Kritis

NU adalah bagian tak terpisahkan dan pewarten. Sebagai bagian dan pewarten, ia telah tumbuh dan berkembang dan dan untuk masyarakat semua lapisan yang dikembangkan dan mentasikan pada kepentingan rakyat dan seluruh masyarakat dalam kerangka nilai-nilai Islam. Realitas menunjukkan, masyarakat yang dan waktu ke waktu selalu berada dalam ketidaklaksanaan dan terlupakan dalam berbagai dimensi kehidupan, bahkan mengalamai penindasan, adalah mereka yang berada di daerah-daerah pedesaan. Kenyataan itu, pada gilirannya, menyandarkan NU untuk menjadikan mereka sebagai salah satu subjek perhatian utama organisasi.

Sebagai bagian dan pewarten dan sebagai gerakan yang bermuatan kerakyatan, NU terutamanya pada masa masa awal berdirinya, memiliki karakteristik kemandirian, kekhuatan, dan sejenisnya. Lain halnya yangar lekas menjadi mah sebagai pendukung penguasaan NU keberpegangannya pada nilai-nilai ini menjadikan

NU sebagai agen gerakan *am jami* dalam pengertannya yang hakiki.

Dalam perspektif lebih luas, paradigma gerakan NU selama ini berfokus pada tiga hal yang saling berkaitan, yaitu nasionalisme kebangsaan, pengembangan ekonomi rakyat berbasis pedesaan, dan kebangkitan pemudaran intelektual. Paradigma dan transformasi tiga hal ini harus dilacak dan pendirian Wahidatul Wathan, Nahdhatul Ummah, dan Lashwara Alkur yang lahir menjelang dan terus mempromosikan wayang proses pendirian NU.

NU dalam Sejarah: Sebuah Refleksi

Paradigma gerakan kerakyatan NU dirumuskan secara jelas dalam Statuen Perkumpulan Nahdhatul Ulama yang disahkan dan ditetapkan pada 1924. Der

Latief Leuder Ide "NU Era Reformasi dan Pasca Gue Gue: Problem Oriented dan Mass Gerakan Sosial" Jurnal Tadrisul Ushul (Kediri) No. 5 Tahun 1999, hlm. 5

Dewan Anggaran Dasar Nahdhatul Ulama 1. Bertekad menjabarkan maksud berdirinya sebagai masyarakat Islam yang berkeadilan dengan maksud2 langgka2 dari berkeadilan2 beginsi dengan hak2 haknya akan tanah air dan orang2 yang telah makin 1 Mendirikan badan badan berkeadilan2 masyarakat berkeadilan berkeadilan berkeadilan dan berkeadilan yang harus dihapus oleh Baitu Agama Islam. Dengan dan Manti van Bruinhuizen Abu Tridat Rikardus Kuzat Pencarian Mekanisme Baru Ciptakan Yogyakarta 1994, hlm. 42

dasar dari Anggaran Dasar dan peraturan, dan ekonomi yang akan dikembangkan Nt sepenuhnya dipikirkan dan diregulasi pada pemerintahan akan datang. Namun dasar ini satu pihak tidak menguntungkan secara tegas akan tetapi, dari anggapan optimisme politik yang digunakan para tokoh dan kerennas yang nantinya menjadikan Nt semua. Sedangkan Wathan dan Subhan Wathan dapat dikatakan bahwa Nt memiliki komitmen cukup kuat untuk mengembangkan nasionalisme kebangsaan yang berbasis pada politik kerakyatan.

Hal ini sangat dapat diterima, dapat dimaklumi. Kondisi seperti pada saat ini, penetapan Anggaran Dasar memang tidak memungkinkan agar menentu akan secara eksplisit politik nasionalisme kerakyatan yang dijunta Nt. Karena itu menjadi kegiatan sekaligus kelemahan bagi pemerintahan politik organisasi ini menjadi kekuatan karena Nt lebih mengutamakan nilai nilai politik di dalam gerakannya sebagai organisasi dan tujuan yang melatarbelakangi pendirian Nt. Akan tetapi, pada saat yang sama ketidajelasan itu membuat Nt relatif mudah terpengaruh ke dalam aktivitas yang secara substantif dapat menghambat proses transformasi sosial yang ada ini utamanya

ketertinggalannya dalam politik nyata dan tahun 1953 hingga 1957 bahkan sampai 1958 menunjukkan secara terang-terangan kelemahan Nt di dalam

menafsirkan tradisi, termasuk nilai-nilai politik yang dianut, yang pada gilirannya memotivasi secara tidak langsung keberadaan NU sebagai gerakan kerakyatan. Pada masa awal menjadi partai politik, NU menggalang kekuatan, lebih tepatnya sedikit sekali perhatian yang diberikan untuk melakukan perumusan program secara rinci, dan NU menggalang ketidapastian dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan dan rakyat. Demikian pula, meskipun pada Pemilu 1955 memperoleh suara cukup signifikan dan berada pada urutan ketiga dan termasuk empat besar NU dan warga Nahdhiyin telah memikul kerugian cukup besar. Realitas menunjukkan, pada masa awal NU tidak memiliki sepekaan lagi untuk memperhaluskan benak mereka bersufar keutamaan dan sosial keagamaan yang selama periode awal menjadi kompromi dan gempuran. Contoh konkret, Jember Dakwah NU yang bertanggung jawab atas pemecatan apatun Idris kekurangan: rat dan peminatan sehingga ke gilirannya dikejar-kejar oleh organisasi lain. Dengan itu, Muhammadiyah yang bertugas mengorganisasikan berbagai aktivitas sosial dan ritual keagamaan kerukunan dan kerukunan sehingga tidak aktif selama hampir se panjang periode Demokrasi Terpimpin.¹

Kondisi kelabu itu masih diperparah lagi dengan stigma yang diarahkan ke NU dan warga Nahdhiyin.

¹ Greg Fealy, *Shahid Mubtadi NU: Sejarah NU 1832-1957* (Cetakan ke-1 Yogyakarta: JICA, 2004), hlm. 154.

² Ibid., hlm. 3-9.

Dengan begitu ini ada yang N1 yang akan atau mau menyebut dirinya sebagai Nahdhiyin. Dalam kondisi demikian, adanya tuntutan pada masa t-tide Baru agar N1 kembali kepada jati dirinya yang akan merupakan hal yang sangat wajar.

Tuntutan atau keinginan itu menemukan titik kulturnya pada Munas Siruhendo 1983. Pada Munas tersebut yang dipertual oleh Mukhtamar Siruhendun setelah berkeputusan, organisasi yang berdiri pada 1976 itu menyatukan dengan tegas akan petanikan diri dan politik praktis. Melalui keputusan kembali ke Khittah 1926 N1 memutuskan barukan yang cukup menentukan dalam merajut kembali benang merah yang selama ini sudah nyaris terputus.

Kembali ke Khittah 1926

Memodifikasi buku tulisan Daniel Dhakidat¹ kembalinya N1 ke Khittah menunjukkan secara jelas langkah non politik dan politik N1. Artinya, khittah 1926 merupakan strategi N1 yang ingin merumuskan dan dari rerat politik kekuasaan yang bersifat praktis dan pragmatis dalam rangka pengembangan politik keagamaan transformasi yang berorientasi kerakratan, kebangsaan dan kenegaraan.

¹ Lihat Daniel Dhakidat, "Langkah non Politik dan Politik N1 dalam Fikayah KH Dharwis (ed.) *Uda Qur An dan Masyarakat Sipil* Cetakan 1 Yogyakarta: LKIS 2004, no. 25-9.

Sejak memasuki periode Njottah, semangat yang sering disebut nasionalis dengan konotasi negatif ini memperbarikan gerak gerakan yang memem-
 kan. Wacana dan praksis pencerahan seperti keagama-
 an sosial, khinam, maupun politik bergulir dengan
 tingkat intensitas cukup signifikan. Sebagai contoh,
 pemakaian *marfah* sebagai *marfah mambah*, serta
 pengembangan metodologi kapa secara lebih buh-
 uk dengan rujukan kepada epistemologi *Arat* Isam
 kontemporer dan intelektualitas Barat, menunjukkan
 dikurusi keragaman yang dikembangkan organisasi
 lebih kontekstual, membuma, bahkan sarat dengan
 keberpihakannya kepada rakyat dan masyarakat luas.
 Selain dengan itu, kerja kerja riisan yang bernilai
 sosial dan intelektual yang dipertori oleh pesantren,
 juga anak anak mudanya, mengantarkan N¹ ke posisi
 garis depan dalam pengembangan wawasan dan ke-
 sadaran kritis, pemberdayaan masyarakat luas serta
 penguatan rakyat.

Secara prinsip, Njottah 1926 memberikan lahan
 cukup luas bagi tumbuhnya kelompok progresif. Me-
 nurut Easok, gerakan progresif itu merupakan kelompok
 yang punya komitmen yang beresah dan dibentuk
 oleh pematurnan mereka atas Isam dan sumbernya
 untuk melakukan transformasi masyarakat dari
 kemiskinan yang menjadikan rakyat sebagai objek
 eksploitasi, baik yang dilakukan pemerintah, institusi

sewa ekumenis, maupun akibat hukuman yang tidak setara. Melalui upaya ini, rakyat harus menjadi subjek sejarah yang membentuk dan menentukan nasib sendiri. Dalam N^o progresivitas ini dapat diarahkan dengan arah gerakan yang memurnikan N^o sejak akhir tahun hingga saat ini. Pertama, gerakan individu-as yang menjunjung tinggi realitas dan nilai nilai keteguhan. Kedua, gerakan pencerahan dan pemertayaan melalui pengenthanan wawasan dan pengenthanan metodologi alternatif serta pembebasan pengurus N^o dan pelaku politik. Ketiga, gerakan pembebasan dan demokratisasi melalui pengenthanan dan pengenthanan N^o sehingga *the rule of law* menjadi *the rule of the people* yang bergerak untuk pemertayaan dan pengenthanan warga melalui pendekatan kultural.

Dalam kenyataannya, wacana dan kenyataan yang dikuasai N^o tidak selamanya berjalan sesuai. Persepsi internal dan eksternal sering menggerakkan proses transformasi tersebut yang berakibat selain pada adanya keteguhan dalam berbagai dimensi di tubuh N^o juga pada kurang sistematis dan efektivitas program yang sedang dan akan dijalankan.

lihat Farid Esack, "In Search of Progressive Islam Beyond 9/11" dalam *Omid Sali: ed. Progressive Islam on Justice, Gender and Pluralism* (Oxford: OneWorld 2003), hlm. 80.

lihat Lado Ipa, "Gerakan Sosial Kelompok N^o, Progresif dalam Juma: Sosiologi Ladoed Farid ul Mayerah" (No. 2 Tahun 2003), hlm. 90-93.

Persoalan Kolonial NU

Problem internal yang tengah dihadapi NU adalah situasi terlekat pada adanya sebagian eksklusivitas yang kurang memunculkan komitmen kurang memahaminya nilai-nilai seperti Nilai *landmark*, *landmark* dan *landmark* sebagai nilai-nilai dasar kadangkala dibagikan dalam menyikapi seluk beluk realitas kontemporer. Sebagai dampak dari itu, banyak ide, gagasan, dan program kreatif yang servatannya sangat oroduksi harus terpingkal dan agenda atau berjalan sangat jauh dari rencana semula karena adanya perwalian dan sebagian orang yang menganggap dirinya paling memunculkan *istisna* dalam hal itu.

Ketertarikan itu kini berkebalikan dengan merikanya gagasan dan kalangan NU yang tidak semuanya dapat dipahami secara utuh oleh warga NU yang lain. Hal itu memunculkan terjadinya taksi taksi dalam tubuh NU dan munculnya kesenjangan persepsi di antara mereka dalam memaknai khittah dan menyikapi perwalian.

Perwalian itu ditambah lagi dengan masih kuatnya mengutip Dikidac. *perwalian politik*¹ yang

¹ Konsep yang berasal dari Belanda ini bisa diartikan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, kelompok suatu kelompok atau orang-orang yang menguasai atau memperlakukan keuntungan yang bersifat material seperti kekayaan politik atau keuntungan-keuntungan lain yang menghidupinya. Kedua, kelompok atau orang-orang yang menjadi bagian dari dirinya se-

dipanggilkan ke dalam bentuk ambisi politik dengan orientasi yang sarat kekuasaan pada sebagian elite SL. Menguasanya politik kekuasaan ini telah mengantarkan mereka untuk menjadikan SL dan warga Nahdhiyyin sebagai alat atau objek untuk memperjuangkan kekuasaan, jabatan, dan sejenisnya. Nivaris pada fenomena umum, sebagian pengurus dan elite SL di berbagai tingkatan-nya telah menjadikan organisasi, lembaga atau badan, sebagai semacam batu loncatan untuk masuk ke dalam jejaring politik praktis dan kekuasaan yang penuh berbagai fasilitas.

Sejak kembali ke Khittah 1926, SL memang tidak sepenuhnya bebas dan para politisi praktis. Tetapi peluang itu tidak terbuka lebar seperti pada era reformasi. Datangnya era reformasi, akan memulainya kembali pemerintahan bagai cakrawala, juga membawa pro-hibisi tersendiri, khususnya bagi SL. Pada era reformasi mengizinkan kemudi semangat politisi berkuasa pada sebagian tokoh SL yang selama era Orde Baru tak punya bahan bakar yang cukup untuk memfungsinya.

Dalam kondisi semacam itu, mereka mencoba menafsirkan Khittah secara "kreatif" tapi dipangkas dan nilai nilai dan kondisi yang melaturlingkupinya. Mereka coba menafsirkannya dalam terang bayang

bagi revolusi yang berbeda dan orang lain. *Ular Deras: Dilek dan Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Cetakan pertama PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. Hal. 38

politik kekayaan. Akhirnya, sebuah realitas telah terjadi di hadapan bangsa, yang menimbulkan sebuah nisa tentang krisis yang membuat NU. Siapa pun tentunya tidak dapat membayangkan apalagi membayangkan krisis tersebut. Perwujudan tersebut harus dihadapi dan dapat perwujudannya secara sistematis, berjangkauan jauh ke depan, serta mencerminkan NU, warga, dan rakyat suatu keseluruhan.

Penguatan Gerakan Kerakyatan

Menyikapi krisis yang semakin ini dihadapi NU. Awapa sebagai paradigma dasar yang dianut NU perlu dirumuskan secara lebih robust dan kontekstual. Paham ini hendaknya menjadi landasan bagi setiap gerakan, langkah, dan ketahanan NU ke depan.

Selain dengan itu, khittah sebagai petunjuk dalam menegakkan Awapa, selain harus selalu berada dalam lingkai nilai-nilai Awapa, konsep ini perlu dijabarkan secara lebih rinci berdasarkan nilai-nilai dan arah belakangi Khittah. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penafsiran yang beragam. Dengan demikian, nilai Khittah dapat ditunjukkan sesuai hukum. Sebagai contoh, konsep *khaira li-mawla* dengan dasar dasarnya, sebagaimana dirumuskan K.H. M. Hudaib Ridwi yang bersifat sosial ekonomi dengan tujuan untuk membangun kemampuan swadaya umat Islam melalui

usaha bersama* perlu diarahkan ke arah operasional ke dalam kehidupan konkret. Demikian pula tema *qira'at* yang diproyeksikan sebagai manifestasi kekuasaan rakyat melalui permusyawaratan yang dibawakan pada suara rakyat sendiri" hendaknya mendapatkan perhatian serius melalui pengembangan rumusan, strategi, dan pendekatan yang muncul dari bawah sendiri. Melalui serangkaian upaya semacam itu, maka prinsip *Islam* yang merujuk kepada *al-shura* dan *al-amr al-ma'ruf* atau dalam istilah lain, *al-ma'mu'at al-diniyah*, diharapkan dapat diwujudkan ke dalam kehidupan masyarakat.

Demi memperoleh komitmen dan melubukkannya ke dalam wilayah praksis kelompok kelompok kapan dan gerakan sosial yang berbeda serta dapat membukukkannya yang orang NU atau berada dalam lingkaran NU seperti LKS, Serikat PAM, dan Lakpesdam perlu memperoleh dan melakukan inter-

* Lihat Greg Fealy, *Islam and the NU: Sejarah NU 1982-1987* (Cibitung: Yogyaswara, 2004) hlm. 88.

* Lihat Endang Turmudi, ed., *Nahdliyyat dan Ideology Politics and the Formation of Rukun Jember* (Jember: PP LP Ma'arif NU, 2004), 58.

* Al-shura adalah nasihat dan orkestrasi yang baik yang dapat menghasilkan kenyamanan (kehidupan) sebagai manusia (kebudayaan) yang dan bisa untuk manusia. Sedangkan *al-amr al-ma'ruf* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Lihat Muhammad Ali bin 'Abd al-Jabir, *Maqad al-Asy al-Arabi* (4); *al-Aqr al-Ashliq al-Arabi*. Ordoan Tahayyul Maqadhyah A Ma'rif al-Qiyam A al-Faqd al-Arabiyyah. Cetakan Pertama 'al-Dar al-Baidar. Dpt al-Nasyr al-Maqadhyah 2007. hlm. 630.

sifikas, jaringan serta komunikasi dialogis secara vertikal dan horizontal. Melalui jaringan ini, program-program penguatan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan lokal diharapkan dapat tersebar merata dan menjadi agenda berkesinambungan di berbagai daerah. Melalui komunikasi dialogis, keterbukaan dalam menyikapi gagasan dan dalam memahami perbedaan yang selama ini masih terjadi tidak akan menjadi menjadi konflik terbuka yang merugikan SL dan warganya. Semua itu perlu disertai upaya pemegangan gagasan dan waktu ke waktu sehingga SL akan betul-betul dapat ditata sesuai perkembangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Di atas semua itu, kebijakan SL untuk tidak masuk ke urusan politik kekuasaan merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Lawar kemah. Sebab politik kekuasaan akan menggerus prinsip kerakyatan yang selama ini bersemu kukuh dalam kehidupan masyarakat. Politik kekuasaan bisa meniadakan hak-hak terutama warga SL, kebebasan, kemandirian, kreativitas, dan kewaswastaan mereka. Mereka akan menjadi rakyat atau warga negara asing mania yang selalu bergantung kepada pihak lain, sehingga potensi dan kemampuan mereka akan meredat dan terhambat. Pada gilirannya, mereka kehilangan posisi tawar di luar negeri yang akan membuat mereka dipaksa selalu menyetujui, suka atau tidak, segala kebijakan pemerintah. ©

MEMBANGUN ETIKA SOSIAL DARI PESANTREN:

Akhlak Sosial sebagai Dasar Membangun Masyarakat Berkeadaban*

Fenomena yang berkembang selama sepuluh tahun terakhir ini menempatkan *umum* sebagai bagian dari masyarakat yang berbudaya mengalami pemudaran dan bangsa Indonesia. Atmaka massa, kerusuhan, pertentangan sosial, serta konflik vertikal dan horizontal dan waktu ke waktu terus terjadi di berbagai tempat. Bahkan ada kecenderungan bahwa kejadian semacam itu mengalami eskalasi yang cukup mengerikan.

Ironisnya, tragedi-tragedi kemanusiaan itu terus terjadi di daerah tepal kudu atau daerah lain yang dianggap sebagai basis masyarakat umum yang cukup kuat. Dalam dunia Internasional hal itu merupakan fenomena yang juga menimpa umat Islam. Jika kita mau jujur, maraknya terorisme nyaris selalu melibatkan

Dilampirkan dalam *Metode Pengembangan Materi dan Metodologi Akhlak Sosial* P3 P3L Ummu Qura P3 Maryam Mulya alman 1001 tanggal 8 September 2003 di Pamekasan

kelompok-kelompok tertentu, atau suatu Islam dalam ajaran baru Islam sebagai agama yang menampilkan wajah sangat humanis. Bahkan angket La bertema belakang dengan Islam konservatif yang secara total mengesahkan tentang nilai-nilai dan moralitas yang sangat jahat.

Filal ini menunjukkan bahwa umat Islam secara umum dan muslim Indonesia, secara khusus, sampai derajat tertentu, belum mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dalam tradisi keislaman. Mereka belum dapat menerjemahkan secara kreatif dan bertanggung jawab nilai-nilai luhur Islam khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial yang berkaitan dengan memperlakukan kehidupan dalam segala ruang dan waktu ke dalam kehidupan terutama pada masa kontemporer ini.

Berdasarkan kenyataan itu, lembaga lembaga keislaman memiliki tanggung jawab besar untuk memelihara persoalan tersebut dan berupaya mencari jalan keluar yang dapat memberikan sumbangsan bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik pada masa-masa mendatang. Institusi keislaman harus merekonstruksi keberadaan Islam sebagai agama sosial yang bertujuan bagi terciptanya suatu komunitas atau masyarakat yang berkeadilan dalam berbagai dimensinya.¹ Dalam konteks Indonesia, pesantren sebagai institusi keislaman dan lembaga pendidikan Islam yang *greater* Indonesia menjadi tidak terlupakan untuk terlibat secara total dalam persoalan tersebut. Lembaga ini diundang untuk

menetapkan nilai-nilai Islam yang holistik-individual dan sosial, serta vertikal dan horizontal-ke dalam kenyataan kehidupan.

Pesantren dan Nilai-Nilai yang Dianutnya

Berbicara tentang pengembangan nilai dan ajaran Islam dalam masyarakat Indonesia, maka pelibatan pesantren merupakan suatu keniscayaan yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Kemestian itu berwujud pada satu kenyataan, pada satu sisi, pesantren merupakan lembaga Islam yang berstatus pertama sehingga penguatan bangsa nilai-nilai Islam melalui institusi itu menjadi aksi politik yang telah besar untuk dapat diterima oleh masyarakat luas. Di sisi lain, pesantren sejak awal ke muka warisnya memang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Lembaga ini tumbuh dan berkembang dan ada untuk masyarakat. Pesantren didirikan berdasarkan hasrat yang kuat untuk melakukan transformasi sosial bagi masyarakat daerah sekitarnya. Ia hadir untuk mengabdikan dirinya mengembangkan dakwah Islam dalam pengertian luas, mengembangkan masyarakat sesuai nilai-nilai keagamaan, serta pada saat yang sama masyarakat memberikan dukungannya atas upaya yang dilakukan pesantren.

Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat Pontianak Sengaja Indonesia Cendek* (Jakarta, P3&S, 1987) hlm. 152

Untuk mengemban misi yang diembarkannya itu, pesantren berpijak pada paradigma dasar bahwa seluruh kehidupan ini dipandang sebagai ibadah. Dalam pengertian, kehidupan diawasi dan diubudhkan dalam rangkaian nilai-nilai daku yang telah mereka peluk sebagai sumber nilai tertinggi. Melalui paradigma yang dasarnya itu, pesantren memilik pandangan bahwa ibadah dalam perspektif Islam meliputi ibadah murni dalam bentuk ritual turmabik dan ibadah sosial yang dapat dilacak pada semua perbuatan umat Islam yang bernilai baik, dan memiliki dampak maslahat bagi peaku dan manusia yang lain.

Pandangan dasar itu selanjutnya mengantarkan pesantren pada upaya pengkakan dan pengembanan nilai-nilai moralitas yang sejalan dengan pandangan dasar itu. Sebagai konsekuensi dari kehidupan yang terus ibadah, pesantren sangat menekankan kepada kekhilaaan, semua kiptah pesantren semata mata di tujukan untuk perapasan kekhilaaan Allah semata. Hal itu mencerminkan kenyataan bahwa pesantren lebih mengutamakan prestasi ketimbang prestasi dan mementingkan proses yang benar dan berkelanjutan daripada sekadar hasil yang bersifat formalitas.

1. Lihat Bachyar Effendi, 'Nilai Keam Santri' dalam M. Dwidit Rahardjo (ed), *Pengantar Dunia Pendidikan: Catatan Perum* (Jakarta: P3M, 1995), hlm. 49.

terlihat dengan itu, lembaga pesantren terutama pada masa lalu, wara dengan nilai-nilai moral yang merepresentasikan ketundukan, wara, takwa, sabar, tawadhu, dan mengedepankan keupatan. Nilai-nilai tersebut telah mengantarkan pesantren berupa sikap kemandirian dan kersuklerhanaan. Selain itu, di kalangan para santri berkembang wiktartaa yang cukup tinggi, ruketurun dalam menpaunkan tugas, dan pengetahuan cukup berat bagi kepennngan umum.⁴

Nilai-nilai tersebut dipasatkan dipelihara dan diestankan melalui tradisi keilmuannya yang integral. Pada masanya, integritas itu bisa dibaca pada upaya pengembangan *fiqh* dan alat-alat bantuannya yang di satukan dengan *fiqh* *ikh* *ak*. Dengan kata lain, yang dipentungkan di dalam pesantren bukan hanya aspek pengamalan hukum, atau akhlak semata, melainkan upaya pemeliharaan pengertan tentang kehidupan dan hakikat manusia serta kehidupan masyarakat. Upaya itu telah mengantarkan pesantren, dalam sejarahnya, sebagai lembaga yang memiliki kemampuan memvun bangkai pembangunan (mental) spiritual melalui pem-

lihat Zamkhuayan, Dikotok, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pendidikan Keislaman Kyai Cirebon Pertama*, Jakarta, P3IS 1982, hal. 183.

4. Abdurrahman Wahid, *Pengajaran Agama Agama dan Keislaman*, Jakarta: Djambang, 2001, hal. 131.

5. Lihat Abdurrahman Wahid, *Asal Usul Tradisi Keilmuan Pesantren* dalam *Jurnal Pesantren* (No. Pertama, Oktober, Desember 1984), hal. 8-10.

benar yang cukup untuk *internalization of religion* yang diekspresikan secara intelektual. Dengan demikian, antara lain yang dimiliki harus atau dikuasai ilmu dan *ustadz*—karena pihak, dan sikap serta perilaku mereka, di pihak lain, tidak memberi batas pemisah yang tegas dan kesempungan yang cukup lebar hingga derajat tertentu, sikap dan perilaku mereka mencerminkan keimanan yang mereka miliki.

Dengan nilai dan tradisi luhur yang dimiliki ini, pesantren menjadi satu lembaga yang benar benar mandiri yang tidak tergantung kepada pihak atau lembaga lain, termasuk pada negara dengan segala instansi petangksistva. Oleh karena itu, kemandirian yang selama ini dikembangkan tidak menjadikan pesantren terjerak ke dalam ketergantungan sosial dan lingkungan intelektual. justru kemandirian itu memperlebar sikap kerendahan hati sehingga menghinakan kepada pihak lain menjadi keyakinan yang sama sekali tidak boleh disebarkan. Demikian pula, kemandirian berwujud seiring dengan ketahanan, ketegaran, dan tidak mudah menyerah, menajuhkan dan dan keputusan, serta berupaya sekuat tenaga mungkin untuk tetap bertahan di atas ketinggian nilai nilai Islam. Kemandirian pesan

* Zuhrotul Hayati Dhuha. *Position and Change in Indonesian Islamic Education*. Jakarta: Office of Religious Research dan Development Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia 1995: hlm. 88.

tron adalah kemandirian, transformasi, yang mem-
erlukan terdapatnya eksistensi yang berwujud antara lain:
sistem, secara khusus dan antar sesama umat manusia,
sebagai utopia.

Mengembangkan Akhlak Sosial: Membaca Kembali Nilai-Nilai Pesantren

Jika kita mau rujuk nilai dan tradisi pesantren
tersebut, tentunya merupakan etika budhaya yang mem-
berikan landasan bagi setiap muslim dalam sikap dan
perilakunya sebagai individu, bagian dan komunitas
madani dan masyarakat umum, serta sebagai makhluk
Allah dan abadi-Nya. Akan tetapi, akibat modernitas
dengan nilai-nilai budaya pop dan konsumtifnya
yang memusnahkan nilai-nilai ke dunia pesantren, dan
akibat hegemoni negara yang begitu kuat di era 1945
Baru, serta adanya sikap dialektis sebagian pesantren
dalam menyikapi ilmu, pengetahuan yang berkembang
pada nilai-nilai kultur pesantren mulai kehilangan nilai
budayanya dan akhirnya cenderung menjadi tradisi
sekadar formalitas yang kehilangan makna substansi-
sasinya. Akibatnya, fenomena yang berkembang ialah
etika *gagah gagah*, dan keramahan yang penuh ke-
pura-puraan yang tak bisa memberikan transformasi
pada nilai-nilai budaya 1945 karena itu, keramahan yang
diutamakan hanya berwujud semata sekedar menjadi ke-
budayaan dan kebudayaan yang sangat mengesankan

Menurutnya tradisi kultur pesantren sudah tentu berkembang jauh pada ketidupan masyarakat. Khususnya masyarakat pedesaan. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada umumnya tinggal di daerah pedesaan. Pada dasarnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren yang umumnya berada di pedesaan itu, sampai derajat tertentu, merupakan representasi dari masyarakat muslim secara keseluruhan masyarakat rural pada umumnya. Kehidupan atau hasil perbuatan pesantren. Kenyataan itu membuat pesantren sampai kini masih tetap signifikan kuat pada hampir seluruh aspek kehidupan di kalangan masyarakat muslim pedesaan yang saat ini terdapat sejumlah ketika pesantren kehilangan nilai-nilai yang telah diwariskan, masyarakat yang selama ini menyalakan pesantren sebagai rujukan akan terpengaruh juga dengan hal tersebut.

Keterbelakangan kultural di atas tentu sangat tidak menguntungkan, baik bagi dunia pesantren maupun

Pada dasarnya dengan pulihnya abad kedua puluh yang lalu sekitar 65 persen masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sementara masyarakat urban hanya kurang dari 35 persen. Lihat Zamakhsyari Dafa, "Tradition and Change in Indonesian Islam", *Educator* No. 24. Oleh karena itu upaya sosial untuk mengembangkan Indonesia tidak bisa meninggalkan masyarakat pedesaan.

Di samping itu keberadaan hal sebagai figur yang sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat desa menjadikan pesantren memiliki posisi dan peran yang sangat sentral.

masyarakat luas. Persoalan menjadi kian rumit ketika agama diluar pesantren juga mengalami perkembangan, an pengertalan aspek formalisannya. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, agama telah dijadikan justifikasi atas kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai dan nilai agama itu sendiri. Pada sisi itu, tragedi kemanusiaan menjadi salit untuk dihindarkan lagi. Perilaku negatif mudas dan yang sangat akrab sampai yang bersifat campang semang di antara mereka. Kondisi seperti itu adalah fenomena yang ser kemungkin akhir akhir ini.

Pesantren, dengan segala elemennya, tentu tidak dapat tinggal diam melihat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung itu menimpa masyarakat luas. Pesantren dituntut untuk melihat kembali visi dan misi yang diembarkannya. Pesantren, apa dan di mana pun musti memulaki visi yang transformasi bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan yang secara substantif sangat berkeadilan dengan keadaban. Melalui visi itu, pesantren ditantang untuk mengembangkan pendidikan dalam arti yang sebenar benarnya, bukan sekadar pengajaran atau melakukan transfer ilmu pengetahuan semata, apalagi hanya sekadar bersifat formalitas.

Pencapaian ke arah itu memerlukan pesantren untuk membaca kembali visi dan misi atau yang telah menjadi tradisi pesantren sehingga dapat diapresiasi.

transformasikan dengan kondisi ketiadaan untuk itulah sebuah metodologi yang tepat, wawasan yang luas serta proses yang berkesinambungan menjadi kondisi mutlak yang harus diwujudkan dan dikembangkan. Melalui upaya itu, nilai-nilai moral Islam diharapkan dapat dikembangkan menjadi sebuah budaya dan pada gilirannya dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan menuju kehidupan yang lebih adil, damai, dan sejahtera.⁴

NU DAN KONTEKSTUALISASI ISLAM DALAM LOKALITAS BUDAYA *

Sejarah berdirinya organisasi NU dan korpasnya dalam pengembangan Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah para pendiri lembaga keagamaan itu untuk membina Islam dalam realitas kehidupan masyarakat. Ia hadir sebagai respon kreatif terhadap permasalahan budaya yang dihadapi umat Islam. Jadi sesuai dan sesuai juga sebagai pemertahanan atas pandangan-pandangan religius yang telah memberikan Islam dan eksistensinya sebagai agama yang selalu baru merupakan bagian dari titah manusia yang selalu berurusan dengan kehidupan itu sendiri.

Suatu dari karakter manusia dan kehidupan terlekat pada keterkawatannya dengan lokasinya dalam ruang dan waktu. Waktu hidupnya itu pada gilirannya

* Tulisan ini pada awalnya merupakan tulisan penulis yang dipaparkan dalam Seminar Local History Empowerment as a Way Nationalism yang digelar oleh Komite dan Paralelisme Baru dan diawasi oleh yang diadakan oleh Fakultas Sastra Universitas Airlangga tanggal 1 Juni 2003 di Surabaya namun telah mengalami beberapa modifikasi dan revisi.

telah melahirkan umat manusia dan kehidupan yang sangat beragam sehingga tidak dapat direduksi ke dalam pola pandang yang mengedepankan keseragaman saja. Keragaman itu menjadikan manusia Indonesia dan masyarakat budaya itu berbeda, berbeda dengan masyarakat di tempat yang lain.

Keragaman itu, terkadang sering diartikan secara simplistik, oleh sebagian kelompok umat yang dari waktu ke waktu, menambah pada awal abad kedua puluh yang lalu. Akibatnya, mereka menganggap Islam, Hindu, dan kepercayaan yang sama-sama kurang memiliki apresiasi terhadap keragaman kehidupan. Akibat tercapainya untuk mengintegrasikan Islam secara tunggal tanpa melihat perbedaan dan keragaman nilai yang dialami umat manusia di berbagai tempat atau mereka merasa itu mematahkan kembali Islam secara rigid dan formalistik ke dalam pola dan bentuk yang di awal awal perkembangannya.

Sejarah perjalanan Islam Indonesia menunjukkan bahwa pola pendekatan semacam itu ternyata kurang mampu menangkap dan menangkap secara menyeluruh, khususnya yang ada di pedesaan yang dalam hidup kesehariannya tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan budaya yang masih mengayau begitu kuat di kalangan mereka. Di samping itu, pola seperti itu juga tidak dapat mengapresiasi secara kritis kekayaan khasanah intelektual Islam klasik sehingga pengetahuan terhadap

hal itu dijawab dengan akan mengibaratkan kekuatan peradaban Islam dan akan memutuskan untuk Islam dari sejarah masa lalu yang kaya nuansa dan perspektif. Kemudian itu akan kita mengartikan selagi kita wahai pesantren untuk mendirikan organisasi sosial keagamaan yang diharapkan dapat menutupi celah dan kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada kelompok Islam yang lain.

NU dan Aswaja: Kontekstualisasi Agama dalam Ruang dan Waktu

Banyak pengamat mencatat bahwa ordo baru ini merupakan respons kaum yang dianggap antisipatis terhadap ancaman kaum yang dianggap "mendekaja".¹ Artinya sebaliknya itu, sehingga tidak akan

Topologi modernisasi keaduan yang diinformasikan sebenarnya akan sangat tidak memadai. Ada mampu menjelaskan fenomena perkembangan Islam yang sebenarnya. Azra menyamakan perkembangan berdasarkan topologi modern yang diwakili Muhammadiyah dan keaduan yang diwakili NU menjadi dua elemen. Setelah keaduan yang tampak, yaitu NU sering menampilkan sikap modernitas dan keaduan ya Muhammadiyah terlihat inkonsistensi. Oleh karena itu, sebenarnya keaduan menjadi busa kemudian. Sebagai Indonesia yang paling berdaya, lebih terdapat pemertanian di antara yang baru dan ada. Dengan hoer Berdasarkan selagi itu Azra membuat topologi gerakan Islam yang lebih dapat. Ia membagi menjadi tiga kelompok substantifisme keaduan formalisme dan apudisme. Jika pemertanian lebih jauh, yaitu Azrum, Azra Islam Reformis, Ormas Islam dan Gerakan Cetak. Jakarta PT Raja Grafindo Persada 1999, hlm. 13-50-51. Azrum, Azra Kun-

tertentu, bisa mengandung kebenaran, tapi sekaligus memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Instruktur tersebut benar dalam menjelaskan tentang upaya kaum ulama pesantren yang salah satu dasarnya adalah ingin merespons kaum modernis. Meskipun demikian satu hal yang perlu diperhatikan, respons tersebut bukan sekadar respons terhadap ancaman kaum Islam perikatan yang bersifat reaktif dan tanpa ide yang riil. Itu lebih merupakan tanggapan kreatif kaum pesantren yang telah dipertajam secara matang dalam waktu yang cukup lama atas seluruh tantangan yang dihadapi umat Islam modernis, lebih dari mereka yang berada di arus bawah yang upaya itu belum dapat diwujudkan oleh kelompok umat Islam yang ada saat itu.

Realitas menunjukkan bahwa apabila kelompok muslim perikatan atau kelompok modernis sejauh itu tidak mampu menentukan masa depan bangsa. Halikan ketendangan yang mengedepan adalah terjadinya upaya untuk memisahkan mereka dan tradisi yang telah menjadi bagian intisunk dan perjalanan sejarah dan hidup keseharian mereka. Para ulama pesantren meyakini, bahwa pengembangan Isuuti pada satu sisi, dan penyelesaian persoalan umat, di sisi lain perlu diwujudkan serta harus berangka dan kearifan budaya masyarakat. Sehingga, upaya ulama pesantren untuk

Arif Berteologi di Indonesia: Pengamalan Islam Cendekia
(Jakarta: Penerbit Pustaka 1999: hlm 8-10)

ajaran dan salah satu mazhab yang empat (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Shafi'i, dan Hanbali, pen). Dalam bidang tasawuf, mengikuti ajaran Imam Abu Hasan al-'Asy'ari atau Abu Manshur al-Maturidi, dan dalam bidang tasawuf mengikuti dasar-dasar ajaran Imam Abu 'Utsman al-Junaidi.

Terminologi *Awya* pada awal berdirinya NU ini lebih merupakan penerjemahan konsep sehingga berwujud praksis dan konduktif bagi warga 'Nahdhiyyin'¹ dan mayoritas umat Islam Indonesia. *Awya* nyata yang dahulu mereka saat itu menuntut sebetulnya pola keberagamaan semacam itu yang perlu dikembangkan. Selain itu, signifikansi *Awya* terletak pada karakternya yang selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Dengan demikian, langkah NU untuk pengembangan pola keberagamaan itu merupakan bentuk kontestasi dan apertisasi NU terhadap tradisi dan sejarah. Mereka melihat, Islam sepanjang sejarahnya merupakan agama yang selalu mengalami proses kontekstualisasi dengan ruang dan waktu yang selalu tidak hampir budaya. Para ulama mazhab yang dianut NU

* Zaimanayan, Onofre. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pembinaan Madrasah Kyai Gunung Penanggajene*. (PJS 1992), hlm. 140.

* KH Said Aqil Sirri. *Al-Azhar dan Jama'ah di Awal Abad XXI* dalam Imam Basyir (ed). *Kontroversi Agama Ada Perbedaan dan Perbedaan*. Cempun 1 (Yogyakarta: LKS, 2000), hlm. 138.

* Ibid. hlm. 140.

merupakan salah satu representasi dan tokoh yang berusaha dengan intens melakukan kontrastualisasi tersebut.⁴

Pandangan seperti ini membuat dasar yang cukup luas. Sebab dalam kenyataannya, agama merupakan konsepsi tentang realitas dan sekaligus sebagai suatu realitas sosial. Konsepsi realitas dalam Islam berasal dari wahyu Al Qur'an dan Hadis (Kutub Rasmi) yang dipaparkan sebagai dan transenden dari realitas sosial. Sebagai konsepsi, ia berbentuk *gnosis tradition*. Sedangkan sebagai realitas sosial, agama hidup dan termanifestasikan dalam masyarakat yang berlatar dalam bentuk *little tradition* yang berurat budaya atau tradisi lokal. Sejak awal berdirinya memuat dua realitas agama tersebut sebagai sesuatu yang nyata untuk dihadapi dan diurus yang dikonsepsikan dalam bentuk keterapannya. *Aswaja*

* Imam al-Syafi'i salah seorang Imam Madzhab merupakan seorang mufti yang berani memperdebatkan unsur-unsur ideologi dengan dalil-dalil Metodologi yang disebut dengan metode ilmiahnya menghasilkan rumusan kaidah hukum seperti al-Syafi'i muhakamkan salah satu unsur yang membentuk hukum Islam adalah tradisi atau budaya lokal. (lihat Abdulrahman Wahid "Memurnikan Murnikan Ideologi Nasional dan Agama dalam KH Uthron Hamzah dan Chary Anom Lede. Sebuah Dialog Menemukan Kepastian Ghaib Dari Dapur Para-Jawa Catatan" Surabaya Penerbit Jendela Poes 1989) hlm 55

Aryumandi Azra, *Konteks Berkeadilan di Indonesia* Pustaka Alfabeta hlm 11

Alhasil, Aywa pun jadi pilihan untuk dikembangkan karena dalam pandangan N. beranggapan Islam sebagai agama terbaik. Aywa menaruh perhatian yang amat banyak dalam kehidupan yang beragama, meneliti kan praktik-praktik yang cukup banyak dalam Aywa. Hal itu tercermin dari nilai-nilai Aywa yang mengedepankan moderasi, harmonis, dan toleransi yang didasarkan pada keajaiban kreatif oleh para ulama, khususnya ulama muslimah ke dalam keberagaman mereka. Misalnya perkembangan antara pengetahuan dan teknologi dan nilai rasional dan keefektifan dalam ajaran agama Islam ke dalam realitas budaya masyarakat. Melalui nilai-nilai tersebut Islam diakui sebagai agama yang mampu membawa segala ilmu dan pengetahuan kehidupan yang bermutu, yaitu kehidupan yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu tertentu serta syarat dengan keberagaman dalam berbagai dimensi. Ini adalah perspektif Aywa adalah agama yang tidak mem-persempitkan ajaran keberagaman ini dan tidak melihat berbagai dimensi kehidupan secara eksklusif dan eksklusif. Oleh karena itu, N. M. Hassan Aywa, tokoh utama N. menyatakan, agama dan umat Islam, Aywa, khususnya tidak bersikap kaku dalam pengetahuan agama dan tidak saling bermentangan dalam penelitian. Begitu hal itu merupakan sesuatu yang tidak terpuji di hadapan Allah dan Rasul. Lebih dari umat Islam beragama sama untuk dan agama yang ada di sekitar untuk mengedepankan dialog hingga kepada orang yang tidak

beragama.⁴ Perwujudan ini menunjukkan secara jelas bahwa keberagamaan yang akan dikembangkan Nc adalah pola keberagamaan yang inklusif, toleran, serta aprioritas atas perbedaan dan keragaman budaya, adat, dan agama yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, Islam yang dikembangkan Nc merupakan Islam pribumi yang menjadi bagian intrinsik dari kearifan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia sebagai modal. Nc menunjukkan perhatian sebagai salah satu basis utama pengembangan pendidikan agama Islam Indonesia. Perhatian adalah pendidikan yang sangat mendasar lokal yang serak kemunculannya diwujudkan dalam suatu dialog internal antara akal-rasa dan nilai-nilai Islam. Melalui *intepsi* antara budaya lokal dan nilai-nilai syariahnya, Nc berupaya menghadirkan suatu sistem pendidikan yang sangat potensial untuk dijadikan pendidikan alternatif di Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Demikian pula Nc memiliki penghargaan dan pesertanian yang aktif atas bahasa-bahasa lokal, semesta, semesta-hayang dan *swawijaya* atau terhadap struktur setempat, seperti adat bersusun pta, *selam-meru*, yang dijadikan mustika masjid Jawa. Islam pribumi semacam itu telah menjadikan agama benar benar menjadi 'menyatu' dengan

⁴ Lihat Muhammad Hayyan Agyan, 'Some Advice' dalam Charles Kurzman, ed. *Modernism* (1940-1942 Source Book 10sford: Oxford University Press, 2002), hlm. 388.

masyarakat yang pada dasarnya akan mengantarkan prinsip universalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan mereka mengalir secara cair dan dapat menembusi ke dalam relung-relung budaya mereka.

Isunya pergulatan, lebih tepatnya, dialog kreatif antara agama berbentuk wahyu dan sunnah Nabi, pada satu sisi, dan kenyataan sejarah yang mewujudkan dan dalam budaya dan tradisi lokal yang sangat beragam, pada sisi lain, tidak akan mengguhkan Islam, melainkan hanya mengguhkan manifestasi dan kehidupan agama saja. Dengan kata lain, adanya *little tradition* atau memojokkan ungkapan Rahman, Islam berajah—suatu kemunculan yang harus dilalui ketika agama telah menjadi agama manusia dan harapan dan kehidupannya suatu sejarah adalah realitas yang mesti dijalani umat Islam dalam rangka membumikan Islam melalui penafsiran dan pemertamaan antara realisme dan penguatan realisme dalam ruang dan waktu yang beragam, terbatas, dan selalu berubah. Dialog yang berkesinambungan

* Abdurrahman Ward, *Pengujian Negara Agama dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka, 2001), hlm. 112.

* Fazlur Rahman membagi Islam ke dalam dua bentuk: Islam Normatif dan Islam Sejarah Yang Pertama adalah agama dalam bentuk Wahyu dan Sunnah Nabi yang bersifat absolut sedangkan yang terakhir adalah interpretasi umat Islam atas Islam normatif dan penerapannya dalam kehidupan umat sesuai yang sejarah mereka lihat. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 141.

bungan itu menunjukkan kebenaran rentang ke
beradaan Ismail sebagai agama bira

NU: Antara Bias dan Stigma

Negeri bagian dan arah yang penuh dengan
dinamika dan kehidupan yang tidak berjalan secara
linear sama, N. tidak semuanya ada mengemban
ke arah kreatifitas dan masa yang diemban. Suatu
ketika N. harus menerima kenyataan dalam bentuk
keberhasilan organisasi ke dalam kondisi yang
kurang menyenangkan. Hal itu terjadi, salah satunya,
ketika N. terdapat ke dalam situasi politik prag-
matik seperti kurang waktu — 32 — 1944. Pada masa
itu, kerja kerja kultural dan sosial keagamaan yang
sebelumnya merupakan harapan yang diemban
N. menjadi terabaikan sebagai masa, dan N. harus
N. yang bertanggung jawab atas penyebaran ajaran
Islam ke lingkungan-stal dan penerapan sehingga ke-
giatan ini dilaksanakan secara asal-asalan. Demikian
pula, Islam yang bertugas mengorganisasikan ber-
bagai aktivitas sosial dan ritual keagamaan ke lingkungan
jawa dan ke luar sehingga tidak aktif sebagai hampir
sepanjang periode. Demokrasi Terpimpin. Politik
praktis telah mengantarkan organisasi ini menjadi lem-

Greg Fealy, *Modern Politics in Java, 1932-1967*
Colombo: Yogya, 1965, 2003, 400, 310.

bagi yang tak menggap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam kondisi seperti itu, N¹ (sampai derajat tertentu) telah muncul sebagai kelompok Islam mutakhir, suatu kondisi yang relatifnya bertolak belakang dengan keberagaman N¹ yang sangat mengedepankan moderasi dan nilai-nilai serenu. Perwujudan paling menyuarik dan mutakhir itu adalah terbentuknya paramuliter di N¹. Munculnya kekuatan semacam paramuliter dengan kondisi komunitas yang saat itu relatif terbelakang merupakan perwujudan terwujud yang berdampak sangat jauh terhadap pengustan masyarakat dan budayanya serta hubungan antara budaya dan Islam bahkan sampai ketika N¹ telah menantik dari dari politik pragmatis.

Terbentukannya kerja kultural N¹ dan terwujudnya N¹ dalam mutakhir Islam membuat kehidupan komunitas N¹ dan budayanya, terutama yang di akar rumput benar-benar tidak mendapatkan pencerahan sebagaimana mestinya. Kondisi yang pada akhirnya merupakan nilai budaya masyarakat kini jadi merudal. Bahkan ada kecenderungan dari mereka untuk lebih menyederpakan praktik dan pola-pola kekerasan dalam menyikapi persoalan yang menyangkut mereka. Kenyataan menunjukkan bahwa ketika P¹N¹ melakukan aksi

* Ibid. hlm. 315.

sepihak untuk menanggapi *land reform* secara radikal pada paruh pertama dasawarsa 1940-an abad yang lalu, N1 menemukannya melalui tindakan perlawanan yang bersifat kekerasan fisik dan tidak anarkis sama sekali. Dalam situasi budayanya pun fenomena semacam ini merupakan pengedepan pula. Bahkan ada kecenderungan di kalangan N1 agar itu untuk melihat kesetiaan budaya lokal secara dikotomis. Islam dan akhbaria, atau yang sebaliknya. N1 kurang mampu lagi menemukannya secara alamiah, kritis, dan kreatif. Akhbaria, juga riak, itu menjadi gerakan reaktif yang bersifat *ad hoc*, dan kehilangan sifat keamlannya, serta warganya menjadi mudah, tidak sabar dan jauh dari nilai nilai transformatif.

Meskipun harus itu bukan fenomena tunggal, tapi N1 harus tetap membayar mahal. Kekurangmampuan dalam mencerna-mahikan dan mengembai via dan mau nya telah menyudutkan warga N1 menjadi kelompok perifer yang hanya diperistiwahkan karena aspek kuantitasnya. Dalam ungkapan Gus Mus, orang dan sering menggunakan pointer N1 sedangkan yang N1

* Lihat Abad, hlm. 21-22

* Kesemoulan ini saya anggap berdasarkan terjadinya pertentangan cukup sengit di kalangan masyarakat Banyuwangi dalam pengembangan kawasan pada pertengahan dasawarsa 50-an abad yang lalu. Lihat Hedi Ansograyati "Yang Dirac: Yang Dipua: Suatu Garisung Menyarak Hegemoni Agama dalam Masyarakat Kebudayaan Dataran", Edisi 01 Tahun 1/2001, hlm. 43

senantiasa sangat peduli mendapat manfaat dari NU dan warganya bahkan dia lebih takut dan khawatir tertentu, termasuk penguasa, untuk merusak kepentingan dan mereka meninggalkannya ketika merasa tidak memburuhkannya kembali.

Inklusinya, kondisi tersebut masih diperparah lagi dengan munculnya semacam NU pribadi sebagai contoh, orang-orang tertentu, adalah kondisi, nilai-nilai, misi atau tekanan penguasa, menjadi bagian integral dirinya sebagai NU. Pada saat yang sama, hal itu memberi peluang lebih besar kepada orang dan kelompok tertentu untuk mengeliminasi atau dan meneguhkan stigma terhadap NU dan komunitasnya.¹⁴

Kritik 1926 dan NU ke Depan: Pengembangan Kearifan Lokal

Kelemahan yang dialami NU semacam itu menjadi salah satu faktor dasar yang memunculkan upaya para tokoh organisasi ini untuk memertemahkan kembali visi idealnya dan merumuskan ulang misi yang

¹⁴ KH A. Mustafa Bin "Dengan Pergeseran NU Besar" Potensi dalam Jurnal *Eshtimal Adhar* (Edisi No. 6 Tahun 1999) hlm. 75.

¹⁵ kaum modernis dan kebanyakan pengikut Barak menganggap NU sebagai organisasi yang oportunistik, ketidaksiapan zaman atau stigma-stigma lain yang menandakan organisasi kalangan pesantren ini. Lihat misalnya: Khalid Gerges Fathy (Jihad Purna Umat: Separasi NU, 1952-1967) hlm. 2-11.

diembannya. Pada tahun 1984 upaya itu memunculkan momentum dalam bentuk lahirnya Nt kepada Khalifah 'Uy, suatu penarikan diri dari dunia politik praktis dan segala aktivitas yang berkaitan dengan hal itu. Nt mengabdikan diri di dunia sebagai anggota atau organisasi yang keagamaan, ketegakannya di dunia berdunya.

Sering dengan itu, para tokoh Nt memuat ungkahan dari upaya untuk mengembangkan kegiatan yang berwujud intelektual, sosial, keagamaan, dan budaya. Hasil konkret dari upaya itu adalah berkembangnya kajian-kajian kreatif transformatif dalam dunia keagamaan. Kajian-kajian keagamaan yang lebih dikenal dengan sebutan *kitab-kutub* yang telah bertahan lama di kalangan warga Nahdhiyyin diungkap baru dengan mengungkap persoalan-persoalan aktual baik keagamaan maupun persoalan kebudayaan dalam berbagai aspeknya. Selain itu, suatu sistem kajian kitab dalam bentuk yang lain juga mulai diperkenalkan. Sistem ini, selain terdapat kajian-pustaka muda, juga memulika kajian cukup "menantang" melalui pengembangan metode-metode pemahaman kitab secara kritis dan fungsional, di kalangan pesantren, serta pengujian konsep-konsep keagamaan yang terdapat dalam khazanah intelektual diaduk-kunung dengan konteks kekinian atau bahkan

lihat Abdul Muhsin QZ, *Berkah Maseki Tradisi Akademis Islam dan Tradisional dalam Jurnal Gribang*, 2 v (2007) him. 09-10

dengan berbagai disiplin keilmuan dan sumber yang lain. Dengan demikian, kegarahan mata, keagamaan yang menantik minat hankak kalangan muda N1, itu dapat mendapatkan urutannya yang telah luam dengan itu dan tidak yang sangat mendesak untuk diselesaikan.

Khusus 26 orang merupakan secara total orientasi dan bentuk penempatan apasah N1. Orientasinya yang semua bersifat politik formal yang berorientasi secara nasional dalam sistem negara berstatus menjadi gerakan bawahan dengan orientasi menentang kesadaran kritis masyarakat dan tidak peduli dengan masyarakat umum.¹

Dengan perubahan orientasi itu, masyarakat Muslim kalangan bawah yang umumnya warga Nahdhiyin yang selama N1 aktif di pentas politik praktis hampir terlupakan masalah-masalah secara umum melalui penggantian mereka dalam berbagai bidang. Mereka hanya untaikan minimal pengetahuan di bidang ekonomi, keteknikan atau pengembangan pendidikan masyarakat menuju arah yang mulai diarahkan secara aktif oleh lembaga-lembaga otonom N1 atau pesantren yang memiliki hubungan kultural dengan N1.

Sementara, upaya-upaya N1 pasca Khittah belum dapat melepaskan risiko dan belenggu keterbelakangan

¹ Laode Idris, "Mu Ere Reformasi dan Pasca Gue Dur: Problem Kritis dan Negeri Gerakan Sosial" dalam Jurnal Tashawuf Al-Iqbal (Edisi ke-6 Tahun 1998) no. 6.

Tersuburnnya mereka dalam kurun waktu yang cukup lama membuat mereka mengalami semacam kesulitan untuk mengemukakan diri dan pendapat akar akar ke terbelakangan kehidupan. Aswaja yang menjadi motivasi mereka belum mampu mengantarkan mereka untuk bisa menyikapi secara kritis dan kreatif fenomena yang berkembang: sosial, politik, ekonomi, atau agama. Akibatnya mereka tetap sering ditakluki kelompok lain dan menjadi korban kepentingan dan karnalaghitam dalam berbagai persoalan yang menimpa negeri dan bangsa ini.

Kenyataan itu menuntut *Ni* ke depan untuk bisa melakukan langkah langkah terobosan yang inovatif dan sistematis. Krik Gus Mus (Kris A. Mustika Han) bahwa sampai saat ini *Ni* masih belum menampilkan diri sebagai suatu *komunitas* (komunitas) dan bukan sebagai *komunitas* organisasi¹ perlu mendapat tanggapan secara positif melalui pengembangan organisasi secara lebih sistematis, penataan yang secara lebih kreatif, pemaknaan atas nilai-nilai Aswaja secara kontekstual, serta pengembangan program pengkaderan mahasiswa secara lebih intensif dan elastisif.

Bersamaan dengan itu, kajian kajian intelektual yang kreatif perlu diberikan ruang yang lebih luas dan dukungan yang lebih kuat dan sistematis sehingga

¹ Kris A. Mustika Han, "Dengan Perjanjian HJ Bani" hal 79

upaya pengembangan Aswaja dari *mafi-hub aswaja* (ke pergarutan terhadap satu pendapat menjadi *mafi-hub aswaja* aliran metodologi) dapat diapresiasi dan dikembangkan di bawah naungan nilai-nilai yang telah menjadi karakteristik Aswaja. Hal dinamika Aswaja itu, kajian kreatif terhadap persoalan nilai, budaya, kegunaan dan relevannya perlu menjadi ruh dan jiwa N. ke depan. Demikian pula, pertautan antara nilai-nilai Islam, pada satu sisi, dan budaya lokal, pada sisi lain, perlu terus dikembangkan melalui proses dialektis yang selalu serta ditaklukkan dalam suatu kepulauan kepulauan yang kukuh sehingga akan melahirkan suatu budaya yang benar benar mengakar di masyarakat, serta mampu mencerahkan kehidupan mereka. Dengan demikian, Aswaja bisa ditempatkan secara dinamis, berkesinambungan, dan penuh tanggung jawab ke dalam konteks perkembangan kehidupan umat.

Selain itu, Aswaja diharapkan dapat mengappraisasi secara terus menerus dan mengkritisi kreatif budaya budaya lokal yang hidup tersebar di tanah air. Hal ini menjadi tugas untuk dilakukan karena sejarah membuktikan bahwa aset Islam yang potensial sangat besar adalah *sejarah* sejarahnya yang sangat runtut bahwa sejak awal telah memberikan ruang yang luas dalam dialektis. Berdasarkan kemauan mengakui secara terus bahwa tradisi Islam dibentuk dalam waktu dan selalu terkait dengan dimensi sejarah itu.

memerkuat Islam dapat melakukan penelitian sendiri untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang adat istiadat, seni budaya, tradisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kondisi warisan budaya dan dalam keasliannya yang kreatif. Sejak awal kedatangannya di Indonesia, kaum muslimin itu yang telah disebarkan ke seluruh kawasan Nusantara sehingga Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat di suatu perantara. Kemampuan Negeri melakukan itu akan membuat pemerintah Kabupaten tentang kaum Indonesia yang dapat mengembangkan tradisi Islam yang religius yang berakutasi sebagai makna, dan selanjutnya Islam dan kreatif akan berakutasi nyata di negeri ini.

Serangkaian aktivitas yang berakutasi diwariskan oleh tradisi dan praktik tersebut tentunya harus diwariskan atau entitas yang memuat sehingga berakutasi nyata dalam kemasyarakatan warga dan masyarakat yang luas. Dengan demikian, masyarakat—terutama komunitas Negeri diharapkan akan mengalami transformasi dalam bentuk pencerahan hukum sebagai masyarakat sipil yang keadilan dan berkeadilan. Dalam kondisi itu, mereka akan selalu mengedepankan kemanusiaan, pengembangan solidaritas sosial, pluralisme demokrasi dan

* Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conquest and History in a World Civilization*, The Guildford, Ernest and Monart, 1969, vol. 3 (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1974), hlm. 237.

* Lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 128-129.

keadilan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga keadilan dan kesejahteraan akan tercapai akan dalam bumi pertiwi

Tentunya, sebagai salah satu organisasi yang menganut pluralisme ¹¹ dalam upaya menganjurkan masyarakat kepada kebutuhan yang transformatif tersebut harus dapat bekerjasama dengan umat dan agama yang lain — dengan demikian, selain merupakan kemestian karena elemen bangsa ini sangat beragama, termasuk agamanya — hal itu juga akan membuktikan bahwa pluralisme ¹² adalah realitas spiritual dan organis tersebut ¹³

METODOLOGI PEMAHAMAN KEAGAMAAN*

Islam di antara pengikutnya sebagai agama yang memiliki nilai dan ajaran universal yang dihayati dan sebagai prinsip dasar bagi umat Islam dalam kehidupan mereka serta untuk menyalurkan berbagai kehendak dalam kehidupan dimediasi pada aspek ruang dan waktu. Universalisme Islam itu terikat erat dengan keberadaan Al-Qur'an sebagai sumber pokok yang bernilai ilahi, transendental dan mutlak yang diutus Allah SWT yang datang dari Muhammad dalam kedudukannya sebagai pembawa risalah Islam, sampai derajat tertentu, mengandung nilai nilai universal tersebut.

Untuk menjabarkan nilai-nilai Islam itu *maib* dalam kehidupan konkret, umat Islam diharuskan untuk memahami masalah yang diandung kedua sumber ajaran tersebut dan pada gilirannya melakukan kontekstual

Disampaikan dalam Musyawarah Penelitian Islam di Lingkungan NU diadakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Sukorejo pada 3-5 Oktober 2003

usia, dengan realitas kehidupan yang dialami mereka dan umat manusia secara keseluruhan. Pada intinya, pemahaman identik dengan penafsiran. Kondisi ini memotivasi mereka untuk mencari suatu metode yang mampu agar makna dan segala yang berkaitan dengan hal itu dapat diuraik secara utuh ke permukaan dan mencerminkan makna dan tujuan alam sendiri.

Pencapaian ke arah itu menuntut umat Islam untuk melakukan pemahaman tentang arti dan esensi Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi dan kaitannya dengan bahasa agama secara umum. Berdasarkan pengertian itu, penelusuran terhadap penafsiran keagamaan yang bertanggung bersama ini, dan langkah langkah penelitian melalui upaya dan pengetahuan atas metodologi yang sesuai akan perlu diwujudkan secara terus menerus. Dalam rangka memahami atau menginterpretasikan metodologi tersebut, peranan umat atau hubungan keimpuan Islam perlu diidentifikasi secara bersama-sama.

Al-Qur'an dan Bahasa Agama

Umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Ilahi. Menurut al-Ghazali, wahyu ilahi merupakan *kalimat ilahi* yang *qabul* dan *intuisik* dengan *dzat* Allah serta bebas dari huruf dan bunyi. Ketika wahyu

1. Lihat al-Ghazali, al-Ikhtisar II al-Risalah Cawakan (Bihar Durr al-Mahud al-Mayan, 943, no. 73 dan 78).

itu harus disampaikan kepada manusia, maka ia dirupakan dalam bentuk *Al Qur'an* yang berbahasa Arab sehingga manusia dapat memahami pesan agama yang bersurat ilahi yang terkandung dalam *Al Qur'an*.

Hubungan Kalam Allah yang yadim dengan *Al Qur'an* yang terdapat dalam mushaf, adalah hubungan antara penanda dan petanda. *Al Farabi* menjelaskan, Kalam Allah adalah petanda *ma'na*¹ sedang huruf-huruf dalam mushaf adalah petanda *ma'na*² dan bukan petanda itu sendiri. Dengan demikian naksan, hatulan, dan ruktba yang terdapat dalam *Al Qur'an* termasuk petanda terikat yang menunjuk kepada wahyu ilahi, yang bersifat universal, dan metafisik. Maka itu merupakan penanda atau petanda yang tak terikat.

Keteradaan *Al Qur'an* tersebut menunjukkan bahwa bahwa wahyu ilahi khusus dan bahasa agama, secara umum, lebih menunjukkan dan sebagai wahyu sumber metafisik yang memuat kekuatan makna dan pesan ilahi tidak terikat yang berada di balik simbol simbol yang terungkapkan tersebut. Kevastan itu mengantarkan wahyu kepada keteradaannya sebagai sumber rujukan yang bersifat meta perennial.

Dasar yang bersifat metafisik itu menunjukkan bahwa *Al Qur'an* benar benar sesuatu yang abadi dan

¹ Ibid, nm 80

merupakan perintah Allah' karena manusia tidak dapat menciptakan atau mengembangkan nilai-nilai moral. Penekanan Al-Quran terhadap aspek moral menjadikan kehadirannya benar-benar untuk memelihara manusia dan kehidupannya. Dengan demikian, Al-Quran hadir merepresentasikan wahyu untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang bebas dari muatan pragmatis, sempit, dan sesat. Ia akan menjadikan manusia wapa memaktui kehidupan dan mengukir tujuan kehidupan yang sebenarnya.

Kejelasan dan keluasan maknanya, serta pesan-pesan moral yang ditimbulkannya menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai *prophecy discourse* yang menurut Arifun, merupakan wacana yang membicarakan situasi batas kondisi manusia termasuk keberadaannya, cinta kasih, hidup dan mati.⁴ Karakteristik kaum ke-nabian terletak pada penekananannya pada aspek keberanian, kebaikan, dan keadilan sebagai kekuatan kewaan dalam rangka menarik manusia pada *al-habibul ulofa*.⁵ Jika kekuatan itu perlu menjadi dorongan moral bagi setiap manusia, terutama umat Islam, untuk melaku-

⁴ Fakir Rahman, *Islam: Ethics, Beliefs* (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1978), hlm. 32.

⁵ Lihat Johan Meulman, "Pengaruh Khawarij Hidup dan Lahir Berikhsang Muhammad Arifun dalam Muhammad Arifun: *Ma'at Islam dan Ma'at Modern Berbagas Tindakan dan Jalan Baru* (Jakarta: UIIS, 1994), hlm. 24.

⁶ Muhammad Arifun, *The Unthought of Contemporary Islamic Thought* (London: Sae Books, 2002), hlm. 60.

kanin¹. karena pada tiga hal itu terdapat ketidakjelasan sejak sebelumnya, segala kekuatan yang bertentangan dengan ketegasannya perlu dihindari, sebab setiap sikap dan perilaku manusia akan dihadapkan kepada suatu pertanggung jawaban yang pasti terdapat dalam pengabdian esensi juga yang benar-benar mencerminkan keadilan.

Problematika Pemahaman Bahasa Agama

Pemahaman sebagai suatu perwujudan menjadikan petir akal sama sekali tidak dapat diabaikan. Bahkan ketika seseorang mendahulukan teks dan rasionalitas, maka hal itu sebenarnya memimpikan adanya pengaruh esensi yang telah memusyawarakannya untuk melakukan preferensi tersebut. Teks menjadi tergantung pada akal sehingga proses semacam ini bersifat *ad hoc*.² Dengan demikian, penggunaan penanda teks juga bersifat hipotetis.

Dalam perspektif itu, persoalan yang penting perlu diperhatikan adalah kemungkinan terdapatnya subjek nyata yang berbau dengan arti suatu teks. Pandangan pandangan aliran, kepentingan di luar kepentingan teks atau muatan muatan lain yang sejenis, sengaja atau tidak, bisa masuk ke dalam proses pemahaman itu, dan dianggap sebagai bagian dari arti dan maksud teks. Dalam realitasnya, pemahaman seperti itu sering

¹ Lihat Fahrudin al-Razi, *Kalām al-Muḥaḥḥalīn* (Cetakan 1) (Kairo: Maktabah Dar al-Turāth, 1981/1402, hlm. 147).

renyah ketika penafsirannya bersifat *ad ha*, dan sepoting-poteng Makna substantia teks yang hincihik berhasil jadi pandangan yang parsial serta kehilangan nilai nilainya yang bersifat potensial. Teks suci dihadirkan sekadar menjadi alat untuk membenarkan pandangan tertentu, dan mencahahkan pendapat lain. Al-Qur'an dijadikan satu ideologi paling ampuh untuk mendukung kelompok atau aliran tertentu.

Frete kutannya dengan masalah tersebut adalah penafsiran yang hanya menitikberatkan pada aspek literasi skriptualis. Latah-latah yang terungkap dalam teks dianggap sebagai makna teks itu sendiri. Teks direduksi dan aspek kontekstual yang mencakup, melingkupi, dan membayang bayang kehadiran teks. Al-Qur'an yang sepatutnya bersifat terbuka lalu menjadi sebuah korpus tertutup yang dimaknai secara tunggal dan kering nuansa.

Masalah akan menjadi kian runyam ketika penafsiran atau pemahaman dianggap merupakan arti atau makna teks yang definitif dan final. Dengan kata lainnya, pandangan semacam itu sering sekali menverrukan ke permukaan, menjadi semacam ideologi yang diangkat oleh kelompok tertentu. Mereka mengkuam, eksplisit atau implisit, sebagai kelompok yang nyana satu-satu.

Bandingkan dengan Muhammad bin Sulaiman al-Kafri, *Al-Taysir fi Qand al-im al-Asar* (Cetakan 1: Daraya & Riyadh: Dar al-Da'ir, Dar al-Riba, 1990/1410) hlm. 134-135.

nya merepresentasikan kebenaran. Pada gilirannya hal itu akan mengantarkan mereka kepada pengabuan peradaban lain yang beragum, atau bahkan berkeadilan bahwa peradaban yang berbeda dengan mereka dianggap tidak sah, sesat, dan batil.

Melewatnya percobaan tersebut dalam penafsiran Al-Qur'an dan pemahaman atas Sunnah Nabi akan menjadikan teks-teks suci dan esensial Islam kehilangan karakternya yang transformatif. Selain kehilangan humanitas mutlakannya, Al-Qur'an akan mereduksi menjadi kumpulan doktrin mati yang kehilangan dinamika dan vitalitasnya. Demikian pula hal yang akan merumpa terhadap Sunnah Nabi. Anak-Nabi dengan keintelek historis yang jauh berbeda dengan kondisi kepekaan saat ini "dipaksa" hadir kembali dalam pola dan bentuk yang terus sama saat Rasulullah di Arab pada abad ke-7 Masehi. Dengan demikian, nilai, ajaran, dan esalah yang ditawarkannya akan menampakkan diri sekatar berbentuk formalitas yang kering dan tidak menyentuh arti, pesan, dan tujuan agama yang hakiki.

Alhasilnya, umat Islam akan terjebak dalam sikap apologetik yang dimunculkan dalam slogan slogan kosong yang sulit disuburkan ke dalam realitas konkret. Mereka menjadi gema yang menghadapi kehidupan dan sangat rentan dalam menanggapi persoalan yang mereka hadapi. Hal itu selain tidak akan mampu mendewasakan umat Islam, juga akan mengantarkan mereka dan

kehidupan secara keseluruhan kepada kondisi yang cukup kritis. Pada sisi itu, ancaman besar besar menghadang di hadapan mereka.

Pengembangan Metodologi Urgensi dan Tawaran

Berangkat dari paparan di atas, langkah yang kemudian harus dilakukan adalah mencari metodologi tepat yang diharapkan mampu memperhaluskan kaum Allah yang telah berbentuk sintaksis itu tetap tetap memperhaluskan nilai nilai dan pesan universal Allah. Ia harus terbebas dari sangkutan ruang dan waktu tertentu, dan pada saat yang sama, nilai dan arahnya perlu diaktualisasikan dengan situasi historis konkret yang dihadapi umat Islam dan keseluruhan umat manusia sehingga mampu dijadikan dasar bagi mereka dalam menjalani kehidupan yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan dan keterbatasan.

Dalam konteks itu, metodologi penafsiran yang bermuara hermeneutik tidak ada salahnya dijadikan sebagai salah satu perombangan. Metodologi ini didasarkan pada gerakan ganda *double movement*. Pertama adalah gerakan dalam bentuk lapan intelektual yang dimulai dari situasi saat ini menuju ke situasi ketika turunnya Al-Qur'an, dan kedua, gerakan dari turunnnya Al-Qur'an ke saat sekarang. Gerakan pertama tersebut terdiri dari dua langkah. Langkah pertama adalah

upaya pemahaman kepentingan atau arti suatu pernyataan Al-Qur'an melalaui kapan atau situasi atau problem historis yang terkait dengan pernyataan Al-Qur'an tersebut. Untuk itu, kajian umum terhadap situasi makro tentang masyarakat, agama, adat istiadat dan lembaga, serta kehidupan Arab secara keseluruhan pada saat datangnya Islam menjadi dasarnya untuk dilakukan.⁶ Menurut proses inilah, pemahaman yang utuh dan penuh mengenai kehidupan Arab saat itu dan hubungannya dengan kedatangan ayat-ayat tertentu diharapkan umpak dan benar-benar jelas.

Langkah kedua, melibatkan generalisasi pernyataan-pernyataan Al-Qur'an yang bernilai "jawaban" terhadap situasi spesifik tersebut, serta mengungkapnya sebagai *dalil* yang menggariskan tujuan sosial-moral umum yang disaring dari teks-teks spesifik yang terus dibayang-bayangi latar belakang sosial historis dan *realisasi* *ayat* yang sering diwatakannya.⁷ Dengan demikian, makna yang utuh dan substantif dari Al-Qur'an diupayakan dapat diketahui secara cermat dan sistematis sehingga terpaduan antara satu ayat dengan ayat lain dan tujuan Al-Qur'an itu terdapat terkuak dengan jelas.

⁶ Lihat Fakhr Rahnem *Islam and Modernity: Transmutation of an Intellectual Tradition* (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 3-8.

⁷ *Ibid.* hlm. 6.

Setelah gerakan yang pertama itu selesai, gerakan selanjutnya adalah merumuskan prinsip generalisasi itu ke dalam pandangan spektik dan mengimplimentasikannya ke dalam kekinian. Nilai nilai umum yang universal itu ditubuhkan ke dalam konteks waktu, historis-kontekstual yang dihadapinya agar masyarakat dalam kekinian. Hal ini juga menuntut semacam kajian cermat mengenai situasi sekarang, dan analisa yang beragam unsur-unsur sehingga situasi saat ini dapat diurai dan diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan, serta prioritas-prioritas baru dapat dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an yang telah disegarkan. Gerakan kedua ini juga berfungsi sebagai tindakan koreksi terhadap hasil yang pertama. Tindakan koreksi mengaplikasikan nilai-nilai itu ke dalam konteks kekinian menunjukkan adanya kegagalan dalam menilai situasi kekinian dengan tepat atau kegagalan dalam memahami Al-Qur'an. Melalui metode ini, keterbatasan diusahakan dapat menghubungkan arti aktual makna yang bernilai permukaan, dan sekaligus membuka kepada subteks makna yang dalam. Oleh karena itu, sikap kritis dan objektif dalam melakukan pemahaman dan interpretasi terhadap teks menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemahaman itu sendiri.

* Ibid. Hal. 7

¹ Nasser Hamed Abu Zaid, *Intepretasi al-Qur'an*, 1996, 44

Secara prinsip, interpretasi ini berada dalam arus *mainstream* dan *mainstream*. Dengan objektivisme, teks atau segala sesuatu yang terkait dengan keagamaan, dilihat dan diinterpretasikan berdasarkan konteks sendiri dan tidak sekeagamaan adanya. Dengan objektivisme itu, rasionalitas dikombinasikan dalam bentuk menghasilkan teks dan tradisi keagamaan itu lebih intelektual dengan koherensi logika.

Interpretasi hermeneutis tersebut seluruhnya diarahkan untuk menemukan makna sebagaimana yang diketengahkan Al-Qur'an, dan menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an benar-benar hidup. Akan tetapi, sebagai persepsi pemahaman, unsur subjektivitas memiliki peluang untuk terjadi untuk menghindari hal tersebut, setiap penafsir hendaknya menggunakan pendekatan historis yang serius dan jujur. Dalam kerangka ini, apresiasi kritis dan objektif terhadap khazanah keilmuan klasik Islam menjadi perhatian yang perlu diperhatikan.

Di samping itu, untuk mengurangi penafsiran subjektif, para penafsir harus mematuhi setiap chapter *asumsi-asumsi* yang berlatar umum berkenaan dengan penafsiran Al-Qur'an secara umum. Dengan kata lain penafsir diwajibkan untuk menetapkan *asumsi* dan *premis* *premis* yang khusus berkenaan dengan masalah-masalah yang khusus dalam Al-Qur'an.

* Lihat Muhammad Abdul-Jabbar, *Real Hermeneutics dalam Tafsiran* (Cetakan ke-2), Yogyakarta (2000), hlm. 28.

Sebaliknya, ketika asumsi-asumsi diratalkan secara eksplisit, maka pertukaran pendapat dan diskusi di antara para penatua memungkinkan terarah dan selaras implikasinya subjektivitas akan lebih banyak dikurangi.⁴ Karena dialog dan keterbukaan akan selalu mengarahkan kepada kebenaran.

Subjektivitas dalam suatu peraturan dan pendeklarasian atas teks tertentu tidak mungkin dihindarkan sama sekali. Sebab setiap pendapat melibatkan suatu sudut pandang masing-masing. Perbedaan itu tidak berbahaya selama sudut pandang itu tidak mendiskreditkan objek pandangan dan sekaligus juga membuka diri bagi visi dan penutangan pandangan orang lain. Suatu perbedaan itu sehat, asalkan masuk akal. Selama perbedaan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan keagamaan, selama itu pula suatu perbedaan dapat diapresiasi.

Terikat dengan itu, dialog yang sehat menjadi mutlak untuk dilakukan. Melalui diskusi dan dialog (yang terus menerus), suatu Islam dapat menertibkan beberapa peraturan dan meniadakan beberapa peraturan yang lain. Sebuah peraturan lama harus diterima terus. Peraturan-peraturan baru selalu dimungkinkan.

⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (ibid. 144).

⁵ Fazlur Rahman, *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*, dalam *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 11 (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), hlm. 380.

untuk selalu dikembangkan, aa, dan menjadi proses yang terus berlanjut. *Adanya* yang perlu dikembangkan meliputi segala aspek yang dihadapi, dan seks ketertarikan hingga tradisi yang merupakan ruh yang dimiliki umat Islam. Proses yang berkelanjutan itu diharapkan dapat berlabuh pada pengembangan pemahaman keagamaan yang relatif holistik, substantif, dan memberikan ketahanan yang mutlak. Akan tetapi, penafsiran selamanya tetap akan menjadi pemahaman yang bersifat mutakhir dan tidak akan pernah menjadi kemutlakan yang tanpa batas.

Pada akhirnya, nilai nilai budaya di atas perlu diartikan ke dalam rumusan-rumusan *apudable* yang dapat menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menanggapi kehidupan dalam berbagai dimensinya. Untuk itu, ilmu hukum, akhlak, dan juga perlu direvisi instruksi pemerintahan juga sehingga terdapat interdependensi kedua antara ketiga keilmuan dasar Islam tersebut.⁴

Kesalingtergantungan tersebut diharapkan akan menghasilkan pengembangan keberagaman arah dalam bentuk keimanan yang kokoh, memantapkan nilai nilai moral etika yang transformatif dan dapat diadopsikan ke dalam norma hukum yang merepresentasikan secara utuh nilai nilai hukum tersebut. Pada

⁴ Fakhur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 143.

⁵ Fakhur Rahman, *Islam dan Etika dalam Islam*, Terjemahan dalam *Al-Hikmah* (No. 9 April-Juni 1993), hlm. 32.

tataran itu ketuntasan yang akan datang dan kerahmatan akan menjadi kepastian itu sendiri dan apa yang akan

Aswaja Sebagai Basis Pengembangan

Secara teoritis pengembangan metodologi dan kompetensi di lingkungan warga Muhammadiyah sepatutnya berpengaruh besar untuk mendukung keberhasilan Paradigma Aswaja yang menjadi arahan yang harus dipegang, tercapainya pengembangan spiritualitas itu. Nilai-nilai Aswaja yang moderat, proporsional, toleran, dan seimbang, memerlukan peranan kuat untuk mengembangkan metodologi yang berarahkan pada pemahaman teks secara menyeluruh, kreatif dan jauh dari kaum kebenaran sepihak. Sebagai modal, berdasar pada prinsip moderat dan seimbang, keimanan \mathcal{N} diuntut untuk melepaskan diri dari sikap sepihak seimbang atau antara satu teks keagamaan dengan teks lain secara berkecenderungan sehingga akan memunculkan pemahaman yang utuh, tidak parsial dan tidak eksklusif.

Pemahaman tersebut merupakan bahan cukup subur bagi tumbuhnya keberagaman yang relatif dapat mencakup makna secara utuh dan membumikan nilai-nilai universal untuk ansat kaum, seperti keadilan, kesetaraan, substantif, moral dan sebagainya. Melalui pemahaman tersebut, agama akan menjadi prinsip dasar bagi proses pencerahan yang memantulkan

na dan melestarikan kehidupan berdasar pada fitrah manusia dan karakter alam sendiri.

Sekarang, perkelompoknya berpulang pada komunitas N, serdadu untuk membaca Aswaja secara arif dan bertanggung jawab, serta mengembangkannya sesuai kondisi keakuan. Jika kita konsisten dengan Aswaja, maka kita akan menjadi kelompok yang relatif dewasa dalam hidup dan beragama. Kita akan menyaksikan kekuatan serta kelemahan kita sehingga kita dituntut selalu mempertuak wawasan, serta dapat menghayati setiap perbedaan, dan melestarikan semua perbedaan dalam suasana yang penuh damai. Akan tetapi, jika kita menjadikan Aswaja sekadar simbol, atau bahkan "agama" baru) dan tidak mengadopsinya sebagai nilai-nilai yang benar benar hidup, kita akan terperangkap menjadi kelompok eksklusif. Kita lalu menguam bahwa kebenaran hanya milik kita dan hanya kelompok kita yang dapat menentukan benar salah, haq bathu, dan sebagainya, inilah yang akan kita pilih dan kita kembangkan ke depan.

Perluas pengambilan keputusan yang merdeka kita, mereka tentu tidak akan memilih jalan yang terakhir ini. Mereka pasti akan mengembangkan mode ke beragama yang benar benar hidup yang memukhi apresiasi tinggi terhadap kehidupan dan hal-hal yang terkait dengannya. Semoga C

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im [197-2002 "Bahtsul Masa'ul Tradisi Akademis Muslim Tradisionalis" dalam *Jurnal Cerlang*, 12 V
- Abdurrahman Wahid. 1981. *Ma'arif di Tengah Pergumulan*. Jakarta: LEPPENAS.
- . 1984. "Akal Usul Tradisi Kedudukan Pesantren" dalam *Jurnal Prastara*, No. Perdana, Oktober-Desember.
- . 1988. "Paradigma Pengembangan Masyarakat melalui Pesantren" dalam *Jurnal Prastara*, No. 3-Vol. 3.
- . 1997. "Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa ini," dalam Taufik Abdullah dan Sharon Sidique *ed.* *Tradisi dan Kebang*

Akhlak Islam di Asia Tenggara. Cetakan I, Jakarta: LP3ES.

————— 1989 "Menelusuri Hubungan Ideologi Nasional dan Agama" dalam H.M. Imron Hamzah dan Chazul Anwar, eds. *Sebuah Dialog Menuju Kejayaan. Cita Dan Diadiri Kita Kini*. Cetakan I, Surabaya: Penerbit Jurna Pori, 1989.

————— 2001 *Pergerakan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta: Deuntara, 2001.

Ahmad Basa 2000 "Islam dan Civil Society di Indonesia: Dari Konservatisme Menuju Kritik Riset Redaksi *Jurnal Pictometer* (Jknp) Edisi No. 7

A. Mustafa Bui 1999 "Dengan Penjumlahan, No. Besar: Polemik dalam Jurnal *Pictometer* (Jknp) Edisi No. 6

As. Hikam 1994 "Khutbah dan Penguatan Civil Society di Indonesia: Sebuah Kapan Elaborasi Struktural Aras N... sejak 1984, dalam *Ilmu H.M. Dharsono, ed., Cita, Part VI dan Marq... rikat Jknp*, Cetakan I, Yogyakarta: Jknp Pustaka Pelajar 1994

————— 1999 "Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia" dalam Jurnal *Paramadina*, Volume I, Nomor 2

— 1985 'Kekerasan Negara, Militer dan Budaya Primitif dalam Demokrasi Merintangan di Indonesia' dalam Ahmad Nuzuli ed. *Kekerasan dalam Perspektif Indonesia* Jakarta: Grafindo P3M

Asumarchi Vera 1994 *Jateng: 1.000 Tahun Tengat dan Kepuhuan Nusantara* (Jed N. 1.000 tahun VI) Mizan. *1.000 Tahun 1.000 Pemikiran 1.000 Tahun 1.000 di Indonesia* Cetakan I Bandung: Penerbit Mizan

— 1991 *1.000 Reformasi: Dinamika Politik dan Perubahan* Cetakan I Jakarta: P. Raja Grafindo Persada

— 1992 *Konflik Bersejarah di Indonesia: Pengantar 1.000* Cetakan I Jakarta: Paramorina

Bachhar I trena 1985 'Nida Kurni Satrio dalam M. Dawam Rahardjo ed. *Pengantar 1.000 Persaingan*, Cetakan Pertama Jakarta: P3M

A. Baghidah 1993 *di Fery Jura di Fery di Maktabah di Asturyah*

Barton, Gregory James. *The Emergence of Neo Modernism: a Progressive Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia* (Textual study) Examining the Writing of 'Nurhuda' Mardha. *Journal of Islamic Studies*— Ahmad Wajah and Abdurrahman Wajah 1968-1980.

- Brecher, Josef 1980 *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* London, Boston, New York: Routledge & Kegan Paul.
- Danu, Dhakwaz 1990 *Janusyang Gerak Transi: Antara Sosial dan Modern* (Cetakan 1, Jakarta: PAM
- 1993 "Langkah non Politik dan Teknik N1" dalam H Djas H P (Dharsono ed.) *Contemp. N1 dan Masyarakat* (Cetakan 1, Yogyakarta: LKIS
- 2003 *Kepercayaan dan Kekerasan dalam Negara* (Jude Bara Cet 1 Jakarta: PT Cernedia Pustaka Utama
- Fatm Saefullah Fatah 1999 "Kekerasan Politik, Aksi Negara dan Respek Massa" dalam Arif Sudhan ed.) *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi* (Cetakan 1 Jakarta: ISAF
- Indang Turmudi ed. 2004 *Nahdlatul Ulama, Ideology, Politics, and the Formation of Abstrak* (Cetakan 1 Jakarta: PP, PMA and NU
- Jack Hand 2003 "In Search of Progressive Islam Beyond 9/11" dalam Chudhafi ed. *Progressive Muslim on Islam, Gender, and Pluralism* (Cetakan 1 Newworld

Fr. Wahono Napitawira 2001 *Teologi Pembibaran: Sprak Malar, Protas dan Lampu Ceritaan Pertama*, Yogyakarta: LKIS

Al-Ghazali 1987 *al Iqbal fi al 'Aqid* (Setakan 1), Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah

————— 1986 *al Risalah al 'Aduniyah*" dalam *Mayma ab Ratan al 'Imam al 'Ashari al 'Uthas al-Malagha, Mubay al 'Irfa al-Kadab al 'Adunyah, Fathas al 'Afaqat* Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah

————— 1987 "Raudhah al 'Ishah wa 'Imdah al 'ahkin dalam *Mayma ab Ratan al 'Imam al 'Ashari Raudhah al 'Ishah wa 'Imdah al 'ahkin* *Qawa id al 'Aqid fi al 'Aqid, Raudhah al 'Ashari fi al 'Ashari* Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah

Elabib Chuzin 1984 "Teguh pada Nilai Sains dan Akhlakiah wa Imanah" Rubrik Wawancara dalam *Jurnal Pustaka*, No. Perdana, Oktober - Desember.

Harun Asyari 2002 "Some Advice" dalam Charles Kurzman *ed. Modernism (1840-1940)* 1940. *Source Book* Oxford: Oxford University Press

Harun Nasution 1996 *Teologi Islam: suatu sisan awal - akhir Perbandingan*, Cetakan 1 Jakarta: UI Press.

- Hefner Robert W. 1985. *Men of the Masses: Islam, Modernity and Indonesian Peasants* dan *Urbans*. Princeton: University Press.
- Hefner Prasetyo 2002. *et al Islam dan Civil Society*. Pandangan Muslim Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Hidayatullah 2000. "Perubahan Kesepakatan Perdagangan Dunia: Apa Solusinya untuk Menundukkan Dunia Ketiga" dalam *Jurnal Wacana*, Lusa 5. Tahun 1.
- Hodgson, Marshall G. S. 1974. *The Venture of Islam: Conscience and History in World Civilization*, Tiga Volume. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Ihsan Muhammad. 2000. "Memahami Sejarah Ahlulsunnah Wal Jama'ah yang Literat dan Anti Ekstrem" dalam Imam Bachaqi ed. *Kontroversi: Umpu Ulu Perdebatan dan Keistisrian*, Yogyakarta: Lajla.
- Ismi Basvan. 1985. "Ida wah bu ffa'awa Pesantren" dalam M. Dawam Rahardi ed. *Organisasi Dunia Pesantren Membangun dan Baruk* cetakan I, Jakarta: P3M.
- Kennedy, Hugh. 1986. *The Prophet and the Age of the prophets*. London & New York: Longman.

4. Zode Ida 1999. "Nil Fisi Reformasi dan Pasca Cris
Dir Problem Kuntan dan Nasib Gerakan Su-
wa" *Jurnal Tasliman Islam* No. 6

2003 "Gerakan Suwa Kelompok Nil
Pogresur" dalam *Jurnal Sosiologi Labirin*
Bisip. 1 *Maranaka* No. 2

M.A. Sahai Mahfudh 2002 "Bahsul Masau dan Isnu-
bath Hukum N Seluah Catatan Pondok"
Kata Pengantar dalam M. Amadun Rahmat
id. Kritik Ngar Iqub Nil. Traa Jerna
Paradigma Bahsul Masau. Cetakan 1, Jakarta
Lakpandan

Makdisi, George 199. "Ash an dan the Ash apte in
Islamic Religious History" dalam George Mak-
disi, *Religion, Law and Learning in Islamic*
Islam. Hampshire: Varwan

Mansour Fakih 2003 "Pesantren Mau Kemana?"
Makalah pada acara Semuoka Pengembangan
Pendidikan Berbasis Suni-Suni Pesantren di
PP Annqarah Guluk Guluk Sumenep.
tanggal 14 Maret

Marwan Sanihy 1982 *Gerakan Pondok Pesantren di In-*
donesia Jakarta: Penerbit Dharma Bhakti

Mawdr F. Mas uch 2000 "Islam dan Pembangunan
Warga Negara" dalam Muhammad Nustan dan

A. Yoh Zakaria Ervani, ed.). *Fiqih Keluarga
sebagaimana Intervensi Agama Negara terhadap
Masyarakat Sipil*. Cetakan I, Jakarta: PB PMII

Meuleman, Johan. 1994. "Pengantar Riwat Hidup
dan Latar Belakang Muhammad Arifin" dalam
Muhammed Arifin, *Nalar Islam dan Nalar
Modern Berbagai Tuntutan dan Jalen Baru*
Jakarta: INIS.

Muhammad Arifin. 2002. *The Unthought in con-
temporary Islamic Thought*. London: Saqi Books.

Muhammad ibn Sulaiman al-Kafir. 1990. *Al-Taqi-
at al-Kafirah wa Taqit*. Cetakan I. Damaskus &
Riyadh: Dar al-Qalam - Dar al-Rita I

Muhammad Abul al-Jabir. 2001. *Naqd al-Iqtisadiah
al-Kafirah wa al-Iktisadiah al-Kafirah*. Cetakan
I. Jakarta: Negeriah al-Negeriah al-Negeriah II al
Faqih al-Iktisadiah (Cetakan I, al-Dar al-
Bakha Dar al-Nasyr al-Maghribiyah

2002. *Post Tradisionalisme Islam*. Ter-
jemahan, Cetakan I, Yogyakarta: LKIS

Muhammad al-Naqub Al-Artas. 1984. *Konsep Pro-
duk dan dalam Islam: Suatu Rangkai Pikir Pem-
ikiran Penguji Pendidikan Islam*. Bandung:
Mizan

ed., *Konstruksi Utopia: Tata Perkebunan dan Reinterpretasi*. Yogyakarta: LKIS.

————— 2000 "Latar Kultural dan Politik Kelahiran Asewa" dalam Imam Bachaqi (ed.), *Konstruksi Utopia: Tata Perkebunan dan Reinterpretasi*. Yogyakarta: LKIS.

Sutton, Roger 1999 *Gapusan-Gapusan Politik Gerakan* (et.), Yogyakarta: INSIST – Pustaka Pelajar.

Wironardjono "Pesantren and the Role of Islam in Indonesia" dalam Manfred Oepen & Wolfgang Karcher (eds.), *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*. Jakarta: P3M, 1988.

Al-Sayhrastani 1967 *Al-Matal wa al-Nabih*, Mawar Syrikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bah al-Halabi wa Awwaladuhu.

Syihabuddin Al-Musi 1978 *Rah al-Mu'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Adhim wa al-Sab' al-Mutahiri* Vol. I Beirut: Dar al-Fikr.

Taufik Abdullah 1987 *Islam dan Masyarakat Pesantren*. Yogyakarta: Indumasa (cetakan I) Jakarta: LP3ES.

Ali, Basma 1991 *Islam and the Environment: A translation of what I hope* (cetakan kedua, Boulders: San Francisco, dan Oxford: Westview Press).

van Buijssen, Martin. 1974. *Nil: Tradisi, Relasi tradisi Kuwa, Pemertua Wacana Baru*. Cetakan I, Yogyakarta: LKS-Pustaka Pelajar.

Zamakhsyari Dhaifur. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cetakan Pertama, Jakarta: LPJES.

———. 1995. *Tradition and Change in Indonesian Islamic Education*. Jakarta: Office of Religious Research dan Development Ministry of Religious Affairs The Republik of Indonesia.

BIODATA PENULIS

Abd Ala lahir di Sumenep pada 5 September 1957. Pernah nyantri di pondok Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep dan Pesantren Tebusreng Jombang. Madrasah Ibtidaiyah dan Muallimunya di tempuh di Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep. Abd Ala lalu melanjutkan kuliah Jurusan Sastra Arab, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, selesai tahun 1987, lalu menempuh Magister Pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selesai 1996, dan sebagai jenjang puncak, Program Doktor Pascasarjana dengan konsentrasi Pemikiran Islam IAIN, ditempuh di Syarif Hidayatullah Jakarta, selesai 1999.

Karya tulis yang dihasilkan Abd Ala di antaranya: *Melampaui Dialog Agama* (Kumpulan Tulisan), diterbitkan Kompas 2002, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal* diterbitkan Penerbit Paramadina Jakarta, 2003. Ia juga menyumbang tulisan: "Antara Formalisme

dan Pengembangan Nilai-nilai Islam” dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abudin (eds.), *Mengapa Partai Islam Kalah?* Jakarta: Alfabeta, 1999.

Keseharian, Abd Ala aktif sebagai Staf Pengajar Sekolah Tinggi Keislaman Annuqayah (STIKA), Sumenep, tahun 1988 sampai sekarang; staf Pengajar Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1990 sampai sekarang, dan staf Pengajar pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 1999 sampai sekarang, Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005 – sekarang.

Kini, Abd Ala hidup bahagia bersama istrinya, Nihayatus Sa'adah, dan empat anaknya: Istizadah Iffati (Icha), Ah. Draki Nuhuz as-Syarqawi (Awi), Zahrafiati Ghina'ati Nafis (Feny), Zakaria Istighfaruna eli Dajyan, (Dhea).

Pesantren bukanlah museum purba,
tempat benda-benda unik dan kuno
disimpan dan dilestarikan. Ia juga bukan
penjara, di mana setiap tindakan dan
pikiran dikontrol serta dikendalikan habis-
habisan. Pesantren adalah sebetulnya ruang
"laboratorium", di mana setiap pemikiran
dikaji dan diuji ulang.

Sudah puluhan tahun insan-insan
pesantren berdiam tenang di ruangan itu.
Seolah ia "candu" yang membuat batin dan
pikiran bisa tenang dan nyaman. Bukan!
Ia bukan candu! Ia adalah ruang yang
sejatinya menggelisahkan. Siapa pun
yang masuk ke dalamnya seyogianya
mengajukan sedikitnya satu tanya: bisakah
tradisi lama berdialog sehat dengan
kekinian kita?